

MOESLIM CHOICE

● EDISI 31 / JULI 2020

● MOESLIMCHOICE.TV
● MOESLIMCHOICE.COM

**MUALAF: SILVIA
CONSTANZA ROMANO
MEMELUK ISLAM
SAAT DICULIK TERORIS
ISLAMIS AFRIKA**

**UNJUK RASA
MENOLAK RUUHIP DI
BERBAGAI DAERAH**

**ERICK MAU LEBUR
BANK SYARIAH,
BISAKAH?**

**SEPAKAT, SUMSEL
KERJA BERSAMA
CEGAH KARHUTLA**

IKHTIAR MENDAGRI DI TENGAH PANDEMI

ISSN_2614-2783



9 772614 278007

Rp 50.000

**GAYA & TRENDY CELANA
JOGGER WANITA
BERHIJAB**



REFERENSI POLITIK MILENIAL

REPUBLIK MERDEKA



IKLAN BACK COVER FC
RP 75.000.000,-

KLIK



IKLAN 1 HALAMAN FC
RP 50.000.000,-



IKLAN CENTER SPREAD FC
RP 80.000.000,-

republikmerdeka.id



HUBUNGI :
PRIAMANAYA BUILDING, LANTAI DASAR,
JALAN PROKLAMASI NO. 53,
JAKARTA PUSAT, 10320
☎ 021-29937177

PENANGGUNG JAWAB

Usman Rizal, Teguh Santosa

DIREKTUR

M. Kamel Fahresy SH

PEMIMPIN PERUSAHAAN

Zulfahmi Jamba

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hj Nur Khamidah

REDAKTUR TRAVEL DEVELOPMENT BUSINESS

Hj Elis Sukma Mawarni SSos MSI

REDAKTUR KHUSUS DEVELOPMENT BUSINESS

Siswo Hadi Setiyono, SE, MM,
Syahrul Ramadhan Siregar

REDAKTUR

Agung Mariyana, Yuki Rushdie,
Agus Jauhari, Endang Purwanti,
Iwan Setiawan, Andianto

KEPALA BIRO SUMSEL

Rahmat Romli

REPORTER

Mega Puspita, Muhammad
Fahresy, Widodo Bogiarto,
Abdul Muktar, Sudjatmiko, Rio
Hasan Sumantri, Raden Solihin, Ida
Indiyani, Adhes Satria, Syauqi,
M. Iqbal, Ilham Akbar,
Sunarya Sultan

FOTOGRAFER

Al Amin

ART DESIGN CONSULTANT

Fonda Lapod

TATA LETAK

Kosasih Chiko

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Rizky Aprillandani

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Susi Herawati

DIVISI PENGEMBANGAN IT

Wahyu, Irvan, Firman

PENGEMBANGAN BISNIS

Hadi Setyo, Ida Iryani

DISTRIBUSI

Itang Abdul Muhtar, M. Isro, Mulyadi

PERCETAKAN

PT. RESPATIH SAHABAT SEJATI
ALAMAT : JL.KALIBARU TIMUR V/39F
BUNGUR SENEN JAKARTA PUSAT

Isi diluar tanggung jawab percetakan

>>SALAM REDAKSI

KRISIS

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam percakapan sehari-hari, mudah sekali kita mengucapkan kata krisis. Yang mendengar lantas mengiyakan tanpa bertanya lagi. Krisis ya krisis.

Tapi, sebenarnya krisis adalah situasi tidak stabil yang mengarah kepada bahaya. Labil dan berbahaya. Jadi, jika tidak stabil namun maju, artinya bukan krisis.

Lantas dengan mudah pula kita melekatkan krisis pada sembarang situasi: Krisis identitas, krisis paruh baya, krisis politik, ekonomi, antara lain. Persoalannya, bagaimana kita mengukur krisis itu.

Jika belakangan ini penghasilan berkurang, apakah sudah krisis? Ya ukur dulu tingkat krisisnya. Apakah penghasilan berkurang 5-10 persen, atau 50 persen, bahkan 90 persen? Semakin tinggi pengurangannya, demikian pula tingkat krisisnya.

Begitu pula dengan krisis di seputar wabah Covid-19. Krisis akan terjadi jika tingkat penularannya semakin tinggi, seiring dengan tingkat kematian semakin tinggi, dan cakupan uji swab juga meluas. Jika ada yang tak terhitung, sangat mungkin data yang dihasilkan juga keliru.

Pada titik ini, validitas (kesahihan) data mengenai Covid-19 sangat menentukan. Demikianlah akhir-akhir ini kita melihat fluktuasi (turun-naik) angka-angka terkait warga terkonfirmasi positif dan yang meninggal akibat terpapar Covid-19. Validitas datanya sangat menentukan hasil analisis.

Hasil analisis itulah yang lantas dapat menjadi rekomendasi untuk mengambil putusan. Di tingkat perorangan sampai kebijakan Presiden. Jika data kurang valid, hasil analisis demikian pula. Alhasil, kebijakan atau putusan yang diambil boleh jadi akan meleset atau bahkan berbahaya sehingga justru menjadi krisis.

Dalam konteks ini, sampailah kita kepada wacana *reshuffle* kabinet yang viral di media sosial setelah rekaman Presiden Joko Widodo jelas-jelas mengungkapkan kejenkelannya terhadap kinerja pemerintahan yang ia pimpin. Dua aspek krisis telah Presiden kemukakan dalam pidato itu: Labil dan berbahaya.

Persoalannya memang kembali kepada ukuran. Banyak sekali yang harus diukur. Penanganan Covid-19 beserta dampak yang luar biasa di berbagai sektor (kementerian). Bagaimana pula sektor-sektor itu menanggapi wabah, katakanlah misalnya mulai dari hal sepele seperti kalung eucalyptus, penyediaan alat pelindung, hingga hal-hal semacam pelaksanaan Pilkada, maupun ekspor benih lobster. Banyak lagi sebenarnya.

Apapun, kita semua memiliki keterbatasan waktu dan tenaga. Jadi, untuk menutup pengantar *MoeslimChoice* edisi ini, sebagai sesama makhluk ciptaanya, kami menyerukan untuk pandai-pandailah membaca dan mengkaji. Sebagaimana rujukan yang sah dan handal hingga akhir zaman:

Iqra bismirobbikalladzi holaq. Bacalah dengan nama tuhanmu yang menciptakan...♦

>>COVER EDISI INI



www.moeslimchoice.com

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No.
8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750
Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice TV

>> DAFTAR ISI



06

LAPORAN UTAMA

Sebuah rekaman video menayangkan Presiden Jokowi marah menjadi isu politik bergulir tentang pemerintahan yang kerepotan menghadapi wabah penyakit virus corona. Terutama dampaknya terhadap perekonomian. Yang ramai justru wacana *reshuffle*, pergantian personel kabinet.

20

COVER STORY

Kemendagri mengemban tanggung jawab luas dalam pemerintahan hingga ke pelosok daerah. Untuk tahun ini, pelaksanaan Pilkada adalah salah satu agenda penting di tengah wabah global penyakit Covid-19.



24

LAPORAN KHUSUS

Di tengah wabah virus corona (Covid-19) muncul Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Salah satu reaksinya, massa berunjuk rasa menolaknya di depan Gedung DPR/MPR.



34

EKONOMI SYARIAH

Bank-bank Syariah yang mayoritas sahamnya milik negara akan merger. Sudah menjadi wacana sejak beberapa tahun lalu sebenarnya. Tapi, kali ini Menteri BUMN sudah punya jadwal: Februari 2021.



42

FASHION

Pada jaman dulu, Celana Jogger sering dipakai oleh para wanita untuk melakukan kegiatan berolahraga dan senam, namun seiring dengan berjalannya waktu, Celana Jogger wanita kini lebih sering dipakai.



48

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Meski masih berjibaku dengan penanganan Covid-19 namun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tetap terus mempertahankan prioritasnya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah).



64

BIROKRASI

Imbas penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia yang dimulai pada bulan Maret 2020 mempengaruhi berbagai aspek tak terkecuali pada pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Berbagai kebijakan pun dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk terus menggenjot peningkatan kesertaan ber-KB tersebut untukantisipasi terjadinya *baby boom* di masa yang akan datang demi kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ini baik jangka pendek maupun jangka panjang.

REGULER

- 3 | DARI REDAKSI
- 38 | MUALAF
- 46 | OPINI
- 62 | KOLOM
- 76 | PARLEMEN
- 84 | RESENSI
- 86 | DUNIA ISLAM
- 94 | KAJIAN
- 98 | INSPIRASI

78

ISLAMICTAIMENT

Pandemi Virus Corona di Indonesia, hingga memasuki bulan ke empat sejak kasus awal diluncurkan Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020, masih juga belum mereda.







GONTA- GANTI MENTERI DI TENGAH PANDEMI

Sebuah rekaman video yang menayangkan Presiden Jokowi marah menjadi isu politik bergulir tentang pemerintahan yang kerepotan menghadapi wabah penyakit virus corona. Terutama dampaknya terhadap perekonomian. Yang ramai justru wacana *reshuffle*, pergantian personel kabinet.

Pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020, yang baru dipublikasikan pada 28 Juni 2020, langsung menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut bakal melakukan reshuffle kabinet akibat kinerja para pembantunya dinilai biasa-biasa saja dalam menangani Covid-19. Beberapa sektor yang disebut Jokowi antara lain sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan terkait distribusi bansos.

Di mata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, ada beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju yang memungkinkan untuk di-reshuffle oleh Presiden Jokowi. Indikasinya, menteri tersebut disinggung dalam pidato, juga kinerjanya memang cenderung biasa dan nyaris tidak ada kemajuan.

"Menkes, Mensos, Menaker, Menkumham, dan menteri tim ekonomi:

Menkeu,” kata Ujang Komarudin, Senin, 29 Juni 2020. Secara khusus, pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menyoroti penekanan dalam pidato Jokowi tersebut terkait anggaran penanganan Covid-19 yang telah dilakukan melalui UU Nomor 2/2020 namun justru realisasinya masih mengecewakan.

Malah pakar hukum dan politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam meyakini *reshuffle* akan terjadi. “Saya yakin, Jokowi akan melakukan *reshuffle* secepatnya. Hal itu tidak dapat dipungkiri,” ujar Saiful Anam, Sabtu, 4 Juli 2020.

Keyakinan Saiful Anam bukan tanpa dasar. Ia mengemukakan telah mendapat informasi dari salah satu sumbernya di Istana, yang tidak mau ia sebutkan namanya,

Saya mendapatkan kabar dari orang di Istana, ada beberapa orang yang akan diganti dan digeser dari pos menteri sebelumnya.

antara lain, Mensos Juliari P Batubara, Menkop UKM) Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkes Terawan Agus Putranto,

“Salah satunya adalah Ketua umum Relawan Jokowi atau ReJO HM Darmizal. Namun, sumber itu tidak mau menyebutkan mau jadi menteri apa,” beber Saiful Anam.

Yang lebih pasti, *reshuffle* bukan barang baru bagi Jokowi. Pada periode pertama menjabat sebagai Presiden RI, tiga kali dia merombak komposisi kabinet. Pada 12 Agustus 2015 ia merombak enam menteri yang belum juga menjabat setahun, kemudian pada 27 Juli 2016 melantik 11 menteri baru, dan terakhir pada 17 Januari 2018.

Alasannya macam-macam, mulai dari kinerja yang dinilai buruk hingga masalah koalisi partai.

Salah satu poin terakhir tampak ketika ia mengganti Asman Abnur-kader Partai



bahwa akan ada orang baru yang akan masuk ke jajaran kabinet yang akan di-*reshuffle* Jokowi.

“Saya mendapatkan kabar dari orang di Istana, ada beberapa orang yang akan diganti dan digeser dari pos menteri sebelumnya. Orang yang tidak mau disebut namanya itu bilang ada beberapa orang baru yang akan menduduki kursi menteri,” ungkap Saiful Anam.

Namun, ada perbedaan personel menteri yang disebut Saiful dengan Ujang. Mengaku mendapat bisikan dari sumber di Istana Kepresidenan, Saiful Anam menyebut yang akan mengalami *reshuffle*

dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.

Selain itu, Saiful juga menyebutkan beberapa menteri lain yang kemungkinan akan dirombak atau digeser, antara lain; Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menparekraf Wishnutama Kusubandio, dan Menag Fachrul Razi.

Adapun untuk orang baru yang akan masuk jajaran kabinet disatu pos kementerian, dibocorkan Saiful, ialah orang yang pernah berjasa untuk Jokowi.

Amanat Nasional (PAN)—dari kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 14 Agustus 2018. Saat itu gejolak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah bergema. PAN, partainya Asman, memberi dukungan ke Prabowo Subianto, lawan Jokowi.

Jelas masih perlu menunggu apakah kemarahan Jokowi benar-benar diwujudkan atau hanya motivasi agar kabinet lebih perform kinerjanya. Terlebih lagi, gontaganti menteri di tengah pandemi, yakni wabah penyakit Covid-19, mungkin justru membuat tenteram mereka yang hendak diganti. ♦

Bismillahirrahmannirrahim
Assalamualaikum Wr Wb

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namu Budaya, salam kebajikan.

Yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden, para Menko, para menteri. Yang saya hormati, seluruh ketua dan pimpinan lembaga-lembaga yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu per satu.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Suasana dalam tiga bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang hadir di sini, sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong garis bawah, dan perasaan itu tolong kita sama, ada sense of crisis yang sama.

Hati-hati, OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) terakhir sehari dua hari lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dua terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen minus. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen. Perasaan ini harus sama, kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan anggap ini normal. Bahaya sekali kita.

Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Lha kalau saya lihat, bapak, ibu, saudara-saudara masih ada yang lihat ini sebagai sebuah ini masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary.

Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya.

Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya adalah harus suasana krisis, jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apa ini. Mestinya suasana itu ada semuanya, jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya.

Kalau perlu, kebijakan Perppu ya, Perppu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres ya Perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri, keluarkan, untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita.

Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja, saya jengkelnya di situ, ini apa enggak punya perasaan, suasana ini krisis.

Yang kedua, saya perlu ingatkan, belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan

belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat.

Sekali lagi, jangan anggap ini biasa-biasa saja. Kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat, kalau perlu Perpres, saya keluarkan Perpresnya.

Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan. Itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat, ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan, dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi.



Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah dise-diakn Rp70-an triliun seperti ini.

Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meski pun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100 persen.

Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti enggak ada apa-apa, berbahaya sekali.

Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi, manufaktur, industri, terutama yang padat karya, beri prioritas kepada mereka supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit se-rupiah pun belum masuk ke stimu-

lus ekonomi kita hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Extraordinary.

Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progress yang signifikan, enggak ada. Kalau mau minta Perppu lagi, saya buatin Perppu kalau yang sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya.

Sekali lagi tolong, ini betul-betul dirasakan kita semuanya jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary betul-betul harus kita lakukan dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah pemerintahan, akan saya buka.

Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang, suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu, sudah (angkat tangan). Artinya, tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mau mengerti, memahami, apa yang tadi saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis.

Kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. ♦



DEMOKRAT DAN PAN DALAM WACANA RESHUFFLE

Partai-partai politik yang berpeluang memasukkan kaderya sebagai menteri jika terjadi reshuffle menanggapi seara hati-hati isu bongkar pasang kabinet kali ini. Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional misalnya.

Isu kocok ulang kabinet atau *reshuffle* terus bergulir. PAN dan Partai Demokrat dikabarkan bakal masuk dan bergabung memperkuat kabinet kerja Jokowi-Maruf Amin di periode kedua. Analisis politik dan kebijakan publik, Adib Miftahul berpendapat, jika benar PAN dan Demokrat bergabung, maka Presiden Jokowi makin tersandera oleh partai politik.

"Jokowi makin tersandera oleh oligarki politik itu nyata. Jokowi tidak bisa lepas

dari oligarki politik," kata Adib, Sabtu, 4 Juli 2020. Adib sependapat jika PKS memilih tetap konsisten di jalan oposisi akan meraup keuntungan elektoral pascabergabungnya Demokrat dan PAN ke dalam kabinet.

"Jika benar PAN dan Demokrat bergabung, PKS tidak hanya panen elektoral tapi juga dapat durian runtuh," tegas Adib.

Di sisi lain, jika benar PAN dan Demokrat bergabung, justru menandakan parpol pendukung pemerintah yang kalau dilihat lengkap ternyata keropos di dalamnya. Padahal sudah ditambah kekuatan baru yakni Partai Gerindra.

"Ternyata menunjukkan pemerintahan ini tidak begitu kuat walaupun oposisinya sangat kecil. Padahal di awal komposisi kabinet Jokowi terlihat begitu kuat karena didukung oleh mayoritas parpol," tandas Adib.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan melihat isu *reshuffle* kabinet akibat kinerja para pembantu Jokowi yang biasa-biasa saja lebih menarik ketimbang polemik Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Reshuffle lebih menarik daripada HIP, ini menandakan persoalan dampak pandemi lebih utama ketimbang masalah RUU HIP," kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini kepada wartawan, Senin (29/6/2020).

Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR ini menilai, sikap Presiden ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang dilanda banyak persoalan akibat wabah Covid-19. Sehingga, isu *reshuffle* itu muncul di usia kabinet Jokowi-Maruf Amin yang belum genap satu tahun.

Karena faktanya, lanjut Irwan, pandemi global ini berdampak pada sejumlah sektor, baik itu kesehatan sampai dengan perekonomian.

"Sikap Presiden itu menyiratkan adanya situasi pemerintah kekinian sedang menghadapi banyak persoalan, terutama wabah virus corona, Covid-19 yang menghantam sektor kesehatan maupun perekonomian," ujarnya.

Legislator asal Kalimantan Timur ini melanjutkan karena penanganan dampak pandemi Covid-19 lebih penting saat ini seyogyanya, pembahasan RUU HIP ini dihentikan DPR dan pemerintah, bukan hanya ditunda dengan dalih mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Jadi harus dihentikan. Bukan ditunda," tegas Irwan.

Sebab, kata Irwan, persoalan dampak pandemi merupakan masalah fundamental yang jelas-jelas bisa membuat bahaya kondisi bangsa Indonesia saat ini, di antaranya masalah ekonomi bangsa yang terancam runtuk akibat pandemi Covid-19.

"Harusnya pemerintah dan semua elemen warga bangsa terfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19," tandasnya.

Tanggapan yang lebih dingin datang dari politisi senior Demokrat, Syarif Hassan. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini menilai seharusnya teguran keras terhadap menteri-menterinya ini sifatnya tertutup. Hal ini menjadi penting mengingat histeria publik terhadap momok pandemi covid-19 ini belum usai, kalau tidak lebih tepat disebut makin menakutkan.

Sebaiknya Presiden mengevaluasi kinerja menteri-menterinya dengan bijak dan tanpa menimbulkan kegaduhan. Presiden pun-

ya otoritas penuh untuk menilai bawahannya yang masih layak dipertahankan atau tidak. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.



MC "Jika benar PAN dan Demokrat gabung, PKS tidak hanya panen elektoral tapi juga dapat durian runtuh," tegas Adib.

"Namun demikian, yang justru menyisakan pertanyaan di benak publik adalah mengapa presiden sampai demikian dramatisnya menegur bawahannya di ruang publik? Bukankah ini justru menimbulkan polemik yang tidak perlu? Padahal, jika kinerja menteri tidak baik, ini menandakan kinerja presiden juga tidak baik. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, ini menandakan gagalnya para menteri menerjemahkan dan menjalankan visi, misi, dan program presiden. Atau bahkan, bisa jadi konsep dan program kerja yang disampaikan

oleh presiden gagal menjawab tantangan-tantangan pembangunan,” kata Syarif, Selasa, 30 Juni 2020.

Teguran terbuka yang disampaikan presiden, tidak saja meninggalkan tradisi buruk bagi soliditas kabinet, namun juga mencerminkan gagalnya presiden dalam mengarahkan tim kerjanya untuk bersatu padu mengentaskan berbagai persoalan

hkan masuk ke Indonesia sementara pengangguran Indonesia semakin tinggi, lambatnya bantuan stimulus fiskal bagi UMKM dan koperasi, kurangnya perhatian bagi tenaga medis, serta miskordinasi kebijakan penanganan Covid-19 antara pusat dan daerah.

Belum lagi banyaknya berbagai kebijakan kontraproduktif dan tumpang tindih



kebangsaan.

Bahwa sekalipun pergantian (*reshuffle*) adalah hak prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945, pelaksanaan hak istimewa ini perlu ketegasan sehingga berbagai masalah dapat ditangani dengan segera. Jangan sampai teguran terbuka ini hanya berakhir menjadi drama.

Menurut Syarif, Partai Demokrat sudah sejak awal mewabahnya Covid-19 sampai saat ini sering menyampaikan masukan berkali-kali termasuk soal pengelolaan anggaran penanganan pandemi yang tidak cepat dan tidak tepat sasaran. Bahkan berpotensi terjadinya korupsi. Masukan ini sayangnya tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sebagai contoh, menurut Syarif, kebijakan tentang TKA China tetap dibole-

MC *Sebelumnya, Ketua DPP PAN Saleh Daulay mengatakan meski sudah mendengar kabar perombakan, ia bilang partai belum membahasnya sama sekali. “Karena wacana reshuffle itu wacana biasa saja. Setiap periode, wacana seperti itu selalu muncul,” kata Saleh, Selasa, 30 Juni 2020.*

(*misleading*) antarkementerian negara. Alhasil, korban terinfeksi covid-19 semakin bertambah setiap harinya, data terakhir telah mencapai 55.092 jiwa per 29 Juni 2020.

Padahal pemerintah memiliki ruang yang sangat luas untuk mengambil kebijakan yang perlu dalam mengatasi pandemi covid-19 ini. Kebijakan ini bahkan bersifat *extra-ordinary* dan *extra-legal*.

Skema formulasi dan pertanggungjawaban keuangan penggunaan anggaran covid juga bersifat istimewa sebab negara dianggap dalam keadaan darurat. Buktinya, kenaikan anggaran penanganan pandemi yang semula dari Rp 405 Triliun dan membengkak menjadi Rp 695 Triliun tidak melalui mekanisme formulasi fiskal (*fiscal budgeting*) yang biasa. Namun yang miris, realisasi peng-

gunaan dana covid-19 ini masih sangat rendah.

Di bidang ekonomi, keyakinan para pembantu presiden bahwa ekonomi akan tumbuh positif sepertinya rawan terjebak pada optimisme semu. Dana Moneter Internasional (IMF), kmisalnya, memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh negatif 0,3 % di tahun 2020 ini. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menyampaikan proyeksi serupa dimana ekonomi Indonesia akan tumbuh minus 2,8- 3,9 persen.

Begitu pun dengan Bank Dunia yang memprediksi pertumbuhan di angka 0 persen. Sikap optimisme semu pembantu Presiden inilah yang membuat pemerintah tidak memiliki "sense of crisis" sebagaimana istilah Presiden Jokowi. Dengan deretan fakta ini, menjadi wajar publik mempertanyakan bagaimana sebenarnya arah kebijakan dan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi ini.

Tersirat, kata Syarief, Pemerintah lebih mengutamakan penanganan ekonomi dibandingkan penanganan pandemi Covid 19. Ironisnya korban Covid 19 makin meningkat tajam, stimulus ekonomi pun terhambat karena anggaran tidak tersalurkan. Boleh jadi *reshuffle* kabinet dalam waktu dekat adalah pekerjaan mendesak Presiden Jokowi.

Di sisi lain, Partai Amanat Nasional mengaku belum ada komunikasi antara Presiden Joko Widodo dengan Partai Amanat Nasional berkenaan dengan isu masuknya partai pimpinan Zulkifli Hasan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. PAN sendiri sudah membuka diri bila presiden ingin merekrut kader partai masuk dalam jajaran kabinet yang tengah diisukan akan di-*reshuffle*.

"Yang jelas kita kan enggak ada pembicaraan persoalan itu. Ini hak prerogatifnya presiden, jadi kalau seandainya ada kader apakah ketua umum atau siapa yang diakomodir oleh Pak Jokowi itu kan merupakan prerogatif pak presiden," kata Legislator PAN asal Sumbar, Guspari Gaus kepada *Kantor Berita Politik RMOL*, Minggu, 5 Juli 2020.

"Dan kita tentu dengan tangan terbuka untuk merespon secara positif langkah-langkah yang dilakukan oleh bapak presiden untuk mengakomodir kader PAN itu sendiri," imbuhnya.

Dia tak masalah dengan anggapan bahwa PAN yang sebelumnya menyatakan sebagai oposisi bakal menjadi bagian dari pemerintah. "Jangankan PAN, Prabowo saja yang merupakan pertarungan *head to head*, yang *leading sector*-nya

saja bergabung, sedangkan PAN hanya pendukung, kan gitu," ujarnya.

Bagi PAN, masuk ke dalam kabinet merupakan langkah untuk penguatan pemerintah dalam menghadapi persoalan bangsa. "Kami melihat, kalau mungkin ada kader PAN yang terbaik dianggap Jokowi masuk dalam rangka penguatan, kalau itu memang merupakan respons yang diberikan Jokowi tentu ini kita akan berikan apresiasi," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PAN Saleh



MC

Di sisi lain, Partai Amanat Nasional mengaku belum ada komunikasi antara Presiden Joko Widodo dengan Partai Amanat Nasional berkenaan dengan isu masuknya partai pimpinan Zulkifli Hasan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. PAN sendiri sudah membuka diri bila presiden ingin merekrut kader partai masuk dalam jajaran kabinet yang tengah diisukan akan di-reshuffle.

Daulay mengatakan meski sudah mendengar kabar perombakan, ia bilang partai belum membahasnya sama sekali. "Karena wacana *reshuffle* itu wacana biasa saja. Setiap periode, wacana seperti itu selalu muncul," kata Saleh, Selasa, 30 Juni 2020.

Saleh mengaku partainya tidak pada posisi mencampuri hak prerogatif Presiden. "Kepentingan PAN adalah bagaimana agar masyarakat bisa diurus dengan baik. Itulah tugas pemerintah. Itulah yang harus dilakukan para menteri yang ada," katanya.

Ia juga mengklaim Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak menyinggung sama sekali masalah *reshuffle* saat rapat internal. Dibanding PKS, Zulhas menunjukkan isyarat lebih moderat dan terbuka mendekati kekuasaan. Sikapnya kontras dengan posisi salah satu pendiri partai, Amien Rais, yang ingin tetap jadi oposisi.

"Ketum sedang konsentrasi mengurus kader-kader yang mau bertarung dalam pilkada. Juga sedang bersiap-siap melakukan konsolidasi di seluruh wilayah," katanya. ♦

ISU RESHUFFLE DAN SERANGAN UNTUK EKSPOR BENIH LOBSTER

Sudah menjadi kontroversi sejak dalam wacana, ekspor benih lobster muncul menjadi serangan untuk Menteri Perikanan Edhy Prabowo dari Partai Gerindra. Lantaran kontroversi, senantiasa ada yang pro dan kontra seiring dengan isu *reshuffle* belakangan ini.

Pencabutan ekspor benih lobster oleh Menteri Perikanan Edhy Prabowo ikut meramaikan wacana seputar *reshuffle* kabinet. Banyak yang menguliti kebijakan itu meskipun tak langsung mengaitkannya dengan bongkar-pasang kabinet.

Yang membuat ekspor benih lobster menjadi mungkin adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang disahkan pada awal Mei

2020. Permen ini menganulir Permen No 56 Tahun 2016 yang ditandatangani menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Namun, ada persoalan teknis dalam penerapan Permen baru itu, antara lain aturan penunjangnya yang menjadi kewenangan instansi lain.

Misalnya, Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) masih menggodok Peraturan Menteri Keuangan terkait ekspor benih lobster dan mekanisme pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tapi, di saat aturan final belum dikeluarkan, justru sudah ada dua perusahaan yang mengekspor benih bening lobster (*puerelus*) sebanyak 14 koli pada Jumat, 12 Juni 2020 lalu.

Jadi, ekspor berlangsung mendahului aturan baku. Karena kebutuhan untuk cepat melakukan ekspor, dikabarkan, KKP



sendiri mengusulkan untuk diterapkan penarikan PNBK Khusus, sambil menanti adanya aturan yang tetap.

"Tampaknya hal itu (PNBK khusus) ada diusulkan juga oleh KKP, dan lagi kami koordinasikan bersama," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 16 Juni 2020.

Saat ditanya lebih jauh, akan dimasukkan ke pos PNBK apa, Askolani belum bisa menjelaskan lebih rinci mengingat revisi PP PNBK KKP saat ini masih dibahas. "Hal itu lagi direview," serunya.

Direktur PNBK Kemenkeu Wawan Sunarjo saat dimintai penjelasannya mengatakan, sepengetahuannya, tidak diatur mekanisme khusus PNBK untuk udang. "Yang ada perizinan kapal dan izin tangkap. Cek PP PNBK KKP. Kalau masalah ekspor nya ada di BC (Bea Cukai)," ucapnya.

Kepala Subdirektorat Komunikasi Dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea Cukai Deni Surjantoro sendiri membenarkan bahwa pada Jumat, 12 Juni 2020 ada dua Perusahaan yakni PT ASSR dan PT TAM yang mengekspor benih lobster ke Vietnam. Ia merinci, PT ASR mengirimkan *live lobster fry* kurang lebih tujuh koli atau

MC Saat ditanya lebih jauh, akan dimasukkan ke pos PNBK apa, Askolani belum bisa menjelaskan lebih rinci mengingat revisi PP PNBK KKP saat ini masih dibahas. "Hal itu lagi direview," serunya.



sekitar 37.500 ekor. Sedangkan PT TAM mengirim juga *live lobster fry* kurang lebih tujuh koli dengan 60 ribu ekor benih hidup.

Deni menjelaskan, barang kiriman tersebut masuk di dalam sistem DJBC, Jumat, 12 Juni 2020 sekitar pukul 12.30. "Karena masuk dalam sistem berarti persyaratan sudah ada di dalam sistem, yaitu sertifikat karantina ikan termasuk di dalamnya kuitansi PNBK," tuturnya.

Menurut Deni, pihaknya sudah mengkonfirmasi ulang ke Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bandara Soekarno Hatta, sebelum barang dizinkan untuk diekspor.

"Menurut mereka sudah betul dan memenuhi persyaratan. Intinya dari BC selama syarat lengkap, kami merilis. Kemudian mengenai Permen KKP nomor 12 itu diundangkan tanggal 5 Mei 2020. Dalam Permen itu disebut bahwa Permen KPP terdahulu No 56 (2016) dicabut dan tidak berlaku. Setelah konfirmasi ulang kami menyetujui ekspor itu," ucapnya.

Di kesempatan berbeda, sumber di DJBC sempat menyebut, benih lobster yang akan diekspor, sempat disegel DJBC Soekarno-Hatta. Pasalnya, saat itu, eksportir tidak memenuhi persyaratan bea keluar dan PNBK, kuota, serta ukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020.

Untuk diketahui, sebelum ekspor dilakukan, perusahaan pengeksport harusnya lebih dulu melunasi PNBK per benih yang besarnya Rp 5.000 per ekor. Namun, faktanya, ekspor tetap bisa dilakukan dengan armada carter (VN 5630) pada 12 Juni pukul 14.30 dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta WIB dengan tujuan Kota Chi Minh City.

Terhadap hal ini, pengamat sektor perikanan yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menganggap, saat ini Menteri Kelautan dan Perikanan teledor. Pasalnya, membuka keran ekspor untuk benih lobster tangkap, sama saja mengabaikan status lobster yang sudah over exploited di 11 wilayah perikanan Indonesia.

Di sisi lain, budidaya lobster khususnya pembenihan dan pembesaran di dalam negeri tengah giat-giatnya dilakukan masyarakat di banyak sentra budidaya lobster. Mulai dari Lombok, Sumatera, Jawa Barat sampai Aceh. "Di tengah menggeliatnya usaha budidaya dalam negeri, justru diabaikan," cetusnya.

Kemudian, lanjut Halim, Permen 12 Tahun 2020 tidak didasarkan pada hasil kajian yang memadai. Ia merujuk UU Peri-

kanan yang menyebutkan, setiap kegiatan pengelolaan perikanan untuk jenis lobster, harus didahului hasil kajian. Sampai detik ini, imbuhyanya, hasil kajian dari komisi nasional sumber daya ikan, terakhir dilakukan tahun 2017. Artinya, kajian tersebut dilakukan oleh menteri kelautan perikanan sebelumnya yang hustru melarang ekspor benih lobster.

"Menteri kelautan saat ini membolehkan ekspor benih lobster tapi tidak punya dasar. Ini bagaimana, status kajiannya merah dan kuning kok bisa diekspor?" ungkapnya.

Selanjutnya, ia juga mempermasalahkan penerbitan izin kepada 18 lebih perusahaan eksportir benih lobster yang terbit



tanpa didahului oleh adanya peraturan pelaksana dari Permen 12/2020. "Itu belum ada peraturan pelaksana. Setelah ada juklak-juknis baru kemudian bisa dilaksanakan uji, termasuk dilihat rekam jejak apakah perusahaan pengeksportir ini pernah melakukan budidaya," tuturnya.

Ia menegaskan, pemberian atau aktivitas ekspor yang sudah berjalan ini merupakan suatu pukulan kepada penegak hukum yang begitu mudahnya 'dikangangi' oleh kepentingan ekonomi jangka pendek dan mengabaikan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, Koordinator Penasihat Menteri KKP Rokhmin Dahuri justru berpendapat kebijakan ekspor benih lobster ini merupakan kebijakan yang tepat dari sisi ekonomi dan ekologi. Ia menuturkan, saat KKP dipimpin Susi Pudjiastuti, semua penangkapan benih lobster dilarang, baik untuk budidaya sendiri apalagi ekspor.

Padahal, survival rate (kemampuan

MC Selanjutnya, ia juga mempermasalahkan penerbitan izin kepada 18 lebih perusahaan eksportir benih lobster yang terbit tanpa didahului oleh adanya peraturan pelaksana dari Permen 12/2020. "Itu belum ada peraturan pelaksana. Setelah ada juklak-juknis baru kemudian bisa dilaksanakan uji, termasuk dilihat rekam jejak apakah perusahaan pengeksportir ini pernah melakukan budidaya," tuturnya.

hidup benih lobster hingga dewasa) budidaya lobster di Indonesia saja hanya sebesar 30 persen. Jauh dibandingkan dengan survival rate Vietnam yang mencapai 70-80 persen. Jika di alam liar, lobster yang mampu hidup sampai dewasa hanya 0,01 persen dari total jumlah benih.

"Jadi ekspor secara terbatas ini sudah benar, apalagi banyak orang terdampak Covid 19, jika benih dibeli sekitar Rp10 ribu per ekor, maka akan ada perputaran sekitar Rp3,6 triliun, di NTB, NTT, selatan Jawa, Nias dan lainnya," tuturnya.

Asumsi Rp3,6 triliun datang dari rata-rata jumlah benur yang bisa diekspor yakni sejuta ekor per hari. Harga rata-rata ekspor sekitar US\$3 per ekor.

•
•
Untuk diketahui, sebelum ekspor dilakukan, perusahaan pengeksportir seharusnya lebih dulu melunasi PNBP per benih yang besarnya Rp 5.000 per ekor.

Namun Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) tetap mengkritisi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ini. Salah satu poin yang disorot adalah ketiadaan transparansi pemilihan 26 perusahaan eksportir benih lobster oleh yang dilakukan KKP.

Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati menyatakan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama masyarakat bahari yang hidupnya sangat tergantung kepada sumber daya kelautan dan perikanan. Kebijakan pemberian izin ekspor benih lobster, khususnya pemilihan 26 perusahaan eksportir, dinilai oleh Susan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tak ada unsur transparansi.

"Tak ada transparansi terkait izin ekspor benih lobster kepada 26 perusahaan eksportir. Apa dasar pemilihannya dan bagaimana rekam jejak perusahaan-perusahaan itu? masyarakat tak ada yang mengetahui hal itu," ungkap Susan, Minggu, 5 Juli 2020. ♦



EDHY PRABOWO: MUARANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT

Menanggapi ingar-bingar kritik terhadap kebijakannya yang mengizinkan ekspor benih lobster, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan secara rinci argumennya. Menurut dia, pembukaan kembali keran ekspor benih lobster semata demi menyejahterakan rakyat.

"Kita libatkan masyarakat untuk bisa budidaya (lobster). Muaranya menyejahterakan," kata Menteri Edhy, Minggu, 5 Juli 2020.

Kebijakan yang kembali mengizinkan lagi ekspor benih lobster tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur pengelolaan hasil perikanan seperti lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajunfan (*Portunus spp.*).

Permen ini sekaligus merevisi aturan larangan ekspor benih lobster yang dibuat di era Susi Pudjiastuti yang mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016. Edhy menegaskan, kebijakan pembukaan ekspor benur dilakukan untuk nelayan yang menggantungkan hidup dari menangkap benih lobster.

Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk membangkitkan geliat pembudidayaan lobster di berbagai daerah. Pemerintah juga terus meningkatkan akses permodalan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan.

Edhy menginginkan publik dapat melihat kebijakan itu secara utuh dengan mengingat arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan meliputi perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan nelayan. "Yang paling penting, izin itu dibuat untuk kesejahteraan, manfaat atau tidak ke masyarakat," ungkapnya.

Menteri asal Partai Gerindra ini juga menegaskan, tidak menutupi apapun dalam kebijakan ekspor benih lobster. Sebelum me-

legalkan ekspor benih lobster, KKP telah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik.

"Ekspor ini tidak hanya melibatkan korporasi tapi juga nelayan. Karena penangkap benihnya kan nelayan. Terdapat 13.000 nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster," kata Edhy.

Menurut Eddy, harusnya yang menjadi persoalan adalah larangan ekspor yang membuat nelayan penangkap benih lobster tidak bisa makan. "Mereka tidak punya pendapatan. Ini sebenarnya pertimbangan utama kami," tambahnya.

Edhy menyatakan, ekspor benih lobster juga tidak terus menerus dilakukan. Bila kemampuan budidaya di Indonesia semakin baik, otomatis benih yang ada dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan pembudidayaan di dalam negeri.

Bersamaan dengan upaya meningkatkan kapasitas budidaya lobster dalam negeri, Edhy ingin pemasukan bagi negara berjalan. Itulah sebabnya, ekspor benih lobster dikenakan pajak dan besarnya tergantung margin penjualan.

"PNBP ini sangat transparan, lho. Hanya mereka yang mengeksport saja yang bayar, bukan nelayan atau yang cuma berbudidaya. Aturan PNBP pun disesuaikan dengan harga pasar," terang Edhy.

Selanjutnya, perusahaan yang mendapat izin ekspor tidak asal tunjuk. Perusahaan harus melewati proses administrasi hingga uji kelayakan. KKP sendiri membentuk panitia untuk menyeleksi perusahaan penerima izin.

"Pendaftaran izin ini terbuka. Ada prosesnya, dari mulai berkas hingga peninjauan langsung proses budidaya yang dimiliki. Setelah kelayakannya terverifikasi, baru mendapat izin. Proses ini terbuka, tidak ada yang kami tutupi," tandasnya. ♦



Isu Reshuffle

MENTERI PERTANIAN DAN KALUNG ANTIVIRUSNYA

Wabah virus corona (covid-19) memang memicu upaya mendapatkan obat penangkalnya dengan segera. Namun, ya perlu rincian dan uji klinis sebelum menjadi produk komersial. Apa kaitannya dengan reshuffle?

Nah, di Indonesia, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian ikut mengupayakan penangkal virus yang kini telah mewabah secara global itu. Bentuknya berupa kalung.

Malah dari tayangan YouTube Koloni Indonesia berjudul "Kalung Antivirus dari Kementan Bentuknya Seperti Ini" yang diunggah pada 4 Juli 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya bakal memproduksi massal kalung antivirus corona tersebut rencananya pada Agustus,

Kalung antivirus tersebut berbahan euca-

lyptus atau pohon kayu putih, yang diklaim dapat membunuh 42 persen virus corona dalam waktu 15 menit. Temuan ini langsung direspons kalangan netter, dan tagar #kalungantibego trending, dan terus dikicaukan warganet hingga pantauan terakhir pada Minggu, 5 Juli 2020. Termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Semula kalung anti-corona diungkapkan Menteri Syahrul dalam sebuah konferensi melalui video di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 3 Juli 2020.

Di video berdurasi 24 menit yang diunggah akun Youtube Kementerian Pertanian itu, awalnya Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono yang banyak berbicara. Pada beberapa detik akhir menit ke-18, seorang wartawati yang penasaran dengan benda menyerupai kartu nama yang dikalungkan di leher Menteri Syahrul Yasin Limpo bertanya benda apa yang dikalungkan di leher Menteri Syahrul.

Menteri Syahrul pun kemudian menjelaskan bahwa itu adalah kalung anti virus corona hasil pengembangan Litbang Kementan. Syahrul mengaku Kementerian Pertanian sedang mengembangkan kalung antivirus berbahan atsiri atau eucalyptus yang diklaim mampu membunuh virus influenza hingga virus corona.

"Kami yakin bulan depan (Agustus) bisa dicetak massal... kalung antivirus tersebut merupakan hasil penelitian Badan Litbang Kementerian Pertanian," kata Syahrul.

Menteri Pertanian asal Partai Nasdem ini mengatakan Balitbang Kementan telah melakukan penelaahan terhadap 700 jenis pohon kayu putih. Satu di antaranya diklaim terbukti membunuh virus corona.

Menurut dia, jika kalung ini dipakai 15 menit, keberadaannya bisa melumpuhkan 42 persen virus corona. Sedangkan bila dikenakan lebih lama, yakni 30 menit, kalung bisa mematikan 80 persen virus corona dalam tubuh.

Selain kalung, Kementerian Pertanian menciptakan produk lainnya seperti roll on. "Kalau kita berdarah, cukup dioles. Reumatik juga bisa," tuturnya.

Sedangkan Kepala Badan Litbang Pertanian Fadjry Djufray mengatakan penemuan itu disimpulkan melalui uji molecular docking dan uji in vitro di Laboratorium Balitbangtan. Ia menjelaskan, laboratorium tempat penelitian eucalyptus telah mengantongi sertifikat level keselamatan biologi atau biosafety level 3 (BSL 3) milik Balai Besar Penelitian Veteriner.

Fadjry menerangkan, kalung antivirus tersebut bukan merupakan obat oral maupun vaksin. Namun, ia mengklaim, berdasarkan penelitian, *eucalyptol* dapat berpotensi mengikat protein Mpro sehingga menghambat replikasi virus.

"Manfaat tersebut dapat terjadi karena 1,8 cineol dari *eucalyptus*-disebut *eucalyptol*-dapat berinteraksi dengan *transient receptor potential ion channel* yang terletak di saluran pernapasan," ucapnya.

Menurut Fadjry, *eucalyptus* ini pun sudah turun menurun digunakan sebagai minyak kayu putih. Adapun fungsi *eucalyptus* tersebut sebelumnya ialah untuk melegakan saluran pernapasan, menghilangkan lendir, pengusir serangga, disinfektan luka, penghilang nyeri, mengurangi mual, dan mencegah penyakit mulut.

Setelah dikembangkan, Fadjry, mengatakan minyak atsiri *eucalyptus* pun bisa menjadi antivirus terhadap virus avian influenza (flu burung) subtype H5N1, gammacoronavirus, dan betacoronavirus. "Berdasarkan hasil uji, ternyata *eucalyptus* sp. bisa membunuh 80-100 persen virus

mulai dari avian influenza hingga virus corona. Setelah hasilnya bagus, kami lanjutkan ke penggunaan nanoteknologi agar kualitas produknya lebih baik," ucapnya.

Toh Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia Ingrid Tania mengatakan kalung antivirus produksi Kementerian Pertanian yang diklaim ampuh membunuh virus Sars Cov-2 yang menyebabkan penyakit Covid-19. Musababnya, hasil penelitian ini hanya diuji secara in vitro untuk virus influenza, betacoronavirus, dan gammacoronavirus.

"Jadi belum diuji pada Covid-19. Me-



MC "Manfaat tersebut dapat terjadi karena 1,8 cineol dari *eucalyptus*-disebut *eucalyptol*-dapat berinteraksi dengan *transient receptor potential ion channel* yang terletak di saluran pernapasan," ucapnya.

mang tidak salah menyebut anti-corona. Tapi corona yang mana?" tanya Ingrid, Sabtu, 4 Juli 2020.

Untuk dapat memperoleh klaim antivirus Covid-19, kata Ingrid, Kementerian Pertanian harus menggelar uji klinis secara spesifik dengan mengisolasi atau melakukan strain terhadap virus Sars Cov-2. Dengan kondisi penderita virus corona di Tanah Air yang jumlahnya sudah mencapai lebih dari 60 ribu kasus, kata dia, semestinya tim peneliti pemerintah bisa memperoleh sampel virus tersebut antara lain menggandeng Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

Ingrid khawatir dirilisnya kalung antivirus yang membawa label anti-virus corona itu akan menyebabkan salah persepsi di kalangan masyarakat. Musababnya, bandul ini muncul saat pandemi Covid-19 merebak.

Lebih dari itu, ada yang khawatir isu kalung anti-corona ini diseret ke isu *reshuffle*. Repot amat ya? ♦

>> COVER STORY



IKHTIAR MENDAGRI DI TENGAH PANDEMI



Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai sebagai salah satu pembantu Presiden Joko Widodo yang berkinerja baik. Terutama di masa pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan dan sepak terjangnya layak diapresiasi. Oleh karena itu, di tengah gonjag-ganjing isu reshuffle yang berhembus akhir-akhir ini, Tito pun dinilai sebagai salah satu menteri yang layak untuk dipertahankan Jokowi.

Penilaian teranyar yang menyatakan bahwa mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian berkinerja baik berasal dari Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO).

Melalui survei yang bertemakan tentang Evaluasi Publik: Penanganan Pandemi Covid-19 dan Implikasi Sosiopolitik Nasional, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendapatkan penilaian sebagai menteri paling responsif dalam menghadapi pandemik virus corona baru (Covid-19).

"Menariknya, Tito Karnavian dalam survei IPO periode pertama kabinet dinilai publik sebagai menteri paling diragukan, dan terus membaik di survei 100 hari kinerja kabinet, hingga periode satu tahun kabinet semakin membuktikan jika ia berhasil meyakinkan publik," kata Dedi.

Kondisi Tito Karnavian berbanding terbalik dengan Prabowo, bahkan Erick Thohir yang di awal penunjukannya menda-

pat respon positif dan Presiden dianggap tepat memilih mereka, kini setelah satu tahun bertugas, keduanya semakin memburuk di mata publik.

Kebijakan menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dari semula September menjadi Desember 2020 menjadi salah satu indikatornya. Kebijakan Tito Karnavian terkait hal itu mendapat respon positif 34,5 persen.

Berturut mendapat penilaian *responsive* selanjutnya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama 27,0 persen, Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi 24,1 persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani 21,4 persen dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 19,7 persen.

"Munculnya Tito Karnavian sebagai menteri paling responsif sangat mungkin karena kebijakan penundaan Pilkada. Publik menilai ini tepat di masa Pandemi, tetapi menteri yang seharusnya paling sibuk saat pandemi justru mendapat penilaian tidak

baik, yaitu Menteri Sosial Juliani Batubara yang hanya dinilai 11,8 persen," tuturnya.

Keputusan penundaan Pilkada juga menempatkan Tito menjadi menteri dengan tingkat popularitas tertinggi yang mengeluarkan kebijakan bernilai positif. Ia meraih tingkat popularitas mencapai 44,6 persen yang kemudian diikuti oleh Menteri Wishnutama dengan kebijakan penutupan pariwisata dengan persentase 42,8 persen.

"Sementara Airlangga Hartarto meraih popularitas tertinggi dengan presentase 48,3 persen namun dengan kebijakannya dinilai negative. Kebijakan kartu prakerja yang dikeluarkan Airlangga tidak disukai publik dan dinilai tidak tepat," terang Dedi.

Survei yang dilakukan IPO tersebut menggunakan metode *Wellbeing Purpose Sampling (WPS)* dan digelar pada periode 8 hingga 25 Juni 2020 dengan 1.350 responden yang tersebar di 135 desa dari 30 provinsi di Indonesia dengan tingkat

akurasi data dalam rentang maksimum 97 persen.

Apresiasi lainnya terkait komitmen dan kinerja Tito, datang dari Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Ia mengapresiasi Mendagri dianggap berkomitmen membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) terkait Pilkada serentak 2020.

"Mendagri sudah menunjukkan komitmen tinggi luar bisa bersama kami untuk mengawal pelaksanaan pilkada," kata Doli dalam pembukaan rapat kerja terkait Pilkada di Gedung DPR RI, belum lama ini.

Menurut Doli, Tito sampai absen dua kali rapat terbatas kabinet dengan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri

Pujian tersebut kembali disampaikan saat Tito melakukan lawatan ke Sumatera Utara guna mengkoordinasikan pelaksanaan Pilkada 2020 dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di wilayah tersebut.

Doli mengatakan komisinya menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi di daerah. Ia menilai langkah yang digawangi Mendagri itu membuktikan keseriusan pemerintah dalam memastikan kelancaran pilkada.

"Selain Sumut, dalam seminggu ke depan Pak Mendagri akan hadir di beberapa provinsi yang lain. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan kita semua sangat serius," kata politikus Partai Golkar itu pada

Mendagri ini tidak di-*reshuffle*," kata Johan dalam pembukaan rapat kerja membahas Pilkada di Gedung DPR RI, akhir Juni lalu.

Ucapan Johan disambut tawa dan tepuk tangan sejumlah anggota Komisi II. "Soalnya saya denger akan ada *reshuffle*," tambah mantan juru bicara Presiden Jokowi di periode pertama ini.

Isu reshuffle kabinet mencuat setelah video pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat paripurna kabinet 18 Juni lalu diunggah di kanal resmi Sekretariat Presiden pada Ahad kemarin, 28 Juni.

Penilaian yang disampaikan berbagai pihak tersebut memang sulit dibantah karena semuanya relevan dengan apa



undangan Komisi II DPR. "Seperti rapat kemarin, seharusnya Mendagri jam 9.30 (hari ini) ada ratas dengan Presiden, minta izin kepada Presiden untuk hadir bersama kita membahas Perpu."

Ucapan Doli ini disambut tepuk tangan anggota Komisi II untuk Tito. Seorang anggota bahkan meminta izin untuk melakukan standing applause untuk mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu. Tito mengatupkan dua telapak tangan di depan dada merespons pujian itu.

hari ini.

Apresiasi juga datang dari Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Johan Budi Spto Pribowo. Karena komitmen dan kinerja yang baik dari Tito, ia pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak me-*reshuffle* Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Jika Komisi II menyimpulkan ada surat teguran kepada Menkumham melalui Presiden, melalui lembaga DPR tentu saja, saya usul, kita juga usul agar Pak

yang dilakukann Tito. Sebelum berbagai pihak bersuara mengenai Pilkada misalnya, Mendagri Tito justru sudah lebih dulu muncul dengan payung hukum baru untuk pelaksanaannya.

Sikap tegasnya yang tetap berkeinginan Pilkada tetap dilaksanakan pada 2020, namun waktunya diundur dari rencana pada 9 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, telah membuat hilangnya keraguan mengenai kepastian akan pelaksanaan ajang pemilihan kepala daerah

tersebut.

la menegaskan, risiko wabah Covid-19 tetap menjadi pertimbangan dan berusaha bersama-sama agar Pilkada berlangsung tanpa memperluas penyebaran Covid-19. Jadi, faktor keamanan Pilkada bukan hanya sekadar mencegah konflik antarmanusia, peserta Pilkada atau antarpending, melainkan muncul tambahan baru untuk menekan risiko wabah.

Memang pada sisi lain, dengan alasan wabah Covid-19 itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sempat menentang pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Mereka meminta agar Pilkada dilakukan pada Januari 2021.

Namun, pada akhirnya DPD tampak sulit menemukan jalan keluar alternatifnya. DPD kurang memperhitungkan

Dia juga menuturkan, saat ini hanya menjalankan tugas sebagai yang diberikan sebagai Mendagri. Tito mengatakan salah satu tugasnya sebagai Mendagri adalah mengawal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 agar berjalan jujur, adil, transparan, dan lancar.

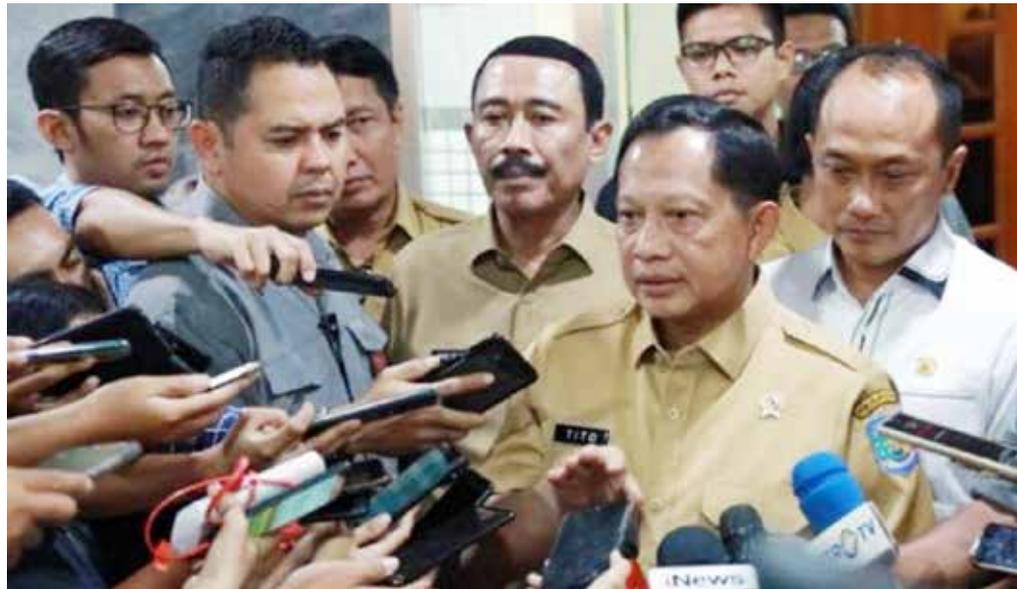
bahwa 1 Januari 2021 pun, hanya sekitar tiga pekan dari jadwal 9 Desember 2020, sudah masuk tahun anggaran baru. Apa bedanya Pilkada 9 Desember 2020 dengan, misalnya, 2 Januari 2020 kecuali soal anggarannya?

Mengenai anggaran Pilkada, justru Mendagri Tito Karnavian juga sudah mengupayakannya sejak dini. Malah ia sudah meminta pemerintah daerah yang menggelar Pilkada 2020 segera mencairkan seluruh anggaran Pilkada, mengingat tahapan-tahapan pilkada sudah mulai dilaksanakan sejak 15 Juni 2020 lalu.

“Paling lambat minggu depan harus sudah dicairkan, karena mulai 15 Juli nanti sudah mulai dilaksanakan tahapan pemutakhiran data oleh KPU di daerah masing-masing,” kata Tito usai memberikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Medan, Sumatera Utara, Jumat, 3 Juli 2020.

Sementara itu, menggapi beragam apresiasi atas kenerjanya oleh berbagai pihak, Tito Karnavian pun tidak lantas berbangga berbesar hati. Ia menilai masalah jabatan dan reshuffle merupakan urusan Allah dan hak prerogatif Jokowi.

“Kehadiran saya (di rapat Komisi II) mungkin diapresiasi teman-teman. Padahal, bagi saya memang kewajiban, dan ada yang menyampaikan dengan adanya wacana reshuffle agar saya diusulkan tidak di-reshuffle. Bagi saya secara pribadi, ya, masalah reshuffle itu adalah urusan Allah SWT dan prerogatif bapak presiden,”



kata Tito.

“Saya sangat percaya bahwa semua jabatan apa pun juga, itu adalah amanah dari Allah SWT, dan atas keputusan prerogatif presiden. Jadi kita harus hormati apa pun juga,” imbuhnya.

Tito menegaskan tidak pernah meminta anggota DPR atau berbagai pihak lainnya menyampaikan penilaian tentang dirinya. Dia mengaku kurang nyaman mengenai masalah isu reshuffle.

“Jadi, bukan tadi, kemarin ada yang menyampaikan, saya agak sedikit kurang nyaman mengenai masalah isu reshuffle. Nanti saya dikira ada pesanan dari saya, tidak. Saya sama sekali tidak pernah, apa, meminta kepada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lainnya. Se-

mata-mata mungkin spontan. Saya sebagai Mendagri hanya bekerja saja,” terang Tito.

Dia juga menuturkan, saat ini hanya menjalankan tugas sebagai yang diberikan sebagai Mendagri. Tito mengatakan salah satu tugasnya sebagai Mendagri adalah mengawal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 agar berjalan jujur, adil, transparan, dan lancar.

“Saya paham bahwa tugas saya sebagai Mendagri salah satunya adalah untuk mengawal pilkada ini bisa berlangsung secara jujur, transparan, adil, lancar, dan insyaallah dengan situasi yang baru, situasi yang luar biasa, Covid-19. Mudah-mudahan berkat kerja sama kita semua, kita akan bisa menjaga agar (Pilkada 2020) tidak menjadi media penularan Covid-19,” sebut Tito.

Sementara itu, menanggapi isu reshuffle yang berhembus akhir-akhir ini, Mensesneg Pratikno mengatakan peromba-

kan kabinet tidak seharusnya dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap Menteri Kabinet Kerja. Lantaran, teguran keras Presiden Jokowi direspons cepat oleh menteri-menteri dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik.

“Dengan progress yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus. sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus,” ucap Mensesneg Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin 6 Juli 2020.

Lantas, siapa yang mau bilang kinerja Mendagri Tito Karnavian tidak bagus? Ia sudah di depan ketika banyak menteri berada di belakang, menghadapi krisis sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. ♦





SOAL IDEOLOGI DI TENGAH WABAH CORONA

Di tengah wabah virus corona (Covid-19) muncul Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Salah satu reaksinya, massa berunjuk rasa menolaknya di depan Gedung DPR/MPR, tempat para wakil rakyat hendak membahasnya. Ada pembakaran bendera PDI Perjuangan pula.

Di Ibu Kota, Front Pembela Islam dan sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis menggelar unjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu, 24 Juni 2020. Mereka menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) usulan DPR RI.

Sejumlah peserta aksi terpantau tidak memakai masker. Padahal, aksi unjuk rasa digelar di tengah pandemi Covid-19 dan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Selain itu, sejumlah peserta aksi juga tidak menjaga jarak fisik (*physical distancing*). Aparat kepolisian sempat kewalahan mengingatkan massa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak mengingatkan massa aksi untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. "Masker jangan dibuka, tolong jaga jarak, ini kesehatan masing-masing Anda karena nantinya



Edy Mulyadi berbicara soal pembakaran bendera.

akan kembali ke rumah masing-masing,” ucap Yusuf M Martak kepada massa di lokasi unjuk rasa.

Sayangnya, saat aksi demonstrasi itu digelar sejumlah ormas Islam seperti FPI, PA 212, GNPF yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI) ternyata melibatkan anak-anak juga. Kepala Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Barat AKBP Imam Rifai mengatakan anak-anak itu ditangkap saat melintas di depan Polres Metro Jakbar dan mengaku akan menuju ke Gedung Parlemen.

“Tadi anak-anak itu jalan lewat depan kantor polisi, kita tanya mau ke mana,” kata Imam, Rabu, 24 Juni 2020. Kemudian, sambungnya,

Menurut Imam, mereka mengaku mendapat undangan aksi demo di depan Gedung DPR. Namun, saat ditanya lebih lanjut ihwal aksi tersebut, mereka tidak mengetahui maksud dan tujuan aksi itu. “Mereka dapat undangan dari medsos, tapi mereka enggak tahu tujuan dari aksi demo tersebut,” ucap Imam.

Imam menuturkan pihaknya kemudian memberikan imbauan kepada mereka untuk kembali dan tidak mengikuti aksi demo itu. “Kita beri makan siang kemudian mereka kita antar kembali ke daerah Tangerang,” ujarnya.

Tak sangka, ada insiden pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam demo di depan Gedung Parlemen itu. Terlihat dalam video

yang menggambarkan suasana demonstrasi penolakan RUU HIP di depan Kompleks MPR/DPR sejumlah demonstran membakar dua bendera, yaitu bendera berlogo palu arit dan bendera PDI Perjuangan.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah peserta aksi membakar bendera berlambang banteng itu. Mereka juga berteriak bakar PKI.

Menyikapi hal itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat merilis surat edaran menyusul pembakaran bendera partai banteng itu yang terjadi pada Rabu, 24 Juni 2020. Surat edaran dari Ketua dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto dan Bambang ‘Pacul’ Wuryanto itu ditujukan kepada seluruh pimpinan dan anggota fraksi.

Edaran dalam bentuk pesan WhatsApp tersebut dikategorikan sebagai ‘Sangat Urgent’. Isinya dikhususkan kepada seluruh pimpinan hingga anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR. “Benar, fraksi mengeluarkan surat edaran tersebut,” kata Bambang, Kamis, 25 Juni 2020.

Bambang bilang surat edaran ini dikeluarkan setelah demonstrasi penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Pancasila di depan gedung parlemen. “Ini soal kehormatan partai,” kata Bambang.

Dalam surat edaran yang dibuka dengan salam ‘merdeka’ itu, Utut dan Bambang mengatakan para demonstran dalam aksi telah secara nyata membakar bendera partai mereka. Memaknai bende-

ra sebagai lambang kehormatan, Utut dan Bambang menyebut insiden itu tantangan secara terbuka bagi seluruh jajaran kader partai.

“Sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah barisan, sebagai sebuah slagorde, kami bukan hanya tersinggung, kami marah besar!” begitu bunyi paragraf kedua surat edaran.

Meski begitu, Utut dan Bambang menyatakan seluruh kader PDIP harus sadar bahwa mereka tak bisa berbuat orang per orang. Mereka harus menunggu komando dari pimpinan partai.

“Sebagai saran sementara, siapkan barisan di level masing-masing! Begitu ada aba-aba kita bergerak serentak! Salam juang!” demikian kalimat penutup surat edaran.

Sedangkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya sangat menyesalkan aksi pembakaran itu. Sebab dinilai sebagai aksi provokasi.

“PDIP Perjuangan ini Partai Militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis, 25 Juni 2020.

Hasto menegaskan, seluruh kader PDIP di penjurua daerah saat ini tengah fokus

membantu rakyat melawan pandemi COVID-19. PDIP akan terus mendukung langkah yang dilakukan pemerintah.

"Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3.232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi COVID-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama," tegas Hasto.

Jadi, Hasto memastikan PDIP akan menempuh jalur hukum terhadap mereka yang sudah membakar bendera partai

PDI Perjuangan ini Partai Militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara.

dalam aksi tersebut. Ia juga meminta kepada kader partai tidak terprovokasi dengan peristiwa itu.

"Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," tutur Hasto.

Selain itu, terkait proses pembahasan RUU HIP, Hasto kembali menegaskan PDIP sejak awal selalu mendengarkan aspirasi mengedepankan dialog dengan masyarakat. Ia memastikan PDIP terbuka dengan koreksi dan perubahan agar sejalan dengan suasana kebatinan rakyat.

"Sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk," ujar Hasto.

"Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi

itulah yang harusnya kita kedepankan," tandasnya.

Tak urung, Koordinator Lapangan aksi itu Edy Mulyadi, sempat diperiksa di Polda Metro Jaya pada Kamis, 25 Juni 2020. Kepada penyidik, Edy memastikan pihaknya tidak pernah merencanakan aksi pembakaran bendera partai dalam rapat sebelum aksi.

"Pertama itu adalah accident. Polisi tanya, anak buah kalian yang ikut rapat Kamis itu pasti sudah laporan bahwa tidak rencana tidak ada bakar bendera. Jangankan rencana, dibahas aja enggak. Jangankan dibahas, disinggung aja enggak. Kepikir juga enggak karena buktinya tidak dising-

"Memang mic saya pegang, saya pandu saya katakan hari ini kita akan bakar bendera PKI. Massa aksi semangat, bakar-bakar," tutur dia.

"Polisi nanya sama saya: itu benderanya ada dua, Anda tahu sebelumnya? Ya nggak tahu ada bendera dua. Bahkan ada bakar bendera pun tidak ada rencana," tambah Edy.

Edy menjelaskan, komando yang dimaksud saat itu, yakni memberi ruang yang lebih luas. Agar tidak ada korban dalam pembakaran itu. Sebab, bahan untuk membakar merupakan plastik.

"Saya mengarahkan karena saya bilang, satu, satu, hati hati. Maksud saya itu



Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto

gung di rapat," kata Edy lewat keterangan-pedia, Jumat, 26 Juni 2020.

Edy menyebut aksi pembakaran tersebut di luar perencanaan. Ia mengungkapkan, saat aksi berlangsung, ada salah satu anggotanya membisikkan akan ada aksi pembakaran. Lalu melihat dua bendera, salah satunya bendera PDIP.

Menyadari adanya bendera PDIP mau dibakar, Edy tidak dapat menghentikannya. Sebab, massa sudah terbawa suasana untuk membakar bendera PDIP dan PKI saat itu. "Ada yang bisikan kepada saya itu habis Ashar. Habis ini bakar bendera PKI. Spontan saya jawab, emang ada benderanya? Ada. Ya sudah kalau gitu," ujar Edy.

Edy lalu kembali ke atas mobil komando. Mendengar adanya laporan bahwa akan membakar bendera PKI, Edy mengungkapkan hal itu lewat pengeras suara.

kan bahannya plastik supaya enggak kena tangan enggak kena tangan," jelas dia. Bahkan, kata dia, di video terdengar suaranya agar laskar memberi tempat yang luas dan peringatan agar hati-hati supaya percikannya tidak kena badan.

Lalu polisi menanyakan alasan bendera PDIP ikut dibakar. "Saya juga enggak tahu. Waktu dibawa ke situ ada berapa bendera, waktu diperiksa ada dua, waktu dibenteng wah ada bendera PDIP, saya juga kaget," ujar dia.

Edy sempat ditanya polisi mengapa tidak menghentikan aksi pembakaran bendera PDIP. Edy merasa tidak mungkin dalam suasana itu melarang massa membakar bendera PDIP.

"Saya bilang gila, dalam suasana begitu, eh yang PDIP jangan dibakar jangan dibakar, enggak mungkin bos," ujarnya.

♦ARY/WRN



UNJUK RASA MENOLAK RUU HIP DI BERBAGAI DAERAH

Tak hanya di Ibu Kota, unjuk rasa menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila di DPR RI berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Di Kalimantan ada juga.

Salah satu unjuk rasa menolak RUU HIP datang dari warga Solo, Jawa Tengah. Di sana, massa ormas Islam menggelar aksi di bundaran Gladag, Jalan Slamet Riyadi, Solo, pada Minggu, 14 Juni 2020.

Humas aksi, Endro Sudarsono, mengatakan penolakan dilakukan sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengkritik RUU HIP. Salah satu alasannya ialah kekhawatiran munculnya kembali komunisme di Indonesia.

"Karena dalam RUU HIP tidak mencantumkan Tap MPRS nomor XXV/MPRS/1966 yang isinya larangan terhadap komunisme, leninisme, marxisme. Kami khawatir ini akan memunculkan komunisme," kata Endro di sela aksi.

MC *Humas aksi, Endro Sudarsono, mengatakan penolakan dilakukan sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengkritik RUU HIP. Salah satu alasannya ialah kekhawatiran munculnya kembali komunisme di Indonesia.*

Selain itu, penolakan dilakukan terhadap pasal yang ada di dalam RUU HIP. Ada sebuah pasal yang menuliskan Ketuhanan yang Berkebudayaan.

"Ada pasal yang seharusnya Ketuhanan yang Maha Esa tapi di situ disebut Ketuhanan yang Berkebudayaan. Padahal Ketuhanan yang Maha Esa melekat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945," kata dia.

Dalam aksi tersebut, berlangsung pula pembakaran bendera PKI di depan mobil komando. Hal ini menyimbolkan penolakan mereka terhadap komunisme.

Meski begitu, massa pendemo rata-rata telah menggunakan masker. Namun mereka tak mengindahkan imbauan untuk jaga jarak meski telah disampaikan

panitia. Bahkan anak-anak terlihat juga mengikuti aksi.

Seperti tak mau ketinggalan, sekitar lima ratusan orang yang terdiri dari tokoh agama, ulama dan ormas Islam di Cianjur, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Cianjur, menolak RUU HIP untuk dihapuskan bukan hanya ditolak, Rabu, 24 Juni 2020.

Anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Gerindra Abdul Karim mengatakan, Fraksi Gerindra sepakat untuk ikut menolak disahkannya RUU HIP dan akan melayangkan surat ke DPR RI agar RUU tersebut dihapuskan, sekaligus menyampaikan aspirasi warga Cianjur yang sama-sama menolak keberadaan RUU tersebut.

"Kami sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPRD Cianjur, sepakat untuk menolak RUU tersebut dan surat ke DPR RI segera dilayangkan disertai bukti penolakan yang sama dari berbagai kalangan di Cianjur," katanya, usai menerima pengunjuk rasa di ruang pertemuan DPRD Cianjur.

"Kami meminta pembahasan RUU HIP dihentikan dan dihapuskan secara permanen, karena berbagai pertimbangan salah satunya dalam segi bahasa dinilai rancu serta dianggap berbau komunis yang bisa membuka luka lama kaum ulama," kata peserta aksi dari Dewan Pertimbangan MUI Cianjur Cepi Jauharudin.

Bahkan, pihaknya mendesak DPRD Cianjur untuk mengusut dan memproses hukum inisiator dan konseptor RUU HIP

MC Anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Gerindra Abdul Karim mengatakan, Fraksi Gerindra sepakat untuk ikut menolak disahkannya RUU HIP dan akan melayangkan surat ke DPR RI agar RUU tersebut dihapuskan, sekaligus menyampaikan aspirasi warga Cianjur yang sama-sama menolak keberadaan RUU tersebut.

serta menyatakan dukungan penuh Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Penolakan RUU HIP.

Tokoh agama dan ulama Cianjur yang ikut dalam aksi tersebut, menolak kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh yang kritis terhadap pemerintah, sehingga RUU tersebut dinilai akan mengebiri kebebasan warga dalam menyampaikan kritikan terhadap pemerintah.

"Kami bersama MUI Jabar sudah jelas meminta RUU HIP untuk dihapus bukan hanya ditolak. Jika tuntutan kami tidak didengar, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar pada 6 Juli," kata Cepi pula.

Penolakan RUU HIP juga datang dari Sragen, Jawa Tengah. Ratusan masa

dari berbagai elemen Islam yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sragen Anti Komunis, menggelar aksi demo di Alun-alun dan depan Pemkab, Jumat, 26 Juni 2020.

Aksi demonstrasi berlangsung sesuai sholat Jumat dan diikuti ratusan umat muslim dari berbagai elemen. Aksi yang diinisiasi oleh Forum Umat Islam Sragen (FUIS) itu berlangsung dengan tema utama menolak Ran-



cangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila.

Sejumlah elemen dari berbagai ormas mengerahkan anggotanya seperti Muhammadiyah - Dewan Dakwah Indonesia - Hasbi - FPI - Aliansi Masyarakat Sragen Anti KomunIS dan elemen kelaskaran.

Massa mendengarkan orasi silih berganti dari berbagai perwakilan. Orasi dilakukan dari atas mobil komando dengan pengeras suara yang diarahkan ke alun-alun dan jalan raya Sukowati.

"Kami siap membela NKRI, kalau DPR RI dan pemerintah nekat mengesahkan RUU HIP, kami bisa lebih nekat. Kami siap kepeng DPRD, DPRD Provinsi dan DPR RI. Semua siap berangkat ke Jakarta dan kita tidak akan mundur. Siap menjaga Pancasila dan NKRI. Kalau pemerintah dan DPR RI mencoba mengotak-atik Pancasila, kami siap berjuang berdarah-darah," ujarnya saat berorasi.

Kemudian, perwakilan Muhammadiyah Sragen, Dodok Sartono dalam orasinya menyampaikan Muhammadiyah Sragen menegaskan sikap mendukung Majelis Ulama Indonesia untuk menghentikan RUU HIP.

Dikatakan Dodok, RUU HIP disebut telah mengingkari jalannya sejarah negara, dengan Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bersama. "Mereka ingin mengingkari sejarah, bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah atas pengorbanan para syuhada," ujar Dodok Sartono.

Masih dari Jawa Tengah, penolakan lainnya juga datang dari Kota Tegal. Dikabarkan, sejumlah Ormas gabungan dari Pemuda Pancasila, Pemuda Muhammadiyah, FKPP, FPI Tegal Raya, Kokam Muhammadiyah, Barisan Emak-Emak Relawan 212, Srikandi PP, Gerakan Pemuda Kabah, Mujahid 212, Pemuda Demokrat Indonesia, Brigade 08 Kota dan Kabupaten Tegal dan Bikers Subuhan Tegal Raya, menggelar aksi demo menolak RUU HIP, di kawasan Jalan Pancasila Kota Tegal, Kami siang, 2 Juli 2020.

Sedianya massa akan melakukan long-march ke Gedung DPRD Jalan Pemuda Kota Tegal, namun tidak mendapatkan izin. Sehingga para pendemo hanya menggelar aksi orasi di kawasan Jalan Pancasila.

Ustadz Zaenal dari FPI Tegal Raya dalam orasinya mengatakan, ada upaya pihak yang akan mengganti lambang negara kita. Bahkan akan mengganti pedoman hidup NKRI.

Namun, menurut Ustadz Zaenal, upaya itu mendapat penolakan dari NU, Muhammadiyah, FPI dan didukung oleh ormas



MC

"Komunis gaya baru masuk secara perlahan dan memecah belah antar ormas. Itu harus kita waspadai jangan sampai yang ada di Kota Tegal terpecah belah. Pancasila hanya ada satu, tidak boleh ada dasar lainnya," tegas Soni.

lainnya di Kota Tegal. "Gara-gara komunis, tempat maksiat dan minuman keras mera-jalela. Kita sudah punya datanya di Kota Tegal tinggal tunggu waktu aksi. RUU HIP kita tolak karena MUI sudah menolak. MUI merupakan majelis tertinggi, maka tidak perlu ditawar lagi. Harus dilakukan penolakan terhadap RUU tersebut," kata Ustadz Zaenal.

Perwakilan dari FKPP, Soni Sontani, menyebutkan, menolak keras RUU HIP. Pihaknya akan menjaga Pancasila dan NKRI sampai darah penghabisan.

"Komunis gaya baru masuk secara perlahan dan memecah belah antar ormas. Itu harus kita waspadai jangan sampai yang ada di Kota Tegal terpecah belah. Pancasila hanya ada satu, tidak boleh ada dasar lainnya," tegas Soni.

Ketua DPC PPP Kota Tegal, H Ilyas, menyampaikan, akan memperjuangkan agar RUU HIP dicabut dan masuk di Pro-legnas untuk dibahas.

"RUU HIP tidak memasukan TAP MPRS



tentang larangan PKI dan akan merubah Pancasila menjadi Trisila dan Eka Sila. Ketuhanan Yang Maha Esa akan dihapus, berarti anti Tuhan. Kalau anti Tuhan berarti komunis dan kafir," ujar Ilyas.

Korlap aksi H Firdaus Muktadi menyatakan, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi apabila akan membuat undang-undang harus mendasari Pancasila karena kedudukannya paling tinggi. Namun, saat ini ada upaya untuk merubah kedudukan Pancasila di bawah Undang-undang.

"Sampai di manapun kami Pemuda Pancasila akan mencari kader-kader komunis sampai dimanapun," tegas Firdaus.

Aksi demo sempat diwarnai pembakaran bendera PKI oleh massa pendemo. Aksi demo ditutup dengan pembacaan puisi dan doa serta penandatanganan pernyataan sikap ormas bersama yang akan diserahkan ke DPRD Kota Tegal.

Selain itu, penolakan juga datang dari berbagai ormas Islam di DI Yogyakarta.

MC Aksi demo sempat diwarnai pembakaran bendera PKI oleh massa pendemo. Aksi demo ditutup dengan pembacaan puisi dan doa serta penandatanganan pernyataan sikap ormas bersama yang akan diserahkan ke DPRD Kota Tegal.

Aksi digelar di Titik Nol kilometer Yogyakarta, Sabtu (20/6/2020).

Mereka menolak RUU HIP sebab dinilai ada upaya bangkitnya kembali paham komunisme dan mendistorsi kemurnian Pancasila yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945. "JIHAD MELAWAN KOMUNIS! TOLAK DAN BATALKAN RUU HIP", demikian salah satu isi spanduk yang dibentangkan massa aksi.

Ketua Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Syukri Fadholi dalam orasinya mengatakan umat Islam di DIY sudah sepakat untuk menolak RUU HIP. Sebab Pancasila merupakan dasar kehidupan bangsa dan negara yang sudah final, tak boleh lagi diotak-atik. Siapapun yang mencoba mengotak-atik maka tidak bisa dibiarkan.

"Kami sudah bicara pada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), semua sepakat menolak RUU HIP yang dibahas di DPR," tandasnya.

Menurutnya pasal-pasal dalam RUU HIP bertentangan dengan UUD 1945 sekaligus berpeluang menumbuhkan paham komunisme serta mereduksi Pancasila. Sehingga justru membuat tafsir terhadap Pancasila dan negara baru. Seperti pasal 7, Pancasila akan direduksi dijadikan trisila lalu ekasila yang bertentangan dengan dasar negara.

Sila pertama bahkan diubah menjadi Ketuhanan yang berkebudayaan. "Jadi RUU HIP ini merupakan upaya mengubah dasar negara kita Pancasila. Dari Jogja kita minta agar DPR segera mencabut RUU ini," tegasnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan Ustad M Jazir. Ia menegaskan jika ideologi Pancasila sudah final. Tak bisa ditawar lagi. "Kami di sini siap berperang melawan segala paham komunisme. Siapa saja yang merongrong keberadaan Pancasila," tandasnya.

Di Kalimantan pun terjadi penolakan terhadap RUU HIP. Ratusan masa dari berbagai elemen mendatangi Kantor DPRD Kalimantan Barat menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang saat ini sedang digodok di DPR RI.

"Kami dari para ulama dan berbagai elemen masyarakat mendesak agar anggota DPRD Kalbar untuk ikut menyuarakan agar membatalkan RUU HIP, karena RUU itu jelas berbau komunis yang tidak layak dan dilarang hidup di seluruh wilayah Kalbar dan Indonesia umumnya," kata koordinator aksi, Habib Ridho Almuthahar, di Pontianak, Jumat, 26 Juni 2020. ♦ ARY



POLITIK BAKAR BENDERA

Bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terbakar bersamaan dengan bendera bergambar palu arit lambang komunis dalam unjuk rasa Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) di depan Gedung MPR/DPR. Suhu politik nasional langsung meningkat menyaingi wabah Covid-19 yang menyebar ke berbagai daerah.

Kentara sekali Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berang atas insiden pembakaran bendera itu. Sehari setelah insiden di depan Gedung Parlemen itu, Kamis, 25 Juni 2020, keluar perintah harian Ketua Umum PDIP:

Merdeka!!!

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927.

PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memerjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi di kuyo-kuyo, dipecah-belah, dan puncaknya penyerangan kantor Partai pada tanggal 27 Juli 1996.

Meskipun demikian dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi Partai untuk Rakyat, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa.

Terus rapatkan barisan!

Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat,

karena rakyatlah cakrawati Partai.

Sekali Merdeka Tetap Merdeka!

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!

**Bendera selalu tegak!! Seluruh kader siap*

menjaganya!!!*

"Terus rapatkan barisan! Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati Partai."

(Dikutip dari salinan surat perintah harian yang ditanda tangani Megawati, Kamis 25 Juni 2020).

Jadi, jalur hukum akan menjadi pilihan. Namun implikasi politisnya, Presiden Joko Widodo akan menghadapi masalah tambahan di tengah kerepotan menghadapi wabah Corona yang grafik penularannya belum menunjukkan tanda-tanda melandai pada awal Juli 2020 sebagaimana harapan sebelumnya. Tambahan masalah itu adalah suhu politik yang menghangat antara kelompok Islam politik dan PDIP sementara persoalan ekonomi yang terdampak wabah Covid-19 semakin rumit.

Dalam hal ini, pengamat politik Karyono Wibowo berpendapat, perintah harian itu semestinya menjadi pedoman bagi seluruh kader agar tak ada letupan di akar rumput. Ia berharap PDIP konsisten dengan keputusannya untuk menempuh jalur hukum dan mengedepankan persatuan nasional. "Jika sikapnya berlebihan apalagi memanaskan suasana itu tidak tepat," kata dia.

Karyono menilai langkah yang diambil pimpinan partai berlambang banteng ini menunjukkan bahwa pejabat teras PDIP sebenarnya sudah mencium upaya provokasi untuk membenturkan PDIP dengan kelompok Islam. Karyono mengaku heran, demo menolak RUU HIP disertai pembakaran bendera PKI sebagai partai terlarang, mesti diikuti pembakaran bendera PDIP pada saat yang sama.

"Padahal awalnya demo ini tuntutan-

nya adalah menolak RUU HIP dan menuntut agar RUU HIP dicabut. Lantas apa korelasinya antara menolak RUU HIP dengan membakar bendera PKI dan PDIP. Di sinilah yang perlu diurai apa motivasinya," kata dia.

Dia juga membuka kemungkinan adanya kepentingan politik dengan membentuk opini bahwa RUU HIP sebagai isu bangkitnya komunisme. Menurut dia, sejak awal munculnya penolakan RUU HIP, PDIP tampaknya menjadi sasaran tembak. Apalagi partai berkuasa ini juga berperan sebagai pengusul RUU tersebut.

"Berbagai wacana miring diarahkan ke partai berlambang banteng moncong putih itu. Salah satu isu yang cenderung politis adalah mengaitkan RUU HIP dengan isu bangkitnya komunisme," jelas Karyono.

Lebih dari itu, wartawan senior John Macbeth yang menulis di Asia Times menilai rangkaian insiden pembakaran bendera ini adalah pembukaan kampanye pemilihan presiden 2024 yang mulai membentuk kristalisasi koalisi yang akan saling berhadapan. Pandangan Macbeth terkait dengan nasib RUU HIP ke depannya.

Meskipun pada awalnya menerima dukungan dari sebagian besar dari sepuluh partai politik di parlemen, gelombang oposisi, yang dipimpin oleh organisasi massa Muslim moderat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menimbulkan desakan agar DPR menunda pembahasan RUU HIP. Kita lihat nanti bagaimana. ♦



MC *"Berbagai wacana miring diarahkan ke partai berlambang banteng moncong putih itu. Salah satu isu yang cenderung politis adalah mengaitkan RUU HIP dengan isu bangkitnya komunisme," jelas Karyono.*





ERICK MAU LEBUR BANK SYARIAH, BISAKAH?

Bank-bank Syariah yang mayoritas sahamnya milik negara akan merger. Sudah menjadi wacana sejak beberapa tahun lalu sebenarnya. Tapi, kali ini Menteri BUMN sudah punya jadwal: Februari 2021.

Setelah beberapa tahun menjadi wacana, penggabungan (*merger*) bank syariah yang berafiliasi dengan Himbara (Himpunan Bank Negara) semakin mendekati kenyataan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohor malah sudah menyebut waktu penuntasannya pada awal tahun depan.

"Kita sedang kaji bank-bank syariah kita ini jadi satu semua, kita coba *merger*. Insya Allah Februari tahun depan jadi satu bank syariah," ujar Erick dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Kingdom Business Community pada Kamis, 2 Juli 2020.

Lebih jauh Erick menjelaskan tujuan merger ini adalah agar Indonesia sebagai bangsa dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki fasilitas layanan perbankan syariah yang maksimal. Dengan begitu, keberadaan bank syariah

memberikan opsi pilihan bagi masyarakat atau dunia usaha.

"Kenapa saya menginginkan *merger* syariah? Supaya ada alternatif, supaya jangan sampai Indonesia yang penduduk muslim terbesar tidak punya fasilitas itu," ucap Erick.

Jadi ini adalah persoalan skala usaha. Erick berharap aksi merger bank-bank syariah BUMN menjadi satu membuat Indonesia memiliki satu bank syariah yang unggul dan menjadi pilihan dalam hal pendanaan.

"Yang namanya *funding*, terbuka. Ini yang kita coba lakukan segmentasi yang ada di Himbara supaya tidak kanibal dan memperkaya pada marketnya. Kita mesti buka itu karena pendanaan macam-macam, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang syariah, kita mesti *welcome* semuanya," ungkap Erick.

Adapun bank-bank syariah yang rencananya akan dimerges adalah PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah. Mandiri Syariah memiliki fokus di segmen kredit korporasi, sedangkan BRI Syariah memiliki fokus pada penyaluran pembiayaan di segmen UMKM.

Kemudian BNI Syariah fokus ke consumer banking menysasar milenial dan international funding karena induknya yakni BNI memiliki sejumlah cabang di luar negeri. Sepanjang kuartal I tahun 2020, kinerja tiga bank tersebut tercatat kokoh dalam menghadapi kondisi krisis pandemi Covid-19.

BRI Syariah mengalami peningkatan pembiayaan di segmen ritel yang tumbuh 49,74 persen menjadi Rp 20,5 triliun. Sedangkan BNI Syariah yang baru saja menjadi Bank BUKU III pada kuartal pertama tahun ini berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih 58,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 214 miliar. Mandiri Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp 368 miliar pada kuartal I 2020, naik 51,53 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy).

Rencana merger ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah aset perbankan syariah. Dari keempat anggota Himbara, tiga diantaranya memiliki anak usaha syariah berstatus bank umum syariah (BUS). Sisanya, yakni BTN mengembangkan perbankan syariah melalui unit usaha syariah (UUS).

Dari ketiga BUS Himbara, aset terbesar dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri, kemudian diikuti PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah Tbk. Bank Syariah Mandiri membukukan aset senilai Rp 114,75 triliun pada kuartal I/2020 atau naik 16,43 persen dari Maret 2019 yang sebesar Rp 98,55 triliun. Mandiri Syariah juga membukukan laba bersih senilai Rp 368 miliar atau naik 51,53 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sampai dengan Maret 2020 dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun Mandiri Syariah tumbuh 16,94 persen dari Rp 87,16 triliun per Maret 2019 menjadi Rp101,92 triliun pada Maret 2020. Hingga Maret 2020, Mandiri Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 75,7 triliun, tumbuh 9,14 persen dari Maret 2019 yang sebesar Rp 69,36 triliun.

Kedua, PT Bank BNI Syariah membukukan aset pada kuartal I/2020 senilai Rp 51,12 triliun atau tumbuh 16,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada periode tersebut, BNI Syariah juga membukukan laba bersih senilai Rp 214 miliar pada kuartal I/2020, atau naik 58,1 persen (yoy). Dana pihak ketiga (DPK) menjadi kontributor pertumbuhan tersebut, yaitu meningkat 16,6 persen (yoy) menjadi Rp 44,85 triliun pada kuartal I/2020. Sementara itu, pembiayaan perseroan mengalami pertumbuhan 9,8 persen (yoy), dari Rp 29,44 triliun pada kuartal I/2019 menjadi

Rp 32,32 triliun pada kuartal I/2020.

Ketiga, PT Bank BRI Syariah Tbk. membukukan aset senilai Rp 42,2 triliun pada kuartal I/2020 atau naik 9,51 persen (yoy). Perseroan juga membukukan laba bersih senilai Rp 75,15 miliar pada kuartal I/2020, naik sebesar 150 persen (yoy). Pada kuartal I/2020, total pembiayaan yang disalurkan BRI Syariah adalah senilai Rp 30,45 triliun dan total dana murah yang berhasil dihimpun menjadi sebesar Rp 16,86 triliun.

Keempat, Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan (Persero) Tbk. membukukan aset senilai Rp 28,79 triliun atau tumbuh 3,4 persen (yoy). Pada kuartal I/2020, UUS BTN juga memperoleh laba senilai Rp 86,55 miliar atau tumbuh 185,77 persen (yoy).

Sementara itu, pada kuartal I/2020, UUS BTN berhasil menghimpun simpanan senilai Rp 20,93 triliun atau turun 3,39 persen (yoy) dan menyalurkan pembiayaan senilai Rp 23,92 triliun atau naik 6,59 persen (yoy).

Apabila ketiga BUS tersebut melakukan merger, maka total aset perbankan syariah milik Himbara akan menjadi Rp 208,07 triliun. Sementara itu, jika digabungkan dengan UUS BTN, total aset akan menjadi Rp 236,86 triliun. Nilai aset ini pun berpotensi lebih tinggi karena penerapan qanun di Aceh yang akan mendorong konversi bank umum konvensional menjadi berbasis syariah.

Untuk perbankan syariah milik negara, maupun perusahaan sejenis, persoalannya tinggal landasan hukum karena pemegang sahamnya adalah pemerintah. Untuk soal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait penggabungan dan penutupan perusahaan BUMN pada 19 Mei 2020.

Nantinya, perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut akan mengalami konsolidasi, merger, rasionalisasi hingga penutupan agar kinerja BUMN secara menyeluruh bisa lebih efektif. Rencana penggabungan dan konsolidasi perusahaan ini adalah langkah Erick untuk merestrukturisasi BUMN yang sudah mejadi rencana kerjanya sebagai Menteri.

Untuk perbankan tinggal koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas. Juga dengan Kementerian Keuangan.

Bagaimana dengan realisasi? Kita tunggu tahun depan. Erick bilang Februari 2021. ♦



MC *Sampai dengan Maret 2020 dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun Mandiri Syariah tumbuh 16,94 persen dari Rp 87,16 triliun per Maret 2019 menjadi Rp101,92 triliun pada Maret 2020. Hingga Maret 2020, Mandiri Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 75,7 triliun, tumbuh 9,14 persen dari Maret 2019 yang sebesar Rp 69,36 triliun.*

MASLAHAT DAN MUDARAT MERGER BANK SYARIAH

Merger bank-bank BUMN syariah sudah di depan mata. Bagaimana dengan masalah dan mudaratnya?

Lewat semalam setelah Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencana merger bank syariah anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), harga saham PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) langsung melesat pada perdagangan Jumat pagi, 3 Juli 2020. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham BRIS melesat 3,92 persen menjadi Rp 318 per saham. Sedangkan nilai transaksinya mencapai Rp 8,44 miliar.

Dalam tiga bulan terakhir harga saham BRIS tercatat menguat signifikan 134 persen. Sedangkan kinerja keuangan perseroan pada kuartal I-2020 cukup meng-

sankan dengan laba bersih tumbuh 150 persen menjadi Rp75,15 miliar. Pertumbuhan pembiayaan BRIS pada periode yang sama juga melesat 34,28% menjadi Rp30,45 triliun, sedangkan pertumbuhan dana murah naik 77,51 persen secara tahunan menjadi Rp16,86 triliun.

Entah apakah kecenderungan ini akan bertahan hingga proses merger bank-bank syariah tadi terealisasi. Yang pasti, Corporate Secretary PT Bank BRI Syariah Tbk Mulyatno Rachmanto mendukung kebijakan tersebut. Terlebih lagi, menurut dia, merger merupakan upaya pemerintah memperkuat bank BUMN.

"Sebagai perusahaan anak BUMN, kami akan selalu mendukung kebijakan pemerintah. Tujuan Pak Menteri ingin memperkuat BUMN yang sudah menjadi program. Jadi, kami ikuti saja," kata Mulyatno Jumat, 3 Juli 2020.

Menurut dia, sejauh ini BRI Syariah tetap menjalankan program kerjanya men-



jadi bank ritel terkemuka dengan ragam layanan finansial. Tujuannya untuk memberikan layanan perbankan yang cepat, mudah dan murah kepada nasabah.

Sedangkan Direktur Finance, Planning, & Treasury PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya tidak akan buru-buru konversi unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) untuk merger dengan bank BUMN lain. Pasalnya, BTN tengah fokus melaksanakan restrukturisasi kredit bagi nasabah terdampak Covid-19.

Sebelum ikut dalam merger bank BUMN syariah, BTN memang harus spin off anak usaha menjadi bank umum syariah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), spin off bisa dilaksanakan paling lama pada 2023.

"Spin off kan masih punya waktu sampai 2023 sesuai POJK. Termasuk yang unit syariah," ujar Nixon.

Di mata pengamat Ekonomi Syariah Universitas Indonesia Yusuf Wibisono, merger bank BUMN syariah merupakan kebijakan memiliki kemungkinan masalah (baik atau positif) dan mudarat (buruk atau negatif). Masalahnya, kata dia, skala usaha bank BUMN syariah berpotensi meningkat, yang umumnya bank BUKU II menjadi bank BUKU III atau bahkan bank BUKU IV.

Dengan begitu, ekspansi bisnis bank BUMN syariah dapat lebih leluasa, produk dan layanan yang ditawarkan lebih lengkap, efisiensi operasional meningkat, serta dapat menyentuh segmen konsumen yang lebih banyak dan luas. "Rata-rata bank syariah berstatus bank BUKU II karena lemahnya permodalan. Sehingga ekspansi bisnis sulit, produk terbatas, efisiensi rendah, ceruk konsumen sedikit," ujar Yusuf.

Pada sisi ini, kata Yusuf, terbuka peluang Indonesia menjadi pemimpin dalam industri perbankan syariah. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, anggota G-20, serta anggota Regional Islamic Finance Hub.

Selain itu, perbankan syariah secara model bisnis lebih ramah kepada sektor riil dan UMKM. Sehingga bisa membantu Indonesia keluar dari middle income trap.

"Namun dari pengalaman empiris, merger jarang berhasil kecuali dilandasi oleh kesamaan visi-misi yang sangat kuat antar entitas yang akan bergabung. Merger juga membutuhkan usaha, biaya dan waktu yang tidak sedikit, jika tidak bisa dikatakan masif," katanya mengenai potensi mudarat merger bank BUMN syariah.

Oleh sebab itu, dia menyebut opsi akui-

sis lebih pas dilaksanakan untuk menggabungkan bank BUMN syariah. Opsi tersebut dapat dilaksanakan jika pemerintah menyuntikan modal ke salah satu bank BUMN syariah. Bank tersebut nantinya bisa mengakuisisi bank lainnya.

"Misalnya dana disuntikan ke bank yang terbesar yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian, BSM mengakuisisi tiga bank BUMN syariah lainnya yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan BTN Syariah," ujarnya.

Selain opsi tersebut, Yusuf menyebut



MC *Sampai dengan Maret 2020 dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun Mandiri Syariah tumbuh 16,94 persen dari Rp 87,16 triliun per Maret 2019 menjadi Rp101,92 triliun pada Maret 2020. Hingga Maret 2020, Mandiri Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 75,7 triliun, tumbuh 9,14 persen dari Maret 2019 yang sebesar Rp 69,36 triliun.*

pemerintah bisa membiarkan empat bank BUMN syariah berjalan seperti saat ini. Namun, induk usahanya diwajibkan meningkatkan permodalan secara signifikan. "Minimal menjadi bank BUKU III, lebih baik lagi jika bisa jadi bank BUKU IV," ujarnya.

Dari sisi teoritis masalah dan mudarat merger ataupun akuisisi perbankan memang luas. Mudaratnya, antara lain ketidakpastian nasib komisaris, direksi dan karyawan; proses merger perbankan di Indonesia biasanya diikuti dengan pengurangan jumlah pegawai dan staf kurang profesional bank hasil merger; kegiatan merger dalam dua tahun pertama cenderung diikuti dengan strategi efisiensi sehingga hal ini akan mengurangi semangat dan kreativitas dari sebagian pihak direksi dan staf profesional; juga nenturan budaya perusahaan tidak dapat dielakkan sehingga perusahaan hasil merger akan mengalami penurunan dalam jangka pendek.

Masalahnya, tak perlu disebutkan lagi. Alhasil, kita lihat saja realisasinya. Februari 2021 nanti. ♦



Silvia Constanza Romano

MEMELUK ISLAM SAAT DICULIK TERORIS ISLAMIS AFRIKA

Saat itu, tepatnya pada Minggu, 10 Mei 2020, seorang wanita cantik berkulit putih terlihat tersenyum ketika menuruni tangga pesawat di bandara Roma, Italia. Dia pun langsung memeluk keluarganya setelah 18 bulan ditahan di tangan kelompok teroris Islamis Afrika.

Dia adalah Silvia Constanza Romano, seorang pekerja sosial berkebangsaan Italia, yang diculik dari kota pesisir tenggara Chakama, Kenya, di wilayah Afrika Timur pada November 2018 saat bertugas sebagai sukarelawan dari organisasi bantuan sosial 'Africa Milele'

Diculik Teroris

Pada bulan November 2018, Silvia di-

tangkap oleh enam pria bersenjata dari Kilifi, sebuah komunitas pesisir. Lima orang terluka oleh orang-orang bersenjata itu, termasuk anak-anak.

Saat itu, tidak ada klaim yang bertanggung jawab atas penculikan itu, yang pertama melibatkan orang asing di Kenya dalam beberapa tahun.

Laporan berita Italia mengatakan, bahwa para penculik itu kemudian menyerahkan Silvia ke tangan para militan yang terkait dengan kelompok Islam al-Shabab di Somalia. Al-Shabab dipersalahkan atas serangkaian penculikan orang asing di sepanjang pantai Kenya.

Polisi Kenya telah mengidentifikasi tiga tersangka dari enam pria yang menculik Silvia, dan menawarkan hadiah satu juta shilling (Rp 136,5 juta) untuk informasi yang mengarah pada penangkapan mereka.

Silvia Costanza Romano, ditangkap

oleh enam pria bersenjata pada hari Rabu dari Kilifi, sebuah komunitas pesisir. Lima orang terluka oleh orang-orang bersenjata itu, termasuk anak-anak.

Polisi mengatakan, bahwa mereka optimis para pekerja bantuan social itu akan ditemukan 'dalam waktu sesingkat mungkin'.

Silvia Romano adalah sukarelawan di 'Afrika Milele Onlus', sebuah LSM yang beroperasi di daerah tersebut.

Badan Kepolisian Nasional Kenya memposting di halaman Twitter resminya foto tiga tersangka yang diduga penculik Silvia. Mereka diidentifikasi sebagai Ibrahim Adan Omar, Yusuf Kuno Adan dan Said Adan Abdi.

Dalam sebuah pernyataan, Inspektur Jenderal Joseph K Boinnet mengatakan, bahwa dua sepeda motor yang diduga telah digunakan sebagai alat untuk menculik ditemukan oleh petugas polisi.

"Sementara itu, tim multi-agensi berkumpul untuk menyelamatkan wanita itu (Silvia Romano) melakukan semua yang mereka bisa untuk menyelamatkannya dan menangkap para penculik, untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka sesuai dengan hukum," kata Boinnet.

Serangan penculikan seperti itu, sebenarnya sudah jarang terjadi setelah 2011, ketika Kenya mengerahkan pasukan ke Somalia yang berdekatan, dalam upaya untuk menghentikan kelompok bersenjata al-Shabab dari penculikan terhadap orang asing.

Masuk Islam Saat Diculik

Dalam tahanan penculik, Silvia bercerita, bahwa musibah penculikan yang menimpanya telah menjadi pembuka jalan hidayah baginya. Alih-alih trauma atau dendam kepada sang penculik, wanita berusia 25 tahun itu malah bersyukur.

Sebab selama dalam penculikan, Silvia telah diperlakukan dengan baik oleh para penculiknya. Itulah salah satu alasan, yang akhirnya membuat Silvia mantap untuk menjadi mualaf.

"Para penculik itu meyakinkan saya, kalau saya tidak akan dibunuh dan memang begitu faktanya. Mereka tidak berbohong," kata Silvia pada kantor berita Italia, ANSA.

Silvia menambahkan, bahwa para penculik itu pun menjelaskan padanya alasan mengapa mereka menculik, dan juga

menjelaskan tentang budaya mereka. Lalu apakah mereka memaksa Silvia untuk memeluk Islam?

"Tidak, keinginan itu (masuk Islam) datang secara spontan. Para penculik itu memberi saya Al-Quran dan mengajarkan saya bahasa Arab. Jujur, saya berterima kasih atas apa yang penculik itu lakukan pada saya," kata Silvia jujur.

Terkait dengan keputusan menjadi mualaf, Silvia dengan tegas mengatakan, bahwa itu adalah pilihannya sendiri tanpa paksaan siapapun. Juga tidak ada hubungan pernikahan atau pun yang lainnya. Murni karena memang hatinya tergerak ingin memeluk Islam.

MC *Badan Kepolisian Nasional Kenya memposting di halaman Twitter resminya foto tiga tersangka yang diduga penculik Silvia. Mereka diidentifikasi sebagai Ibrahim Adan Omar, Yusuf Kuno Adan dan Said Adan Abdi.*





“Tidak ada pernikahan atau hubungan lain, hanya rasa hormat,” tambah Silvia.

Upaya Pembebasan

Menurut laporan, Silvia dibebaskan setelah melalui upaya bersama antara badan intelijen Turki, Somalia, dan Italia.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Italia, Marina Sereni membenarkan jika telah menjalin kerjasama dengan Turki untuk melakukan operasi penyelamatan Silvia Romano.

“Telah ada kerja sama dengan dinas in-

MC Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte dan Menteri Luar Negeri Italia, Luigi Di Maio juga berada di landasan untuk menyambut pekerja sosial berusia 25 tahun itu. Lonceng Gereja berdering di kota asalnya, Milan ketika pembebasannya memicu perayaan di suatu negara yang sangat membutuhkan kabar baik, setelah berbulan-bulan kesengsaraan melanda Negara itu akibat pandemi virus korona.

telijen Turki untuk menemukan Silvia dan mengambil tindakan pada waktu yang tepat,” katanya pada TV LA7.

Silvia ditemukan di Somalia, sekitar 30 kilometer (19 mil) di luar ibukota Mogadishu, dan dia dibebaskan berkat upaya oleh badan intelijen eksternal, kata Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio.

Kemudian Silvia dibawa ke Kedutaan Besar Italia di Mogadishu. Sebelum akhirnya diterbangkan ke rumahnya di Italia setelah diculik selama 18 bulan.

Disambut PM dan Menlu Italia

Teman-teman dan kenalan di lingkungan Milan, tempat keluarga Silvia tinggal menyambut hangat kedatangan Silvia.

Mereka bertepuk tangan dari jendela, balkon, dan di jalan-jalan, ketika pesawat yang membawa Silvia akhirnya mendarat di bandara Ciampino, Roma.

Silvia diterbangkan dengan menggunakan penerbangan khusus sekitar pukul 14.00 (waktu setempat).

Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte dan Menteri Luar Negeri Italia,

Luigi Di Maio juga berada di landasan untuk menyambut pekerja sosial berusia 25 tahun itu. Lonceng Gereja berdering di kota asalnya, Milan ketika pembebasannya memicu perayaan di suatu negara yang sangat membutuhkan kabar baik, setelah berbulan-bulan kesengsaraan melanda Negara itu akibat pandemi virus korona.

Meski telah 18 bulan diculik, namun Silvia terlihat sehat dan ceria. Sedikitpun dia tidak terlihat sakit seperti umumnya orang yang diculik.

“Iya saya baik-baik saja, untungnya, baik secara fisik maupun mental. Saya sekarang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga saya. Saya sangat senang bisa kembali setelah sekian lama,” kata Silvia Romano saat kedatangannya yang diabadikan dalam sebuah video yang diposting di situs harian Corriere della Sera.

Dikawal oleh pria bermasker dari dinas intelijen, Silvia Romano untuk sementara dia melepas masker pelindungnya untuk melambai dan memperlihatkan senyum



bahagiaanya, ketika dia menuruni tangga dari jet Angkatan Udara Italia, sebelum memeluk kerabat yang menunggunya di bandara.

Perdana Menteri Conte mengatakan, bahwa gugus tugas yang bekerja untuk membebaskan Silvia Romano berada di tahap akhir "selama beberapa bulan terakhir", setelah memiliki bukti bahwa dia (Silvia) masih hidup. Dia menambahkan bahwa rincian upaya pembebasan memang tidak diungkapkan secara terbuka, sehingga tidak membahayakan operasi penyelamatan.

"Kami sangat senang menyambut Silvia kembali di saat yang sulit (karena virus corona) untuk negara ini. Negara selalu ada, dan akan selalu ada di sana," kata Conte.

Perdana Menteri juga berterima kasih atas upaya dari dinas intelijen, kehakiman dan kementerian pertahanan dan luar negeri, semua yang terlibat dalam pembebasan wanita muda cantik itu.

"Saya benar-benar penuh dengan sukacita pada saat ini. Tapi itu susah, bahkan hanya untuk berpikir, tolong biarkan aku

MC *"Kami sangat senang menyambut Silvia kembali di saat yang sulit (karena virus corona) untuk negara ini. Negara selalu ada, dan akan selalu ada di sana," kata Conte.*

bernafas. Saya perlu menahan goncangan, kebahagiaan sangat besar sehingga meledak," kata ayah Silvia, Enzo, seperti dikutip oleh beberapa surat kabar Italia pada Minggu (10/5).

Mengejutkan

Pemandangan mengejutkan terlihat saat Silvia keluar dari pesawat. Tak seorngpun yang menyangka bahwa Silvia akan terlihat cantik dan anggun dengan mengenakan busana Muslimah dengan balutan hijab.

Tak seorngpun yang tahu, jika Silvia telah memeluk agama Islam selama dalam masa penahanan. Meski begitu, menurut media Italia yang melaporkan, bahwa baik keluarganya maupun pejabat Italia, tidak mengomentari perubahan keyakinan Silvia tersebut.

Jaksa yang bermarkas di Roma rencananya akan menyelidiki kejahatan yang dilakukan di luar negeri terhadap warga Italia, dan Silvia akan diwawancarai terkait hal tersebut. ♦mt/berbagaisumber



Tampil Trendy dan Kekinian dengan

CELANA JOGGER WANITA BERHIJAB

Pada jaman dulu, Celana Jogger sering dipakai oleh para wanita untuk melakukan kegiatan berolahraga dan senam, namun seiring dengan berjalannya waktu, Celana Jogger wanita kini lebih sering dipakai untuk melakukan kegiatan sehari-hari, karena bahannya yang adem dan tipis, sehingga lebih nyaman dibandingkan dengan bahan celana biasa pada umumnya.

Celana Jogger memiliki model sedikit besar pada bagian atas dan mengerucut pada bagian bawah, sehingga Celana Jogger sangat cocok dan pas dipakai oleh wanita. Begitupun dengan wanita berhijab, Celana model yang satu ini sangat cocok.

Jika biasanya celana jeans atau celana lainnya memiliki hak atau kancing untuk mengeratkan celana itu sendiri pada bagian atasnya, lain halnya dengan celana jogger wanita berhijab ini, dimana celana jenis ini menggunakan bahan karet untuk mengeratkan celananya, sehingga saat dipakai akan terasa nyaman.

Celana Jogger sangat cocok dikenakan di berbagai acara, baik resmi maupun tak resmi. Apakah itu untuk jalan-jalan bersama teman, pergi ke kampus, atau bahkan ke seminar-seminar. Apalagi saat ini banyak muncul model celana jogger wanita berhijab, yang lebih trendy dan modern, sehingga akan membuat pemakainya terlihat cantik dan menawan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan fashion yang sekarang makin berkembang dan inovatif, membuat banyak wanita ingin mencoba sesuatu yang



baru, yang belum pernah dia dapatkan terutama dalam hal penampilan.

Namun tetap bagi wanita berhijab, yang lebih diutamakan adalah pakaian yang tertutup, selebihnya tentu yang nyaman, enak dipakai, dan tak ketinggalan zaman, sehingga sang pemakai akan terlihat modern, modis dan trendy.

Celana Jogger merupakan salah satu celana yang disukai para wanita, selain bahannya yang lembut, nyaman dipakai, juga membantu si pemakainya jauh dari kata seksi, karena celana jogger tidak ketat, karena modelnya yang sedikit longgar dan besar, bahannya juga lentur dan fleksibel.

Berikut beberapa model Celana Jogger Wanita Berhijab yang sedang tren yang perlu Anda ketahui:

Celana Jogger Wanita Motif

Untuk Anda para hijabers yang suka dengan perpaduan warna celana jogger motif, maka Anda bisa memilihnya sesuai dengan keinginan Anda, atau yang sesuai dengan kebutuhan.

Celana Jogger wanita motif ini juga terdiri dari berbagai motif. Mulai dari motif army, motif polkadot, motif kartun dan motif kebanggaan Indonesia yaitu motif batik. Atau jika Anda tidak suka dengan motif yang terlihat mencolok, maka Anda bias memilih celana jogger wanita berhijab dengan motif garis-garis yang simple.

Celana Jogger Wanita Polos

Celana jogger jenis ini sering dipilih para wanita untuk dikenakan saat jalan-jalan



Celana Jogger sangat cocok dikenakan di berbagai acara, baik resmi maupun tak resmi. Apakah itu untuk jalan-jalan bersama teman, pergi ke kampus, atau bahkan ke seminar-seminar. Apalagi saat ini banyak muncul model celana jogger wanita berhijab, yang lebih trendy dan modern, sehingga akan membuat pemakainya terlihat cantik dan menawan.



lan bersama teman, karena motifnya yang polos maka akan membuat pemakainya terlihat semakin casual, saat dipadukan dengan kaos atau sweater, apalagi jika dipadu dengan memakai sepatu sneakers, maka akan membuat penampilan Anda benar-benar trendy dan modis, namun tetap casual.

Untuk hijab, Anda bisa memadukannya dengan hijab yang sesuai dengan warna yang senada dengan celana jogger itu sendiri ataupun warna-warna mencolok, karena celana jogger motif polos bisa dipadukan dengan warna apapun.

Celana Jogger Wanita Jumpsuit

Model celana jogger wanita berhijab yang satu ini, bias dibilang sedang tren, karena hampir setiap wanita berhijab memakainya. Model celana jogger jumpsuit ini juga berbeda dari celana jogger pada umumnya, yaitu terletak pada panjang celana tersebut, yang mencapai pundak atau orang dulu menyebutnya celana kodok.

Dengan model yang lebih panjang, maka itu akan menjadikan celana jogger sebagai favorit wanita berhijab.

Celana Jogger Wanita Ukuran Besar

Model celana jogger wanita ukuran

MC *Celana Jogger wanita berhijab dengan ukuran besar, artinya celana model ini memiliki ukuran dua kali lipat dari ukuran biasa, dan saat Anda memakai celana dengan ukuran besar ini, maka penampilan Anda tidak akan terlihat atau terkesan seksi ataupun ketat. Karena model Celana Jogger model ini bisa menutupi bagian pinggang sampai mata kaki Anda.*

besar, masih sama dengan model dari celana jogger pada umumnya, yang berbeda hanya ukurannya saja.

Celana Jogger wanita berhijab dengan ukuran besar, artinya celana model ini memiliki ukuran dua kali lipat dari ukuran biasa, dan saat Anda memakai celana dengan ukuran besar ini, maka penampilan Anda tidak akan terlihat atau terkesan seksi ataupun ketat. Karena model Celana Jogger model ini bisa menutupi bagian pinggang sampai mata kaki Anda.

Celana Jogger Pants

Pada umumnya, celana jogger model pants ini didesain untuk dipakai saat berolahraga saja, karena dari bahannya itu sendiri, yang bisa menahan keringat yang menempel. Namun kini, celana jogger wanita berhijab model pants ini tak hanya digunakan saat berolahraga, namun bias dikenakan untuk sehari-hari, bahkan untuk jalan-jalan dengan teman ke mall atau sekedar hangout, karena celana jogger pants kini sudah makin banyak modelnya, yang lebih trendy dan modern.

Celana Jogger Jeans Wanita

Hampir bisa dikatakan bahwa semua model Celana Jogger untuk wanita berhijab kebanyakan adalah bermotif polos.



Namun ada satu yang perlu diketahui, yaitu model yang tidak ingin menghilangkan pendahulunya yang sudah tenar, yakni Celana Jogger model jeans.

Celana Jogger model jeans, kini tidak hanya memiliki satu warna, melainkan banyak pilihan warna yang bisa dipilih, yang sesuai dengan keinginan para pemakainya. Mulai dari warna biru langit, biru muda, coklat, merah, kuning dan banyak lagi.

Celana Jogger model jeans bisa dipadukan dengan atasan apapun, mulai dari blouse, kemeja, kaos, hingga sweater. Tergantung keinginan ataupun kegunaannya. Tapi umumnya Celana Jogger model jeans dipakai untuk acara-acara santai alias acara-acara tak formal, seperti jalan-jalan ke pantai, gunung, mall atau untuk hangout bersama teman-teman.

Celana Jogger Casual Wanita

Celana Jogger casual lebih mirip dengan Celana Jogger model polos, bedanya Celana Jogger casual terlihat lebih trendy dan cocok dipakai semua wanita berhijab, karena model casual identik dengan kenyamanan dan gaya yang fashionable dan kekinian.

Dan model Celana yang satu ini, juga

sangat cocok dikenakan untuk acara-acara tidak resmi, seperti bersilaturahmi, ke kampus atau sekedar jalan-jalan.

Untuk baju atasannya pun tak begitu ribet, karena akan cocok dipasangkan dengan atasan apapun. Silahkan mencoba! [mt/trendmuslimah](https://www.instagram.com/trendmuslimah)



ULAR TUKANG SIHIR FIR'AUN VS KHILAFAH-ISME

Ketika tukang sihir Raja Fir'aun melemparkan tali temali, maka tali itu berubah menjadi ular. Namun ini hanya dalam pandangan mereka yang sudah terpengaruh mantra tukang sihir itu. Wajar jika kemudian mereka takut dengan ular-ular itu. Tentu berbeda bagi Nabi Musa AS yang tidak merasa takut karena tidak sedang dalam pengaruh mantra para tukang sihir itu.



Oleh: Wahyudi al Maroky

(Dir. Pamong Institute)

Pertanyaannya, benarkah tali temali yang dilemparkan oleh para tukang sihir itu berubah menjadi ular? Jauh sebelum Ipin dan Upin (bocah kartun melayu) menjawab itu dengan istilah Silap Mata, 14 abad yang lalu Islam telah menjawabnya. Allah telah memberitahu kita bahwa itu hanya tipuan para tukang sihir saja. "...Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang

tukang sihir itu, dari mana saja ia datang". (QS. Thaha : 69).

Para Tukang sihir itu sangat Paham bahwa tali mereka tetaplah tali yang tak berubah jadi Ular. Sementara tongkat nabi Musa benar-benar berubah jadi Ular. Mereka sangat memahami hal itu, sehingga mereka pun bertobat dan beriman.

Para tukang sihir Fir'aun dengan mantranya berhasil mempengaruhi pandangan publik. Sesuatu yang sejatinya hanya tali temali, mereka buat seolah-olah tali itu terlihat sebagai ular yang begitu menakutkan. Lain dulu lain sekarang. Jika dulu rakyat Fir'aun ditakut-takuti dengan tali "ular", saat ini kita ditakut-takuti dengan istilah Khilafah.

Dulu tali yang sangat bermanfaat untuk mengikat dan menyatukan justru "dimantrai" sehingga nampak seperti ular yang menakutkan. Ular yang membahayakan, ular yang akan membunuh dan memakan mereka. Meski kini tukang sihir Fir'aun tak ada lagi. Namun kini ada yang mencoba "memantrai" Khilafah dengan istilah Khilafahisme, sehingga tampak begitu menakutkan.

Di zaman "now" Mereka mencoba membuat makar dengan "memantrai" khilafah dengan istilah "Khilafah-isme". Kemudian dengan lancang memosisikan khilafah itu sejajar dengan ajaran buatan manusia yang buruk, yang sudah dikesankan negatif seperti; komunisme, leninisme, radikalisme, dll. Padahal khilafah adalah sistem pemerintahan yang diwariskan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat mulia dan kaum muslim. Ketika beliau SAW wafat, sistem pemerintahan itu dilanjutkan oleh Khalifah Abubakar, Khalifah Umar, dst.

Hari ini Khilafah ibarat tali ditangan tukang sihir Fir'aun. Setelah di bacakan "mantra", maka Khilafah berubah menjadi sesuatu yang terlihat sangat menakutkan. Siapa pun yang sudah terpengaruh mantra itu maka akan melihat seolah-olah Khilafah itu seperti ular yang menakutkan dan membahayakan.

Khilafah yang mempersatukan justru mereka anggap akan memecah-belah. Khilafah yang hukumnya wajib, justru dimata mereka tampak tertolak. Khilafah yang menyejahterakan dan menjadi rahmatan lil'alamain, dimata mereka tampak menyusahkan. Bahkan ada yang menghayalkan seolah-olah seperti di suriah. Padahal betapa banyak catatan emas sejarah Khilafah yang menyejahterakan.

Tentu tak semua orang terpengaruh dengan mantra tukang sihir itu. Banyak juga yang tak mempan dengan mantra para tukang sihir itu. Bagi mereka Khilafah itu tetaplah ajaran Islam yang baik. Ajaran yang datang dari Allah SWT Sang Pencipta semesta alam. Ajaran

yang membawa rahmat bagi semesta Alam, juga ajaran yang diwajibkan oleh Allah sang Pencipta alam, manusia dan kehidupan beserta segenap aturannya. Lalu bagaimana nasib mereka yang tak terpengaruh?

Sebagaimana di jaman Fir'aun, Dia mengejar nabi Musa dan para pengikutnya. Setelah gagal dengan para tukang sihirnya, Dia mengerahkan aparat dan pasukannya untuk mengejar mereka sampai tersudut di tepi Laut Merah. Sampai Allah menurunkan pertolonganNya untuk menyelamatkan

yang lahir. (di zaman kini ada juga mereka yang meramal dan memfitnah bahwa akan ada ummat islam yang hendak meruntuhkan kekuasaannya).

KEDUA, Para Tukang Sihir. Mereka inilah yang bekerja memoles dan mengubah pandangan publik. Sesuatu yang baik mereka bacakan "mantra" dengan fitnah terus menerus melalui propaganda buruk sehingga nampak sangat bahaya. Sebaliknya sesuatu yang biasa saja bahkan buruk, merek poles dan bacakan "mantra" di berbagai media se-

Akankah orang-orang yang masih berakal sehat dan tak mempan dengan mantra para tukang sihir itu akan mengalami nasib yang sama dengan Nabi Musa dan pengikutnya? Akankah mereka ditekan, dipersulit pekerjaan dan kehidupannya, bahkan dikejar aparat dan pasukan sampai terpojok ditepi laut? Dan akankah Allah akan menolong mereka dan menenggelamkan para pengejanya yang zalim?

Kiranya para pemuja dan pengikut ajaran Fir'aun segera sadar dan bertobat. Se-



Nabi Musa beserta pengikutnya. Sebaliknya menghinakan dan menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya.

Begitulah cara Fir'aun menjaga kekuasaannya. Ia mengerahkan 3 komponen sekaligus.

PERTAMA, Para ilmuwan dan Ahli Nujum. Mereka adalah orang pintar yang bisa memprediksi bahkan bisa membaca masa depan. Mereka meramalkan akan lahir bayi laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Hal ini digunakan untuk melegitimasi kebiadabannya membunuh semua bayi laki-laki

hingga nampak sangat bagus. Mereka pun menakuti-nakuti publik agar mau mengikuti pandangan dan keinginannya.

KETIGA, Para aparat dan pasukan. Jika mantra tukang sihir tak mempan lagi untuk mempengaruhi pandangan publik maka mereka akan menggunakan kekerasan. Mereka akan mengerahkan aparat dan pasukannya untuk melakukan kriminalisasi. Sebagaimana Fir'aun menggunakan aparat dan pasukannya untuk mengejar Musa dan pengikutnya sampai tersudut di tepi laut.

bagaimana bertobatnya para tukang sihir Fir'aun yang pagi masih memusuhi Nabi Musa lalu sorenya sudah beriman. Meski mereka harus disiksa dan dibunuh Fir'aun. Dan kiranya para pembela kebenaran yang menyampaikan dakwah segera mendapat pertolongan dari Allah Yang Maha Perkasa. Semoga. ♦

NB; Penulis pernah belajar pemerintahan di STPDN angkatan ke-04 dan IIP Jakarta angkatan ke-29 serta MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.



SEPAKAT, SUMSEL CEGAH KARHUTLA BERSAMA

Meski masih berjibaku dengan penanganan Covid-19 namun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tetap terus mempertahankan prioritasnya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Pada tahun ini Pemprov Sumsel bertekad meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Karhutla agar jangan sampai terulang di tahun 2019 lalu. Bukan itu saja, targetnya adalah jangan sampai ada Karhutla di wilayah Sumsel, terutama di lahan rawa gambut yang sangat rentan terjadi kebakaran.

Guna mencapai target itu Gubernur Sumsel H Herman Deru terus menunjukkan perhatiannya dalam menangani dan mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumsel. Tahun 2020 ini, Herman Deru menggelontorkan

dana APBD sebesar Rp 45 Miliar untuk mencegah kebakaran kepada 10 kabupaten yang kerap terjadi karhutla

Selain itu ia juga menginstruksikan agar kabupaten yang berpotensi Karhutla untuk membentuk satuan tugas dan menyiapkan peralatan sebagai upaya penanggulangan.

"Baru tahun ini Pemprov Sumsel memberikan bantuan senilai Rp 45 miliar untuk kabupaten terdampak guna membeli alat yang tidak habis pakai," kata HD, usai menjadi Irup Apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumsel di Lapangan Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir.

Dimana 10 kabupaten yang mendapatkan bantuan anggaran penanggulangan karhutla tersebut yakni, Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin, PALI, Muba, OKI, OKU Timur, Muratara, Muara Enim, Musi Rawas, dan Kabupaten OKU Selatan.

"Besaran anggaran yang diberikan untuk tiap kabupaten tersebut jelas berbeda.

itu akan ditentukan dari luas lahan di kabupaten tersebut," paparnya.

Gubernur mengatakan dirinya berharap bantuan dana yang dikucurkan dapat digunakan untuk membeli peralatan penanganan karhutla yang tidak habis pakai. Masih ada kabupaten/kota yang peralatannya sudah usang. Bahkan, ada kabupaten yang tidak memiliki alat standar untuk penanggulangan karhutla.

"Jadi dana ini dapat digunakan untuk beli alat-alat penanganan karhutla, termasuk pula untuk empat kabupaten yang mendapatkan layar informasi standar ISPU," kata Deru.

Dia memaparkan alokasi dana untuk 10 daerah tersebut dibagi secara proporsional, dengan merujuk pada luasan daerah dan besaran dampak dari karhutla.

Rincian daerah yang mendapatkan bantuan dana yakni Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp7 miliar, Kabupaten Banyuasin senilai Rp7 miliar, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebanyak Rp5 miliar, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) senilai Rp8 miliar.

Selanjutnya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur mendapat bantuan senilai Rp4 miliar, Kabupaten OKU senilai Rp2 miliar, Kabupaten Musi Banyuasin senilai Rp5 miliar, Kabupaten Musi Rawas

MC Gubernur Deru pun memastikan penggunaan dana bantuan itu akan diawasi secara optimal dengan melibatkan pihak inspektorat provinsi dan kabupaten, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Utara senilai Rp1 miliar, Kabupaten Muara Enim senilai Rp5 miliar, dan Kabupaten Musi Rawas senilai Rp1 miliar.

Seperti diketahui, Sumsel memiliki lahan gambut seluas 1,27 juta hektare yang tersebar di 7 kabupaten, meliputi Musi Rawas, Pali, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI).

Gubernur Deru pun memastikan penggunaan dana bantuan itu akan diawasi secara optimal dengan melibatkan pihak inspektorat provinsi dan kabupaten, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Karena ini dananya merupakan transfer dari provinsi ke kabupaten/kota tentu ada pengawasan internal, juga kami akan melibatkan BPK dan BPKP," katanya.

Tidak hanya itu, dia menyebut juga ada empat kabupaten yang diberikan layar informasi indeks standar pencemaran udara (ISPU). Dengan begitu bupati maupun masyarakatnya bisa tahu kondisi indeks pencemaran udaranya berapa.

Pemprov Sumsel juga saat ini mendorong perusahaan khususnya di bidang perkebunan untuk turut membantu dalam penanggulangan karhutla yang terjadi setiap tahun ini.

"Bukan hanya bantuan moril kepada





masyarakat. Kita juga mewajibkan perusahaan tersebut dalam hal penanganan. Dan ini dibuktikan oleh perusahaan tersebut salah satunya bantuan helikopter untuk memonitor lahan-lahan yang rawan terbakar. Karhutlah ini juga ditentukan oleh curah hujan. Jika curah hujan rendah maka potensi karhutlah cukup tinggi, begitupun sebaliknya. Sebab itu kita butuh pengawasan bersama," jelasnya.

"Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo agar gubernur, walikota, dan bupati hingga kepala desa agar dapat mencegah dan menanggulangi karhutla dengan tepat. Secepat mungkin dan lebih dini menangani jika ada kebakaran di wilayahnya," katanya.



"Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo agar gubernur, walikota, dan bupati hingga kepala desa agar dapat mencegah dan menanggulangi karhutla dengan tepat. Secepat mungkin dan lebih dini menangani jika ada kebakaran di wilayahnya," katanya.

Gubernur menilai keberadaan hutan sangat penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, bencana Karhutla sangat berdampak negatif bagi ekosistem dan lingkungan di Sumsel.

Bukan hanya akan merugikan masyarakat setempat namun juga bisa menyebabkan perubahan iklim, efek gas rumah kaca, dan berdampak buruk bagi lingkungan.

"Yang harus jadi perhatian adalah sinkronisasi satuan tugas dari provinsi, kabupaten dan kota hingga tingkat desa. Kesiapsiagaan karhutla di daerah harus dilakukan, karena itu bupati dan wali kota ditunjuk langsung menjadi Dansatgas," jelasnya.

Selain bantuan anggaran Rp 45 mil-

"Provinsi memiliki anggaran itu, jumlahnya sekitar Rp 100 miliar. Tentu itu digunakan untuk penanggulangan karhutla ini," imbuhnya.

iar untuk kabupaten, Pemprov Sumsel sendiri masih memiliki anggaran lebih dari Rp 100 miliar yang diperuntukkan untuk penanggulangan karhutlah.

"Provinsi memiliki anggaran itu, jumlahnya sekitar Rp 100 miliar. Tentu itu digunakan untuk penanggulangan karhutla ini," imbuhnya.

Dengan bantuan anggaran tersebut dia berharap, Sumsel dapat terbebas dari Karhutla yang selalu menjadi ancaman setiap tahunnya.

"Namun ini juga harus ada peran dari masyarakat. Sejauh ini kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan secara ilegal dengan cara membakar sudah cukup tinggi. Kalau pun nantinya masyarakat ingin membuka lahan baru bisa berkomunikasi dengan Gapoktan yang telah dibentuk untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada Dinas Pertanian untuk peminjaman alat membuka lahan baru seperti eskavator. Dengan kerjasama demikian maka kami yakin karhutla tidak akan terjadi lagi," timpalnya. ♦rhd

KERAHKAN 8.000 PERSONEL

Kesiapsiagaan Pemprov Sumsel mengatasi Karhutla ini terhitung sangat tinggi. Selain memberikan bantuan keuangan kepada 10 kabupaten berdampak Karhutla dengan total Rp 45 miliar, Pemprov juga menyiapkan ribuan personil gabungan.

"Ya, Pemprov sudah siaga sejak awal dengan menempatkan ribuan petugas. Kita juga beri bantuan kepada 10 kabupaten berdampak Karhutla dengan total Rp 45 Miliar," ungkap Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Mawardi Yahya usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri guna membahas Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Periode Puncak Kemarau Tahun 2020,

Kesiapsiagaan tersebut, lanjut Wagub, yakni dengan membentuk Satgas Karhutla dengan Gubernur sebagai Dansatgas, Danrem sebagai Dan Ops dengan menerjunkan lebih dari 8000 orang dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, KLHK, masyarakat peduli api dan regu damkar perusahaan.

"Pemprov juga melaksanakan operasi udara berupa patroli, water bombing dan TMC. Operasi darat juga dilakukan. Untuk memadamkan setiap ada titik api. Dengan harapan kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 ini dapat diminimalisir," pungkashya.

Mawardi Yahya mengatakan Karhutla ini sudah menjadi tugas bersama karena ini terjadi dari tahun ke tahun, tinggal bagaimana cara komitmen dalam penanganannya.

"Jadi bagaimana komitmen kita bersama didalam mengantisipasi dan penanganan ini. Tapi saya kira tahap pertama mengantisipasi dengan langkah-langkah kita ke titik hotspot di desa-desa, mungkin dari sana kita lakukan," ungkapny.

Wagub menilai jika penanganan Karhutla ini dilakukan dengan cara bersama-sama tentu dapat dengan mudah ditangani. Bahkan Pemprov Sumsel sudah siap untuk mengantisipasi Karhutla ini.

"Saya yakin apabila semua tanggung jawab mulai dari tingkat provinsi, kabupaten sampai ke desa, Karhutla ini bukanlah hal yang berat. Kita secara nyata, segala kekuatan dan tenaga kita curahkan dalam penanganan karhutla maka langkah-langkahnya kita lakukan pencegahan," terangny.

Sementara Kabareskrim Polri Komjen Pol Listiyo Sigit Prabowo mengungkap-

kan, secara umum ada dua penyebab kebakaran hutan dan lahan, pertama faktor alam, biasanya terjadi di negara-negara subtropics seperti Amerika, Kanada dan Australia.

"Kebakaran kenapa bisa terjadi karena alam karena gesekan saja bisa mengakibatkan kebakaran itu di wilayah hutan

hingga penyebab alam itu kecil terjadinya karena kelembaban dan curah hujan dan pada saat terjadi petir," papar Kabareskrim.

Tahun 2019 Polri telah lakukan 367 penyidikan kasus Karhutla yang melibatkan 342 tersangka perorangan dan 27 korporasi. Tahun 2020, Presiden dan Kapolri sangat serius untuk masalah Karhutla. Te-



subtropic," katanya.

Terus bagaimana Indonesia, apakah terjadi karena alam atau karena penyebab yang lain. Ternyata dari hasil survei untuk Indonesia ini 90 persen karena faktor manusia.

"Kebakarannya karena manusia, karena di sekitarnya adalah wilayah tropis se-

lah terbit Inpres No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.

"Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan peran serta pelaku usaha dalam penanggulangan dengan maksimal dapat menekan terjadinya Karhutla seminimal mungkin sebagaimana tahun 2017 dan 2018," jelasny. ♦ rhd

BERSAMA CEGAH KARHUTLA



**PANGDAM II/SRIWIJAYA,
MAYJEN TNI IRWAN**

Kalau Kurang Kita Tambah Lagi

Kebijakan Gubernur Herman Deru dengan memberikan bantuan ke daerah rawan Karhutlah merupakan bentuk keseriusan kepala dalam menyikapi persoalan di wilayahnya. Sebagai institusi yang terlibat dalam penanggulangan karhutlah

di Sumsel, Kodam II Sriwijaya menurunkan sedikitnya 1000 personel untuk melakukan pencegahan, pengawasan di titik-titik rawan karhutlah.

Tentu ini langkah serius dari Gubernur dan haru didukung penuh. Karena itu, kita pun sudah siapkan seribu personel untuk pengawasan dan penanggulangan. Kalau kurang, kita tambah lagi. Tapi intinya kita sudah menyiapkan. Terlebih kita juga sudah membentuk Subsatgas di kabupaten/kota, dan ini tinggal berjalan saja.

**BUPATI OGAN ILIR,
HM ILYAS PANJI ALAM**

Siap Menghadapi Musim Kemarau

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus siap menghadapi musim kemarau yang tak lama lagi dan dalam menghadapi karhutla Pemda. OI sudah mematangkan persiapan dengan baik, baik personel maupun peralatan.

Jelang musim kemarau berbagai persiapan sudah dilakukan untuk penanggulangan Karhutla mulai dari kesiapan personel hingga peralatan pemadam kebakaran.



BUPATI MUBA, DR DODI REZA ALEX NOERDIN

Siapkan Posko Siaga di Wilayah Rawan Karhutbunlah

Kami sudah mengeluarkan instruksi dan membentuk posko siaga karhutbunlah di masing-masing Kecamatan khususnya di area rawan terjadi karhutbunlah.

Pembentukan posko ini melibatkan OPD di Pemkab Muba yang bersinergi dengan aparat TNI dan Polri. Kita sangat all out, dalam upaya pencegahan karhutbunlah tahun 2020.

Kemudian, kita memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembuka lahan dengan cara pembakaran atau pembakaran pasca panen. Selain itu, memperkuat sarana dan prasarana pemadaman kebakaran serta personel terlatih pada regu pemadaman kebakaran perusahaan perkebunan.

Perusahaan-perusahaan diminta juga untuk aktif dalam upaya pencegahan dan edukasi Karhutbunlah di masing-masing wilayah operasional. Bahkan mewajibkan perangkat Kecamatan dan perangkat Desa agar stand by di wilayah masing-masing.

Camat dan Kades wajib berada di tempat, sosialisasi dan edukasi warga agar tidak melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan. ♦



**KAPOLDA SUMSEL,
IRJEN POL PROF DR EKO INDRA HERI**

Siapkan Relawan Peduli Karhutla

Karhutla ini sudah setiap tahunnya terjadi. Maka itu dalam menanggulangnya dibutuhkan edukasi serta ajakan secara masif ke masyarakat agar tidak membuka lahan secara ilegal.

Beberapa hari kemarin saya sudah mengecek kekuatan personil dan ketersediaan peralatan untuk digunakan Karhutla namun alat ini sebagai konsep terakhir dengan harapan karhutlah tidak terjadi tahun ini.

Dalam strategi pencegahannya tidak lain adalah harus mencegahnya agar tidak terjadi Karhutla. Ini kita bisa lakukan secara bersama. Kami juga sudah menyebarkan maklumat kepada masyarakat tentang dampak dan bahayanya Karhutla. Bahkan kami juga sudah membangun kampung tangkal covid relawan peduli Karhutla. ♦



tahkan untuk tidak meninggalkan lokasi, mereka harus siaga 24 jam.

**BUPATI OKU TIMUR
HM CHOLID MAWARDI**

**Ada Dua Kecamatan
Yang Rawan**

Musim kemarau tahun ini diperkirakan tidak terlalu panjang, dimulai Juli dan kemungkinan awal Oktober sudah ada hujan, beda dengan tahun sebelumnya. Namun demikian kita harus melakukan berbagai persiapan agar jangan sampai seperti tahun kemarin.

Di OKU Timur ada dua kecamatan yang berlahan gambut yakni Kecamatan Semendawai Barat dan Kecamatan Cempaka. Sempat diprediksi tidak masuk dalam wilayah yang terbakar ternyata di luar dugaan. Dua kecamatan itu mengalami Karhutla yang hebat.

Namun berkat gotong royong bersama, Alhamdulillah kita bisa mengatasinya bersama.



**WAKIL BUPATI OKI
HM DJAKFAR SHODIQ**

Bentuk Satgas Desa

Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Gubernur Sumsel dengan memberikan bantuan penanggulangan Karhutla. Dimana Kabupaten OKI yang memiliki lahan yang berpotensi terbakar paling luas sangat membutuhkan bantuan itu.

OKI mendapatkan bantuan Rp 8 miliar karena pak Gubernur tahu betul OKI ini memiliki wilayah paling luas. Bantuan tersebut salah satunya akan diperuntukkan untuk pengadaan alat baru dalam penanggulangan Karhutla. Yang jelas utamanya untuk peralatan dan sarana prasarana.

Saat ini kami telah membentuk satuan tugas di beberapa desa yang dinilai luas dan rawan seperti di Desa Cengal, Tulung Selapan, Pampangan, Pedamaran dan Mesuji. ♦



Kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat turut peduli dalam mengatasi permasalahan tersebut karena untuk penanggulangan Karhutla dibutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat mulai dari TNI, Polri, BPBD, pemerintah desa hingga masyarakat peduli lingkungan dan peduli api.

**PLT BUPATI MUARAENIM
H JUARSAH**

**Sudah Membuat
Sekat Kanal dan
Sosialisasi**

Bantuan Karhutla dari Gubernur Sumsel senilai Rp5 miliar rencananya akan dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan, sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pemakaiannya tidak habis pakai. Kita akan gunakan anggaran ini untuk mendukung Karhutla.



Pemkab Muaraenim sendiri mengalokasikan Rp15 miliar untuk penanggulangan Karhutla di wilayah kami. Dimana saat ini kami dalam persiapan untuk kemarau yang akan datang. Di Muaraenim ini seba-

gian merupakan lahan gambut dan lahan mineral yang sangat rentan terjadi karhutla setiap tahun.

Sebagai langkah awal pencegahan Karhutla, pemerintah dan semua pihak terkait sudah membuat embung, sekat kanal dan mensosialisasikan ke warga agar bersama-sama membantu pencegahan karhutla.

**BUPATI BANYUASIN
ASKOLANI
Camat Harus Siaga
24 Jam**

Kami sebetulnya sudah siap untuk pencegahan baik dari sisi anggaran maupun tindakan pencegahan. Selain dana APBD, Banyuasin juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat senilai Rp11 miliar dan bantuan Gubernur Sumsel senilai Rp7 miliar.

Dana tersebut akan dibelikan peralatan pemadaman kebakaran dan juga untuk membeli alat pemantau kebakaran.

Dimana

Kabupaten Banyuasin memiliki 21 kecamatan, 288 desa dan 17 Kelurahan. Terdapat 11 kecamatan yang masuk kategori rawan karhutla karena banyak terdapat hutan, semak belukar hingga lahan gambut.

Sehingga camat di daerah itu terus melakukan koordinasi dengan kades dan lurah dalam upaya pencegahan di wilayah masing-masing. Camat sudah saya perin-





GUBERNUR HERMAN DERU TAHU ISI HATI MAHASISWA

Kehidupan di masa pandemi Covid-19 ini hampir membuat hidup semua orang dalam kesusahan. Termasuk mahasiswa Sumsel yang banyak mengalami kesulitan untuk membiayai pendidikannya.

Seperti diketahui sejak pandemi Covid 19 melanda Sumsel, tak hanya orang tua mahasiswa. Sejumlah wali murid dan para orangtua yang menyekolahkan anak-anaknya tak sedikit yang mengeluhkan kesulitan membayar biaya pendidikan buah hati mereka.

Sebagian besar merasa terbebani dengan biaya pendidikan yang masih normal di tengah pendapatan masyarakat yang justru tengah terdampak akibat Covid-19.

Melihat kondisi tersebut, Gubernur

Herman Deru meminta Kementerian Pendidikan atau khususnya Dikti yang membidangi pendidikan tinggi maupun pengelola yayasan, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) di Sumsel memberikan keringanan atau potongan SPP atau dalam bentuk pembayaran apapun bagi mahasiswa/mahasiswi di berbagai sekolah serta perguruan tinggi negeri maupun swasta

"Tolonglah mereka, berikan potongan sesuai dengan kemampuan lembaga yang bapak ibu pimpin. Mudah-mudahan



ini dapat menjadikan pendidikan di Sumsel berjalan sebagaimana mestinya dengan baik dan tetap bersemangat meskipun dalam suasana Covid 19," tegas HD.

Himbauan ini langsung direspon cepat kalangan mahasiswa. Sehingga tak lama kemudian, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Sumsel melakukan audiensi dengan DPRD Sumsel dan L2Dikti.

Mahasiswa berharap surat yang disampaikan Gubernur Sumsel bukan sekedar imbauan namun bisa direalisasikan pihak kampus.

"Hari ini bagaimana solusi surat yang dikeluarkan gubernur untuk di realisasikan di PTS dan PTN, sekarang rancu, kalau sekedar imbauan bisa saja rektorat menolak karena inikan sekedar imbauan" ujar Agung Taruna, Mahasiswa Tridinanti dalam audiensinya di ruang Badan Anggaran DPRD Sumsel.

Menurutnya ditengah wabah Covid-19 ini semua mahasiswa terdampak dari sisi keuangan. Sehingga dikhawatirkan jika tidak ada keringanan biaya mahasiswa

MC

"Tolonglah mereka, berikan potongan sesuai dengan kemampuan lembaga yang bapak ibu pimpin. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan pendidikan di Sumsel berjalan sebagaimana mestinya dengan baik dan tetap bersemangat meskipun dalam suasana Covid 19," tegas HD.

bisa saja *stop out*.

"Bisa saja teman-teman *stop out* kalau tidak ada keringanan. Yang saya harap, bagaimana tanggapan tindak lanjut dan hasilnya bisa disampaikan secara gamblang, agar mahasiswa dan rektorat bisa mengerti," kata Agung.

Curhatan yang sama disampaikan Rudianto Widodo dari Forum Suara Mahasiswa Sumsel yang bertekad akan terus mengawal surat imbauan yang dikeluarkan gubernur Sumsel tentang keringanan biaya kuliah.

"Ya kita akan kawal terus ini sampai surat imbauan gubernur itu bisa direalisasikan, kami juga minta DPRD Sumsel berperan aktif menyelamatkan pendidikan ditengah pandemi," ujarnya.

Menjawab pernyataan sikap yang diajukan mahasiswa ini, Gubernur Herman Deru juga memberikan respon yang cepat pula.

"Saya ucapkan terimakasih atas apresiasi para mahasiswa. Sebab dari pengamatan saya dan tim beserta jajaran bahwa yang terkena dampak covid19 ini bukan

hanya pelaku usaha, orang-orang rentan termasuk juga mahasiswa dengan dampak yang berbeda-beda, dari dampak aspek kesehatan, aspek ekonomi, termasuk mahasiswa yang masih menjadi tanggungan orang tua. Oleh sebab itu saya punya inisiatif sebagai pemimpin wilayah, pemimpin masyarakat melihat situasi ini saya menghimbau pada PTN dan PTS di Sumsel dengan memperhitungkan dampak serta pro dan kontra yang ada.” ujar HD.

Sesuai dengan himbauannya Herman Deru meminta agar PTN/PTS yang bersangkutan dibuat dengan menyinkronkan kemampuan PT dan kemampuan mahasiswa.

“Himbauan itu disinkronkan. Saya katakan sesuai dengan kemampuan lembaga, jika PTN sangat bergantung dengan tempatnya bernaung yaitu Dirjen Dikti dan Kementerian Pendidikan dan untuk UIN misalnya itu tergantung pada Kementerian Agama serta untuk PTS ada di bawah naungan LII Dikti.” paparnya.

Tak hanya itu, Herman Deru juga menjelaskan, pemerintah provinsi Sumsel sudah menyiapkan cadangan dana untuk

mahasiswa yang akan membutuhkan bantuan tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 10 miliar, untuk memberikan keringanan pembayaran SPP kepada 10.000 mahasiswa maupun mahasiwi di perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumsel.

Tiap-tiap mahasiswa dan mahasiswi nantinya mendapat keringanan biaya sebesar Rp 1.000.000 selama satu tahun.

“Refocusing dan realokasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing kita pagukan Rp.10 miliar, formulasi nya Rp. 1.000.000 pertahun, dengan syarat mengajukan. Kalau diratakan tidak adil, karena kita tahu formula nya dibedakan, tinggal menunggu skema yang dibuat perguruan tinggi, agar akurasinya terjaga,” ungkapnya.

“Kalau Rp. 10 miliar sarannya 10.000 mahasiswa terdampak bisa diakomodir jika kurang kita tambah dari refocusing dan realokasi yang lain,” tambahnya

Menurutnya, Pemprov Sumsel telah menyiapkan formula-formula untuk masyarakat terutama masyarakat yang se-

MC *“Refocusing dan realokasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing kita pagukan Rp.10 miliar, formulasi nya Rp. 1.000.000 pertahun, dengan syarat mengajukan. Kalau diratakan tidak adil, karena kita tahu formula nya dibedakan, tinggal menunggu skema yang dibuat perguruan tinggi, agar akurasinya terjaga,” ungkapanya.*



cara langsung terkena dampak dari pandemi covid 19.

"Pengalokasian ini diketahui perguruan tinggi, ada jaminan dari pemerintah. Jangan pernah ini di jadikan wilayah politik, konsepnya berangkat dari niat. Meskipun Perguruan tinggi bukan ranah provinsi dalam menaungi PTN dan PTS, tapi apapun itu ini warga sumsel rakyat sumsel atau putra putri masyarakat sumsel, Saran yang sangat positif bagi saya pemimpin daerah ini," tuturnya

Langkah Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk terus menjaga keberlangsungan pendidikan para mahasiswa perguruan tinggi dan universitas di Sumsel agar tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19 diapresiasi berbagai pihak. Bahkan, ajakan agar perguruan tinggi dan universitas untuk turut membantu keringanan biaya pendidikan mahasiswa disambut positif perguruan tinggi dan universitas tersebut.

"Kita menginginkan pendidikan mahasiswa yang saat ini berlangsung tetap berjalan meskipun di tengah wabah ini. Ini sebagai rasa prihatin pemerintah. Sebab itulah, Pemprov Sumsel mengajak lembaga pendidikan bisa berpartisipasi dengan meringankan biaya pendidikan mahasiswa tersebut di tengah wabah ini," kata Wakil Gubernur H Mawardi Yahya.

Terlebih saat pandemi ini, banyak masyarakat khususnya orang tua atau wali mahasiswa yang terpaksa harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaan sehingga menurunkan perekonomian.

"Mereka juga terdampak Covid-19 ini. Penghasilan orang tua atau wali mereka menurun akibat pandemi ini," tuturnya.

Pemprov sendiri, lanjut Mawardi, juga tidak menutup mata atas kesulitan yang dialami mahasiswa saat ini. Dimana pemerintah juga memberikan bantuan kepada perguruan tinggi dan universitas untuk keberlangsungan pendidikan mahasiswanya. Namun harus tetap ada langkah-langkah yang harus dilalui.

Dimana mahasiswa yang menerima bantuan keringanan biaya harus memenuhi sejumlah persyaratan umum seperti tercatat sebagai warga Sumsel dan memiliki e-KTP, mahasiswa program studi S1 dan DIII yang terakreditasi, mahasiswa terdaftar dan aktif yang memiliki kartu mahasiswa serta dibuktikan dengan slip registrasi terbaru.

Kemudian surat keterangan dari fakultas yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak mendapatkan beasiswa dan atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain, tidak pernah atau sedang dikenai sanksi



MC *Dukungan yang sama diberikan L2Dikti Sumsel Slamet Widodo. Saat ini tercatat ada sekitar 87.419 orang mahasiswa aktif di Sumsel. Untuk itulah, harus ada kriteria agar bantuan yang rencananya akan diberikan dapat sesuai sasaran.*

berkaitan dengan pelanggaran tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan orangtua atau wali kurang mampu secara ekonomi akibat Covid-19.

Himbauan ini langsung mendapat tanggapan positif dari perguruan tinggi di Sumsel. Wakil Rektor 1 Unsri Zainuddin Nawawi mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov Sumsel.

Dia menegaskan, pihaknya sepakat mendukung upaya Pemprov Sumsel tersebut. Hanya saja, bantuan tersebut harus berdasarkan data-data yang akurat.

"Kami sepakat mendukung namun harus dengan data yang memang baik agar tepat sasaran," ujarnya.

Dukungan yang sama diberikan L2Dikti Sumsel Slamet Widodo. Saat ini tercatat ada sekitar 87.419 orang mahasiswa aktif di Sumsel. Untuk itulah, harus ada kriteria agar bantuan yang rencananya akan diberikan dapat sesuai sasaran.

"Setiap perguruan tinggi ada beragam jumlah mahasiswanya. Dari 2000 orang sampai 8000 orang. Namun ada juga yang dibawah 100 orang. Karena itu, data betul-betul harus akurat sehingga bantuan itu diberikan kepada yang memang berhak menerimanya. Termasuk juga mengatur kategorinya seperti apa," pungkasnya. ♦ rhd

SUMSEL HARUS MASUK 3 BESAR NASIONAL

Dengan lahan pertanian cukup besar, Provinsi Sumatera Selatan punya potensi besar menjadi lumbung pangan utama nasional. Target tersebut terus diupayakan Gubernur Sumsel, Herman Deru dengan meningkatkan semua sarana sektor pertanian.

Dimana saat ini Provinsi Sumsel dengan luas panen 539.316 hektar mampu menghasilkan padi sebanyak 2.603.396 ton GKG atau setara dengan 1.493.568 ton beras.

Menurut catatan Kementerian Pertanian RI, dari 10 provinsi penghasil beras di Indonesia, Sumsel menduduki posisi kelima Provinsi terbesar penghasil beras terbesar bersaing dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Masuknya Sumsel dalam jajaran provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia, tak lepas dari peran tangan dingin Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam mendorong pertanian di Sumsel agar menjadi lumbung pangan nasional. Namun demikian HD mengaku belum cukup puas. Ia menargetkan di tahun mendatang Sumsel bisa merangsek ke peringkat 3 besar menysihkan provinsi lainnya.

Herman Deru mengatakan, tercatatnya Sumsel sebagai provinsi kelima penghasil beras terbesar merupakan kabar gembira



bagi masyarakat khususnya para petani. Sebab di situasi pandemi covid-19, ternyata para petani masih tetap produktif sehingga provinsi ini mendapat penghar-

Masuknya Sumsel dalam jajaran provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia, tak lepas dari peran tangan dingin Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam mendorong pertanian di Sumsel agar menjadi lumbung pangan nasional.

gaan lima besar daerah penghasil beras. "Ini tentu gambar gembira. Kerja kita membuahkan hasil dan target kita tercapai. Itu artinya Sumsel tidak ada masalah dengan ketersediaan pangan dan kita tidak perlu dibantu beras ekspor. Bahkan justru kita yang bisa memasok beras ke daerah lain. Untuk di Sumatera sendiri Sumsel merupakan penghasil beras terbesar," tuturnya.



Meski demikian, dia mengaku belum puas. HD sendiri menargetkan di tahun berikutnya, Sumsel bisa masuk tiga besar provinsi penghasil beras di Indonesia.

Untuk mencapai target tiga besar tersebut, berbagai upaya dilakukan Herman Deru untuk meningkatkan produksi pertanian.

Meski pandemi covid-19 masih berlangsung dan ada refocusing serta relokasi anggaran yang dialihkan untuk





percepatan penanganan covid-19, tak lantas menghambat kinerja dan program kerja yang akan dilaksanakan Gubernur Sumsel Herman Deru pada tahun mendatang.

Pada tahun 2021 Gubernur Herman Deru memprogramkan pengangkatan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) honorer khusus bidang pertanian yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyuasin, OKU Timur, OKU Selatan, Musi Banyuasin, dan beberapa daerah lainnya

"Tahun 2021 saya programkan pengangkatan PPL honorer pertanian se-provinsi yang akan ditempatkan di kabupaten/kota untuk kemajuan sektor pertanian. Tentu saja dengan syarat lulusan SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas) akan lebih baik lagi jika sarjana pertanian karena mereka yang lebih paham untuk memberikan penyuluhan bagi masyarakat," jelas HD.

Gubernur HD juga berupaya memberikan solusi atas sejumlah kendala yang dihadapi daerah dalam memajukan bidang

pertanian di wilayahnya, seperti kuota pupuk yang kurang dan terlambat, pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) dan kurang maksimalnya pengelolaan lahan pertanian dari program serasi.

"Ada empat puluh ribu lahan yang ada terkendala pada faktor primer dan sekunder, diantaranya ada tumbuhan liar seperti yang terjadi di Pulau Rimau. Belum lagi ada kendala di sistem administrasi untuk normalisasi karena ada pengelolaan di pusat, provinsi, dan kabupaten. Jika terjadi kendala pada faktor primer dan sekunder, Bupati mengerahkan gapoktan selama tidak mengubah konsep awal", imbuh HD.

Sementara itu, terkait lambatnya pengadaan pupuk, HD menjelaskan hal itu berada di distributor.

"Saya juga apresiasi para petani yang terus berupaya dalam mendorong keberlangsungan pangan di Sumsel khususnya kabupaten penghasil pertanian. Kedepan teruslah produktif sehingga kita bisa masuk tiga besar. Kita juga terus memanfaatkan rawa yang tidak produktif menjadi

MC Pada tahun 2021 Gubernur Herman Deru memprogramkan pengangkatan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) honorer khusus bidang pertanian yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyuasin, OKU Timur, OKU Selatan, Musi Banyuasin, dan beberapa daerah lainnya



produktif sehingga tetap terjaga dan tidak rawan Karhutlah. Namun, itu juga perlu senergitas semua pihak," bebernya.

Tidak hanya memperluas lahan pertanian, Pemprov Sumsel juga berupaya menjamin ketersediaan pasokan pupuk bagi para petani.

"Pupuk ini juga harus jelas antara subsidi dan non subsidi. Saya sendiri selalu mengingatkan agar perusahaan perkebunan besar tidak memakai pupuk subsidi yang menjadi hak para petani," terangnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Suwandi mengungkapkan data produksi beras 2019 dapat diperoleh dari data yang dirilis BPS. Metode perhitungan yang digunakan BPS adalah Kerangka Sampling Area (KSA), di mana perolehan angkat produksi berasnya dengan menggunakan konversi 57,3 persen dari produksi padi.

"Peningkatan produksi di 10 provinsi itu tentu atas sinergi Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah dengan se-

dua pihak. Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan produksi beras, di antaranya program mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, pemanfaatan lahan rawa dan di tahun 2020 ini pun Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tetap mengoptimalkan lahan rawa dan mempercepat masa olah lahan dan tanam," kata Suwandi di Jakarta.

Kementerian Pertanian sendiri melaporkan produksi beras secara nasional hingga akhir 2020 mendatang diperkirakan masih surplus.

"Perkiraan ketersediaan beras tersebut didasarkan pada produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan, serta memperhitungkan stok yang ada," pungkasnya.

Diketahui tahun lalu, Sumsel juga merupakan provinsi ke delapan penghasil beras di Indonesia yang bersaing dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Lampung. ♦rhd

MENGAPA TAJDID ATAU PEMBAHARUAN DIPERLUKAN?

Tajdid atau pembaharuan berasal dari bahasa Arab: “Jaddada-Yujaddidu-Tajdiidan” yang artinya memperbaharui. Kedalam istilah Bahasa Inggris “tajdid” sering dianalogikan dengan “modernisation” atau modernisasi, suatu terjemahan yang sangat jauh dari hakikat tajdid secara substansial.



Oleh: Dr. Muhammad Najib

Penulis adalah Pengamat Politik Islam dan Demokrasi

Secara etimologi “tajdid” dimaknai sebagai menjadikan sesuatu yang lama/qadim menjadi baru/jadid kembali. Dalam konteks ini, tajdid memberikan penekanan pada aspek pemurnian atas sesuatu yang telah terkontami-

nasi atau ternodai.

Sedangkan “tajdid” secara terminologi dimaknai sebagai menghidupkan/ihya’ atau menegakkan kembali nilai-nilai Islam yang telah luntur, terlupakan, atau tidak sesuai dengan keadaan.

Termasuk dalam konteks ini, bagaimana memaknai nilai-nilai Islam sesuai perkembangan zaman, khususnya terhadap berbagai perubahan yang terjadi akibat kemajuan sains dan teknologi. Itulah sebabnya tafsir atas Al Qur’an maupun interpretasi hadist dari waktu ke waktu bisa berubah, atau mengalami perluasan maupun pedalaman makna.

Dorongan untuk melakukan pembaharuan dalam Islam berpijak pada hadits Nabi yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus untuk umat ini setiap awal seratus tahun orang yang memperbaiki agamanya.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud).

Hadits lain terkait masalah ini adalah ketika sahabat Nabi bernama Muadz ibn Jabal saat hendak diutus Rasulullah ke Yaman, Nabi bertanya: Apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya? Muadz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan Al Qur’an.

Nabi bertanya lagi: Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al Qur’an? Muadz menjawab: Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya: Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur’an? Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan seksama.

Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoi-Nya.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Jika pada hadits pertama memberikan penekanan pada aspek waktu, setidaknya setiap 100 tahun diperlukan pembaharuan, maka pada hadits kedua mengingatkan perlunya ijtihad baik secara individual maupun kelompok untuk menghidupkan dan merelevankan ajaran Islam untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia.

Di samping merujuk pada dua hadits di atas, sejumlah ulama juga memandang diutusnya para nabi dan rasul secara berantai, tidak bisa dilepaskan dari fungsinya sebagai pengejawantahan



semangat tajdid atau pembaharuan, dimana nabi-nabi atau rasul-rasul yang datang belakangan berfungsi memperbaharui ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya.

Setelah Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir, maka tugas pembaharuan berada di pundak para ulama sebagai pewaris misi para nabi.

Para ulama kemudian memilah wilayah tajdid atau pembaharuan menjadi dua: Pertama, terkait pemahaman terhadap nilai-nilai. Termasuk dalam wilayah ini adalah bagaimana melakukan reinterpretasi terhadap ayat Al Qur'an atau Hadits, sesuai dengan perkembangan zaman.

Kedua, terkait dengan amaliah. Termasuk dalam wilayah ini adalah bagaimana melakukan pembaharuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Wilayah yang dikenal dengan istilah ibadah gairu mahdhah.

Jika semangat ini terus digelorakan

Setelah Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir, maka tugas pembaharuan berada di pundak para ulama sebagai pewaris misi para nabi.

dan diamalkan secara sungguh-sungguh, maka peradaban Islam akan terus maju dan berkembang, serta umat Islam tidak akan tertinggal dalam bidang apapun dibanding umat lain. Wallahua'lam. ♦



Peringati Harganas 2020

BKKBN CATAT REKOR MURI

Imbas penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia yang dimulai pada bulan Maret 2020 mempengaruhi berbagai aspek tak terkecuali pada pelayanan program Keluarga Berencana (KB). Berbagai kebijakan pun dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk terus menggenjot peningkatan kesertaan ber-KB tersebut untukantisipasi terjadinya baby boom di masa yang akan datang demi kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ini baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor di seluruh Indonesia. Dengan segala keterbatasan upaya dan kondisi yang ada, kegiatan ini pun akhirnya berhasil meraih rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) dengan keberhasilan melakukan pelayanan sejuta lebih akseptor KB di seluruh tanah air, dalam sehari.

"Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 27 Tahun 2020 ini masih di dalam masa pandemi Covid-19, walaupun terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, BKKBN tetap harus bisa lebih dekat dengan masyarakat, dalam arti bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu gerakan "Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor" yang BKKBN selenggarakan pada Senin, 29 Juni 2020 menjadi bagian dari bentuk peringatan atau perayaan Harganas yang dilaksanakan dengan lebih dekat kepada masyarakat," kata Kepala BKKBN, dr. Hasto

Salah satunya adalah melalui momentum peringatan Harganas ke 27 Tahun 2020 BKKBN berinisiatif untuk melakukan

Wardoyo, Sp. OG(K) pada konferensi pers memperingati Harganas di Pos Peman-tauan pelayanan KB serentak sejuta akseptor, Jakarta, Senin (29/06)

Melalui kegiatan ini, lanjutnya, diha-rapkan beberapa target sasaran strategis BKKBN dapat tetap diwujudkan dengan mempertimbangkan pendekatan budaya kearifan lokal serta tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Co-vid-19 yang berlaku.

Pelayanan KB sejuta akseptor dilak-sanakan serentak di seluruh Indonesia pada pukul 08.00 waktu setempat s/d 15.00 dan akan dilakukan pencatatan Rekor MURI, dengan target layanan sejumlah 1.373.902.

"Hal ini merupakan upaya BKKBN untuk menghadapi implikasi dari kondisi pande-mi COVID-19, yakni terjadi pengurangan kunjungan masyarakat kepada fasilitas kesehatan. Fenomena ini tentunya berakibat pada penurunan jumlah peserta KB aktif maupun peserta KB baru yang ingin mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui fasilitas kesehatan," untkannya.

Selain berimbas pada penurunan pe-serta KB, penyebaran wabah Covid-19 juga berakibat kepada penurunan aktivitas dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKS) serta penurunan mekanisme operasional di lini lapangan, termasuk di Kampung KB: Pertemuan Pokja dan Pemantauan oleh OPD-KB tidak bisa optimal.



MC

"Hal ini merupakan upaya BKKBN untuk menghadapi implikasi dari kondisi pandemi COVID-19, yakni terjadi pengurangan kunjungan masyarakat kepada fasilitas kesehatan. Fenomena ini tentunya berakibat pada penurunan jumlah peserta KB aktif maupun peserta KB baru yang ingin mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui fasilitas kesehatan," untkannya.

Hal ini bukan tanpa alasan, tentu banyak para akseptor KB yang merasa takut ketika hendak mengakses pelayanan KB di masa pandemi Covid-19 ini.

"Pelayanan KB yang sangat berdampak akibat wabah Covid-19 ini dikarenakan KB sendiri pelayanannya yang ada sekarang (*existing*) adalah dengan Baksos, sosialisasi oleh Penyuluh Keluarga Berencana, dan juga kader-kader. Jadi sangat *full* kontak atau *people to people contact* atau *person to person*. Sehingga ketika ada *physical distancing* atau *social distancing* maka





BKKBN telah mendaftarkan akun secara resmi sehingga dapat menggunakan unlimited data yang masuk, dengan update data setiap 30 menit atau paling lama 60 menit.

jelas akan menurun pelayanan itu," jelas Hasto.

Pemantauan pelayanan KB sejuta akseptor dilakukan di Ruang Serbaguna I Kantor Pusat BKKBN, melalui *dashboard*

yang memperlihatkan hasil *quick count* secara *realtime*, dapat dipantau juga secara langsung oleh masyarakat melalui live stream Youtube BKKBN OFFICIAL. Quick count menggunakan aplikasi yang dikembangkan Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN, dengan basis aplikasi Ko-BoToolBox dari UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) yakni badan PBB yang menangani urusan kemanusiaan.

BKKBN telah mendaftarkan akun secara resmi sehingga dapat menggunakan unlimited data yang masuk, dengan update data setiap 30 menit atau paling lama 60 menit. Pengumpulan dan pelaporan data secara langsung ditempat pelayanan KB dilakukan oleh Penyuluh KB (PKB), Petugas Lapangan KB (PLKB), Kader IMP, Petugas Faskes KB dan Operator Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia.

Tempat pelayanan KB sejuta akseptor dilakukan di Puskesmas (diutamakan Puskesmas Rawat Inap), Praktek Mandiri



Bidan (PMB), Kunjungan Rumah, Rumah Sakit/Faskes dan Pelayanan KB Bergerak. Pelayanan berupa pelayanan KB baru (termasuk KB Pasca persalinan), KB ulangan dan KB ganti cara.

Jenis Pelayanan KB terdiri dari Pil, Kondom, Suntik, IUD, Implan, MOW dan MOP dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan, kondisi zona wilayah dan protokol pelayanan pada masa Pandemi Covid-19. Dalam kegiatan tersebut BKKBN juga sekaligus memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) bagi bidan untuk mendukung pelayanan kontrasepsi.

Hasil capaian *quick count* diumumkan dalam Siaran Langsung peringatan Hari Keluarga Nasional Ke 27 Bangsa Indonesia di *Televisi Republik Indonesia (TVRI)* Senin malam (29/06).

Hasil *quick count* hingga pukul 22.00 WIB "Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor" mendapatkan jumlah 1.355.294. *Quick count* akan dilanjutkan sampai tanggal 30 Juni 2020 hingga seluruh

data akseptor yang terlayani masuk ke server data BKKBN.

Capaian ini mendapatkan Penghargaan Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) "Pelayanan KB Secara Serentak Dengan Akseptor KB Terbanyak" karena telah melakukan pelayanan KB serentak dengan jumlah akseptor lebih dari 1 juta dalam waktu sehari. Penghargaan secara langsung diserahkan oleh Awan Rahargo perwakilan dari MURI kepada Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.

"Puji syukur Alhamdulillah rencana untuk mendapatkan 1 juta akseptor dalam waktu sehari bisa tercapai, terimakasih kepada teman-teman BKKBN Pusat dan seluruh Indonesia, Bidan-bidan, Penyuluh KB, PLKB, Gubernur, Bupati, Walikota, Dandim, Kapolres, Camat dan semua yang sudah bekerja keras hari ini, semua telah bergerak bersama pada hari ini, dan terimakasih untuk penghargaan dari MURI, semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semua," pungkas Hasto. ♦



Mensos Juliari

REALISASIKAN JANJII JOKOWI UNTUK KORBAN LONGSOR BOGOR

Menteri Sosial Juliari P. Batubara merealisasikan janji Presiden Joko Widodo kepada korban tanah longsor di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.

Mensos mengunjungi warga korban tanah longsor untuk menyerahkan langsung bantuan jaminan hidup (jadup) kepada sebanyak 4.188 KK atau 12.403 Jiwa senilai 3,72 milyar.

"Ini adalah realisasi kepada rakyat di Kecamatan Sukajaya, khususnya dari 4 desa yang terdampak bencana alam longsor," pa-

par Ari sapaan akrab Mensos saat penyaluran bantuan tersebut, baru-baru ini.

Yang saya ingat, lanjut Mensos saya juga pada saat beberapa hari setelah bencana tersebut ikut mendampingi Bapak Presiden ke lokasi ini di bawah sana, di dekat Puskesmas kalo tidak salah, pada saat itu belum bisa naik, sampai sini belum bisa, masih tertutup tanah longsor semua.



“Bahkan pada saat Bapak Presiden ke sini, keadaan juga sedang hujan saat itu, sehingga memang kita ikut ngeri-ngeri sedap juga. Ini ada Presiden, beberapa Menteri, semuanya tumpul di sini, saya bilang ayo kita buruan, buruan, gitu”, ujar mantan anggota DPR dua periode mengenang kejadian saat itu.

Penyerahan jadup tersebut bersamaan dengan peresmian 1.753 hunian sementara oleh Bupati Bogor Ade Yasin, hadir juga Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Pepen Nazarruddin dan Komandan Korem 061/Surya Kencana Brigjen. TNI Agus Subiyanto.

Mensos juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bogor dan Danrem 061 yang telah membantunya merealisasikan janji Presiden Joko Widodo.

“Terima kasih, Ibu Bupati dan jajarannya, dan juga Pak Danrem yang sudah merealisasikan komitmen Bapak Presiden untuk warga yang terdampak di hunian sementara ini. Mudah2an nanti bisa bermanfaat untuk seluruh warga yang terdampak, dan

MC *Yang saya ingat, lanjut Mensos saya juga pada saat beberapa hari setelah bencana tersebut ikut mendampingi Bapak Presiden ke lokasi ini di bawah sana, di dekat Puskesmas kalo tidak salah, pada saat itu belum bisa naik, sampai sini belum bisa, masih tertutup tanah longsor semua.*

juga InsyaAllah nanti pembangunan hunian bisa segera diselesaikan, segera saudara-saudara kita bisa menempati hunian tetap tersebut,” ungkap bapak dua anak itu.

Mensos juga mengingatkan kepada Bupati Bogor agar mengkaji daerah-daerah yang rawan bencana, “Saya kira dibuat suatu kajian yang mendalam untuk beberapa daerah yang rawan longsor,” kata Mensos.

“Artinya, walaupun tidak mudah di lapangan, apakah memang daerah-daerah tersebut masih layak untuk dihuni, karena kalau daerah tersebut masih dihuni, bahkan jumlahnya banyak, sampai kapanpun akan terus terjadi bencana alam yang merenggut korban. Boleh saja ada bencana alam, itu suatu yang pasti di Indonesia, tapi kalau tidak ada warga yang menghuni kerugiannya, khususnya kerugian jiwanya bisa diminimalisasi,” terang Mensos.

Seperti diberitakan peristiwa bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Januari 2020 yang lalu akibat hujan yang berintensitas tinggi pada 4 kecamatan di wilayah Kabu-

paten Bogor yaitu Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Jasinga.

Bencana ini telah merenggut 16 korban jiwa dan menyebabkan ribuan jiwa mengungsi karena kerusakan rumah. Melihat hal ini, Kemensos telah melakukan beberapa langkah penanganan darurat dan penyaluran bantuan sosial antara lain Pengerahan Tagana untuk melakukan aktivitas penanganan darurat bencana dan pelayanan dapur umum dan dukungan Psikososial yang dilakukan oleh Tagana.

Mensos juga memaparkan bahwa ketika terjadi bencana, Kemensos telah mengirimkan berbagai bantuan senilai 2,67 milyar.

"Di luar itu, pada saat bencana, kita juga sudah pernah mengirimkan beberapa bantuan logistik, santunan ahli waris, juga sembako yang nilainya sekitar 2,67 miliar rupiah," ungkap Mensoa.

"Jadi, kalau ditotal mungkin dari kami selama bencana sampai sekarang sudah sekitar 6,4 miliar rupiah yang kami berikan di Kecamatan Sukajaya, khususnya di empat desa yang terdampak ini," tandasnya.

Usai menyerahkan bantuan jadup,



Mensos dan rombongan meninjau langsung hunian sementara untuk memastikan kondisinya layak untuk dihuni. Mensos juga memastikan sumber air yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.

Sambil memutar kran air di kamar mandi umum, Mensos menyatakan bahwa air di hunian sementara sangat berlimpah. "Wah ini airnya berlimpah sekali dan airnya juga sangat bening, saya kira layak untuk kebutuhan sehari-hari," katanya.

Sementara Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin mengatakan bahwa bantuan jaminan hidup disalurkan bekerja sama dengan Bank Mandiri dengan mekanisme non tunai.

"Kemensos menyalurkan jaminan hidup dengan non tunai, mereka dibukakan rekening dan di kasih ATM, tujuannya adalah agar bantuan sampai ke penerima utuh sesuai dengan haknya," jelas Pepen.

Salah satu penerima bantuan jaminan hidup, warga Kampung Nyomplong, Kecamatan Sukajaya Agus Maulana langsung mencairkan di gerai Mandiri yang telah disiapkan oleh pihak bank.

"Alhamdulillah saya dapat bantuan sebesar sejuta lima ratus dari Menteri Sosial. Ya bantuan ini akan saya gunakan untuk kebutuhan pokok, sama biaya sekolah untuk pesantren," ungkap Agus bersyukur. ♦





ANDA INGIN

BERLANGGANAN

3 EDISI (3 BULAN) RP 125.000,- 6 EDISI (6 BULAN) RP 250.000,- 12 EDISI (12 BULAN) RP 500.000,-



(021) 791 96781
(021) 791 96786



**HUBUNGI: PROMOSI/SIRKULASI
PT. INTER MEDIA DIGITAL**

Jalan Raya Kalibata No. 8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

EMAIL : moeslimchoice@gmail.com

WEBSITE: www.moeslimchoice.com

FACEBOOK : moeslimchoice

TWITTER : @moeslimchoice



BRS Watunas Mulya Jaya

MENGEMBALIKAN HARKAT DAN MARTABAT YANG TERAMPAS

Balai rehabilitasi sosial merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting di negeri ini. Apa lagi di masa pandemi Covid-19 yang saat ini tengah terjadi. Kehadiran dan peranan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial ini tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak sosial akibat wabah tersebut.

Salah satu balai rehabilitasi sosial yang mengemban peran penting tersebut adalah Balai Rehabilitasi Sosial (BRS) Watunas Mulya Jaya Jakarta. Di masa pandemi ini, balai tersebut berfungsi sebagai *temporary shelter*. Namun layanan regularnya yang khusus menampung wanita-wanita penyandang masalah juga tetap berjalan.

Kepala BRS Watunas Mulya Jaya,

Juena Br. Sitepu, S.Sos, M.Si memaparkan sejauh ini balai yang dipimpinnya menampung para eks wanita tuna susila, korban perdagangan manusia (*human trafficking*), dan korban tindak kekerasan seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Selain itu, Balai ini juga menampung masyarakat yang terpapar teroris yang merupakan titipan dari BNPT (Badan Na-

sional Penanggulangan Teroris) dan ada juga mereka dari orang yang hidup di jalan yang di antaranya pemulung.

Saat ditampung balai para penghuni diberikan beberapa pelatihan. Dengan pelatihan tersebut diharapkan setelah keluar dari balai dan dikembalikan ke keluarganya, mereka bisa menjadi lebih baik dan mandiri.

"Tujuan rehabilitasi sosial yang dilaku-

kan balai adalah perubahan perilaku. Dengan pendekatan secara spiritual dan juga memberikan beberapa keterampilan kepada para PP (Penerima Pelayanan), kami berharap saat mereka kembali ke keluarga masing-masing mereka sudah bisa mempunyai penghasilan. Itulah tujuan kami memberikan pelatihan sosial ekonomi kepada para PP. Kami ingin mengangkat harkat dan martabat mereka," kata Juena saat ditemui *Moelimchoice* di baru-baru ini.

Dalam membina penghuni, lanjut dia, Balai yang berada di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur ini menjalankan empat program terapi. Pertama, Terapi Fisik. Terapi ini terdiri dari pemeriksaan kesehatan dan kegiatan olahraga.

Pemeriksaan kesehatan terdiri dari pengukuran tensi, tinggi badan, berat



Saat ditampung balai para penghuni diberikan beberapa pelatihan. Dengan pelatihan tersebut diharapkan setelah keluar dari balai dan dikembalikan ke keluarganya, mereka bisa menjadi lebih baik dan mandiri.

badan, tes uji darah (HIV AIDS), pemeriksaan ims, dan konsultasi kesehatan. Hasil dari pemeriksaan kesehatan akan menentukan masa rehabilitasi pelayanan yang diberikan kepada penerima pelayanan.

Kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari Senin dan Jumat. Kegiatan ini dibina oleh instruktur dan didampingi pekerja sosial. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini untuk menjaga kebugaran serta kesehatan penerima pelayanan selama berada di dalam balai.

Kedua, Terapi Mental Spiritual. Terapi ini diberikan kepada penerima pelayanan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari para penerima layanan. Dalam menjalankan program ini salah satunya BRS Watunas Mulya Jaya bermitra dengan daruttauhid.

"Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari



dengan sholat lima waktu berjamaah, pembelajaran mengenai agama di dalam kelas, tausyiah, seni kasidah. Kita juga mengadakan ruqiyah sebagai salah satu bagian dari terapi," ujar Juena.

Yang ketiga, Terapi Psikososial. Terapi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan intervensi dan moti-

vasi kepada penerima pelayanan melalui bimbingan sosial yang terdiri dari penyuluhan social, terapi kelompok, group session, dan konseling.

Di sesi ini balai kerap menghadirkan testimony dari eks PM yang sudah sukses sebagai motivasi kepada penghuni balai.

"Kami mengundang mereka untuk

menceritakan story suksesnya selama mengikuti pelatihan di balai sebagai salah satu cara memberikan semangat kepada teman di dalam balai agar termotivasi," ungkap Juena.

Salah satu eks PM BRS Watunas Mulya Jaya diantaranya adalah Lita mantan TKW (Tenaga Kerja Wanita) asal dari Indramayu. Eks TKW di Taiwan ini mengalami stres, kemudian dipulangkan ke Indonesia tanpa membawa uang sepeserpun.

"Ia kemudian dirujuk ke balai kami dan alhamdulillah dia kembali sehat. Kemudian kami antar pulang ke Indramayu sana, kami bekali modal awal Rp 5 jt. Sekarang dia sudah punya usaha beberapa pom bensin mini dan juga membangun beberapa kontrakan," cerita Juena.

Sedangkan yang ke empat, lanjutnya, adalah *Livelihood Therapy* (Terapi Kehidupan). Program ini diisi dengan pelatihan menjahit, membordir, kerajinan tangan

(*handycraft*), olahan pangan (memasak dan membuat kue), tata rias pengantin dan salon kecantikan.

"Bagi para penghuni balai yang mempunyai skill dan semangat akan diberikan bantuan modal tapi tetap dengan pengawasan, sehingga apabila mereka keluar dari Balai mereka dapat hidup layak dan mandiri," ungkap Juena,

Terkait jenis pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada para penghuni balai, Juena mengungkapkan bahwa, semua berdasarkan penilaian ketika mereka masuk. Begitu pula dengan jeda waktu lama mereka berada di balai.

"Ada yang harus berada di balai selama dua minggu, dua bulan, hingga empat bulan. Semuanya ada penilaiannya. Sehingga hasilnya terukur dan maksimal," ujar Juena.

Terkait target layanan, di tahun 2020 ini BRS Watunas Mulya Jaya menargetkan

mampu melayani sebanyak 100 PP setiap gelombangnya, baik di dalam balai dan di luar balai.

"Selain itu kita juga menargetkan 85 kegiatan kemandirian setiap bulannya bagi para Eks PM dan juga rujukan dari LKS," ungkapnya.

Dalam tiga tahun terakhir ini, BRS Watunas Mulya Jaya sudah melayani 524 wanita mantan eks pekerja tuna susila, korban KDRT, dan eks *human traffic* (perdagangan orang).

Juena berharap dengan program yang dijalankan tersebut, setiap wanita yang sudah dibina di BRS Watunas Mulya Jaya, mampu menjadi garda terdepan untuk melindungi keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Mereka harus bisa *fight* dan mandiri secara ekonomi serta sosial.

"Saya berpesan kepada penghuni para penghuni balai dan seluruh wanita Indonesia, kita sebagai perempuan harus pu-



nya keterampilan. Ketika suami kita tidak bisa berbuat apa-apa kita sebagai perempuan harus maju sebagai penopang keluarga kita terutama untuk pendidikan dan masa depan anak-anak kita sebagai penerus bangsa," ungkap Juena.

Sementara itu, Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial, Edi Santoso menerangkan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sejauh ini BRS Watunas Mulya Jaya telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.

Sejauh ini pihaknya telah menjalin kemitraan yang sangat baik dengan dinas sosial kabupaten/kota/provinsi, Polda Metro Jaya, lembaga kesejahteraan sosial (LKS), LPK (Lembaga Pelatihan Keterampilan), *Non-Government Organization* (NGO), *International Organization of Migration*, Poltek Kesos Bandung, Universitas Muhammadiyah Jakarta, BNPT, dan beberapa *stakeholder* terkait lainnya.

"Untuk saat ini BRS Watunas Mulya Jaya telah bekerjasama dengan 15 LKS yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat (Majalengka, Indramayu, Sukabumi), Jawa Tengah (Semarang), Jawa Timur (Blitar, Madiun, Kediri), dan Riau," papar Edi.

BRS Watuna Mulya Jaya juga menerima rujukan. Sesuai dengan Undang-Undang (UU), ada pembagian tugas di Kemensos. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dasar sedangkan lembaga Balai melakukan pelayanan lanjutan.

"Proses penerimaan rujukan dibuka setiap bulan Februari dan April. Kami terus melakukan sosialisasi kepada *stakeholder* mengenai hal ini," papar dia.

Sementara terkait kendala, Edi mengungkapkan bahwa pihaknya perlu adanya peningkatan dari aspek sarana dan prasarana guna menunjang kinerja balai agar lebih maksimal. Misalnya sarana komputerisasi yang mesti di dukung dengan perangkat *hardware* yang memadai.

Selain itu perlu adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) dan peningkatan kualitas mereka. Untuk tenaga psikolog misalnya, hingga ini BRS Watunas Mulya Jaya baru memiliki 1 orang.

"Jumlah ini kurang memadai, karena balai kami banyak menangani eks wanita tuna susila dan korban KDRT yang tingkat problem psikologi mereka lebih berat," papar Edi.

Begitulah pula dengan kebutuhan akan tenaga bimbingan mental dan pembimbing kewirausahaan. Saat ini BRS Watunas Mulya Jaya belum memiliki tenaga pembimbing tetap di dua bidang tersebut.

Kekurangan juga terdapat di tenaga pekerja sosial (Peksos). Saat ini satu para

IKUT AMBIL BAGIAN DALAM PENANGAN PANDEMI COVID-19

Balai Rehabilitasi Sosial Watuna Mulya Jaya juga ikut ambil peran dalam penanganan pandemi Covid-19. Selain menjalankan program reguler, balai ini juga berfungsi sebagai *temporary shelter*.

"Selama pandemi pelayanan reguler dan *temporary* dijalankan secara bersamaan. Semuanya tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Persyaratannya, mereka yang datang harus dengan rapat test dan test kesehatan," kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos) Kementerian Sosial, Harry Hikmat disela-sela kunjungan ke balai tersebut, baru-baru ini.

BRS Watunas Mulya Jaya merupakan balai rehabilitasi khusus untuk wanita. Sejauh ini mereka telah menampung para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terdampak pandemic Covid-19. Selain itu terdapat gelandangan dan pemulung yang ditemukan Satpol PP di jalan protokol ibukota.

"Di masa pandemi ini, penghuni balai ini sebagian dari mereka adalah korban PHK termasuk kemarin ada pekerja migrant (TKW) dari Malaysia dan Turki. Mereka bukan saja kehilangan pekerjaan tapi mereka juga kehilangan tempat tinggal. Sebagian dari mereka tadinya menempati tempat penampungan sementara seperti GOR (Gelanggang Olahraga) yang berada di wilayah DKI Jakarta," tambah Harry.

Di BRS Watuna Mulya Jaya, lanjutnya, para penyandang masalah sosial tersebut diarahkan mengikuti program yang telah disiapkan balai. Selain itu mereka juga mendapatkan bantuan sosial dari program Bansos Covid-19. Bantuan yang diberikan ada pula dalam bantuan sosial tunai.

"Diharapkan setelah keluar dari balai ini, para PM bisa mengembangkan diri sehingga mampu berdaya secara social dan ekonomi," ujar Harry. ♦



peksos harus melayani 10 penerima pelayanan. Kondisi tersebut kurang begitu ideal. Apa lagi jika jumlah penerima pelayanan meningkat seperti pada masa pandemic Covid-19 saat ini.

"Jika semua kekurangan tersebut dapat dipenuhi, insha Allah harapan para wanita penghuni balai ini bisa mandiri dan berdaya guna secara ekonomi sosial, bisa lebih maksimal lagi direalisasikan," ungkap Edi.

Saat ini BRS Watunas Mulya Jaya memiliki 47 ASN (Aparatur Sipil Negara), 18 tenaga honorer, 14 orang Peksos. Se-

dangkan untuk mendatang instruktur profesional pihak balai bekerja sama dengan LPK.

Fasilitas yang dimiliki yakni ruang kantor, gedung keterampilan, asrama, ruang konsultasi, ruang perpustakaan, aula, lapangan olahraga, poliklinik dan mushola.

"Kami pun memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk bisa menikmati fasilitas yang ada. Bahkan kami juga memberi kesempatan mereka untuk ikut mengikuti program dan belajar di balai," tandas Edi. ♦



Ketua MPR, Bamsuet

PERLU DIKEMBANGKAN DIGITALISASI PEMILU

Memasuki pola hidup baru atau *new normal*, semua bidang kehidupan perlu melakukan penyesuaian. Tak hanya di bidang kesehatan, sosial atau ekonomi saja. Bidang politik pun perlu dilakukan dengan gaya baru.

"**C**ontohnya Pemilu atau pilkada. Sudah waktunya Indonesia mengembangkan digitalisasi dalam pelaksanaan Pemilu atau pilkada. Dalam tahap awal bisa dimulai dari Pilkada hingga berjenjang sampai ke Pilpres," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat mengisi diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad di Press Room MPR RI, Jakarta, baru-baru ini.

Sehingga, lanjutnya, jika kelak pandemi dalam bentuk lainnya kembali menimpa Indonesia, tak sampai membuat kehidupan demokrasi, khususnya hak pilih rakyat terganggu. Digitalisasi pemungutan suara

melalui barcode menjadi sebuah keniscayaan.

Selain menghemat anggaran kotak suara, bilik suara, kertas dan tinta yang jumlahnya triliunan juga efektif/ tidak perlu menunggu lama perhitungan suara yang sangat memakan biaya dan energi. "Cukup dalam hitungan menit sudah tahu hasilnya," ujarnya, Bamsuet

Mantan Ketua DPR RI ini menekankan, walaupun tak bisa dilakukan dalam waktu dekat, minimal pengembangan digitalisasi Pemilu sudah dimulai sejak sekarang. Sehingga di masa depan Indonesia bukan semata menjadi negara demokrasi terbesar dunia, melainkan juga menjadi negara

demokrasi yang inovatif.

"Akibat pandemi Covid-19, Indonesia dan berbagai negara lainnya terpaksa menunda tahapan Pemilu. Inggris Raya menunda pemilihan lokal yang seharusnya dilakukan pada Mei 2020, Italia menunda referendum pengurangan anggota parlemen 29 Maret 2020, Bolivia menunda pemilihan presiden 3 Mei 2020, serta Indonesia menunda pemilihan walikota/bupati 23 September 2020 menjadi awal Desember 2020," terangnya.

Padahal sebelumnya, bencana alam, kerusuhan, maupun peristiwa lainnya tak pernah sampai mengganggu tahapan Pemilu di berbagai negara. Pandemi yang membuat tahapan Pemilu terhenti.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menambahkan, tak hanya menguji penyelenggaraan Pemilu, pandemi Covid-19 juga menguji kualitas kepemimpinan para pengambil kebijakan di berbagai negara dunia. Tercatat sudah 215 negara terinfeksi Covid-19. Ada pemimpin yang berhasil, ada yang masih berjuang, dan ada yang menjadi bulan-bulanan rakyatnya.

Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen, dan Perdana Menteri Islandia Katrin Jakobsdottir, adalah contoh pemimpin yang dinilai berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19.

Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Brazil Jair Bolsonaro dan Presiden Meksiko Andrés Manuel

López Obrador malah menjadi bulan-bulanan masing-masing rakyatnya.

"Sedangkan Presiden Joko Widodo bersama pemimpin Asia lainnya masih terus berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Hasilnya sejauh ini cukup memuaskan, dengan semakin tingginya cakupan test swab per hari mencapai 10.000 spesimen, kini sedang ditingkatkan hingga mencapai 30.000 spesimen per hari," ungkap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, tak hanya kepemimpinan di tingkat nasional, pemimpin yang bertugas sebagai pengambil kebijakan di tingkat menteri juga mendapat banyak sorotan lantaran penanganan pandemi Covid-19.

Menteri Kesehatan Ekuador Catalina Andramuno Zeballos, misalnya, memilih mengundurkan diri tatkala jumlah positif Covid-19 di negaranya mencapai 500 orang pada 21 Maret 2020.

"Karena dinilai berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19 di Tokyo, Yuriko Koike hari ini terpilih kembali menjadi Gubernur Tokyo. Ia menjadi wanita pertama yang memimpin Tokyo selama dua periode. Hal ini menunjukkan, pandemi Covid-19 tak hanya sekadar menguji kualitas kepemimpinan di tingkat nasional negara, melainkan juga di tingkat lokal," pungkas Bamsoet. ♦



MC Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menambahkan, tak hanya menguji penyelenggaraan Pemilu, pandemi Covid-19 juga menguji kualitas kepemimpinan para pengambil kebijakan di berbagai negara dunia. Tercatat sudah 215 negara terinfeksi Covid-19. Ada pemimpin yang berhasil, ada yang masih berjuang, dan ada yang menjadi bulan-bulanan rakyatnya.





Terdampak COVID-19

PARA SELEB INI BANTING SETIR JUAL MAKANAN

Pandemi Virus Corona di Indonesia, hingga memasuki bulan ke-empat sejak kasus awal diluncurkan Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020, masih juga belum mereda. Bahkan menurut data per 1 Juli 2020, kasus positif terinfeksi di Indonesia telah menyentuh angka 57.770 kasus dengan kasus sembuh sebanyak 25.595 dan kasus meninggal sebanyak 2.934 kasus.

Padahal pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terus bertambahnya kasus Virus Corona ini. Salah satunya dengan memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang artinya masyarakat harus membatasi segala aktivitas mereka.

Di antara pembatasan yang diberlakukan melalui PSBB ini adalah penerapan social distancing atau mengurangi interaksi dengan orang lain alias menjaga jarak. Lalu juga harus memakai masker ketika berada di luar ruangan, serta tidak berkerumun atau berkumpul dengan lebih dari lima orang.

Dengan pembatasan-pembatasan

tersebut, segala bentuk aktivitas pun dialihkan. Seperti para pekerja dialihkan dari bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah (Work from Home), kemudian anak-anak sekolah dialihkan dari belajar di sekolah-sekolah atau kampus, menjadi belajar di rumah.

Begitu pula dengan tempat-tempat peribadatan, dimana ibadah (shalat) di Masjid atau Mushala dialihkan menjadi ibadah (shalat) di rumah. Itu artinya baik kantor-kantor, sekolah-



sekolah, maupun tempat-tempat ibadah ditutup.

Namun dengan berjalannya waktu, meski pandemi belum juga hilang dari bumi pertiwi, pembatasan-pembatasan mulai dilonggarkan demi menghidupkan kembali perekonomian. Baik tempat-tempat ibadah maupun pusat-pusat perbelanjaan, seperti mal, kafe, restaurant, pasar tradisional hingga tempat pariwisata telah mulai dibuka, meski dengan protokol kesehatan yang ketat.

Dengan masih adanya pembatasan-pembatasan tersebut, banyak masyarakat yang terkena imbasnya, dimana mereka menjadi kesulitan mencari nafkah, bahkan yang paling menyedihkan adalah mengalami pemutusan kerja. Yang tentu akan mempengaruhi pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tak hanya masyarakat biasa, kalangan selebritis pun mengalami hal yang sama. Imbas dari pemberlakuan PSBB ini, turut berpengaruh dalam pekerjaan seorang selebritis alias artis.

Tak sedikit dari mereka yang kehilangan job, seperti pembatalan beberapa konser musik (bagi artis penyanyi atau pemusik), penundaan syuting-syuting film (artis film dan sinetron), bahkan untuk acara-acara talk show, MC dan banyak lagi.

Untuk mengkalinya, sebagian dari mereka terpaksa banting stir dengan menjalankan beberapa bisnis online demi memutar kembali roda perekonomian mereka.

Berikut 10 Artis yang Banting Stir Buka Usaha Online di Tengah Pandemic:

ANDREW ANDIKA

Pandemi Corona yang sedang terjadi saat ini memang memberikan dampak yang cukup besar bagi sebagian orang. Banyak yang kehilangan mata pencaharian lantaran adanya PHK besar-besaran.

Pesinetron Andrew Andika pun ikut serta merasakan dampak pandemi corona. Demi tetap berpenghasilan selama pandemi, Andrew pun rela menjalani usaha.

Bersama sang istri, Tengku Dewi Putri, Andrew membuka bisnis makanan, kopi, dan online shop. Hal ini mereka lakukan agar tetap produktif di tengah pandemi corona Covid-19.

Menurut Andrew, usahanya tersebut dilakukannya agar tetap produktif walaupun di rumah. Aktor kelahiran Bandung, 10 Juli 1987 itu menuturkan, jika olahan kopinya tersebut adalah hasil racikannya sendiri. Seperti diketahui, saat ini tengah

MC *Presenter yang juga seorang desainer, Ivan Gunawan di tengah pandemic virus corona saat ini mengaku, jika bisnis butiknya yang telah dijalani selama bertahun-tahun ikut melesu akibat virus corona.*



hits kopi yang satu liter.

Andrew pun menjual kopinya dalam ukuran banyak, kemudian dimasukkan dalam botol berukuran satu liter dan dihargai Rp100.000. Nama kopinya adalah 'Kopi Rumah'.

Untuk pemesanannya bisa dilakukan melalui ojek online.

IVAN GUNAWAN

Presenter yang juga seorang desainer, Ivan Gunawan di tengah pandemic virus corona saat ini mengaku, jika bisnis butiknya yang telah dijalani selama bertahun-tahun ikut melesu akibat virus corona.

Akibatnya, Ivan pun harus memutar otak untuk membuka sebuah usaha atau bisnis. Bisnis berjualan peyek pun diambilnya sebagai bisnis alternatif.

Menurut Ivan, penjualan peyek dengan berbagai varian secara online itu cukup berjalan lancar. Bahkan omzet penjualannya mampu untuk menutupi gaji karyawan butiknya. Tak hanya itu, Ivan juga memiliki bisnis kopi kekinian.

ALESSIA CESTARO

Di tengah virus covid-19 ini pasangan artis, Alessia Cestaro dan Ahmad Affandy memang sepi job syuting. Hal itu pun dimanfaatkan keduanya untuk memilih fokus mengurus bisnis kuliner milik mereka.

Seperti diketahui, pasangan artis ini



memiliki bisnis di bidang kuliner yakni sebuah restoran dengan nama Rajabugis77.

Restoran ini menyediakan aneka makanan khas Makassar, mulai dari Coto Makassar, konro, hingga nasi goreng.

Bisnis milik pasangan artis ini juga menerima layanan pesan antar untuk mencegah keramaian dan makan di tempat. Berbeda dengan sebelumnya, saat belum ada wabah virus corona, Pasangan artis ini justru berada di pinggir jalan untuk memasarkan bisnis mereka sendiri.

Bahkan tak malu, sang suami, Ahmad Affandy langsung turun tangan di depan panasnya api dari kompor untuk menyajikan pesanan yang diminta pelanggan mereka. Penampilannya pun sangat berbeda 180 derajat dari biasanya saat tampil di layar kaca.

Ahmad tampak mengenakan kaus oblong warna hitam saat sedang menunjukkan kebolehannya dalam hal masak-memasak.

Selain bisnis rumah makan, pasangan Alessia dan Ahmad juga sukses sebagai distributor cemilan bernama Dorokdok Viral. Usahanya tersebut terbilang sukses, karena telah memiliki banyak patner dalam penjualan produk cemilan tersebut.

PINKAN MAMBO

Penyanyi berusia 39 tahun ini kini mengaku tengah fokus menjalankan usaha di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Pinkan terpaksa membuka usaha tersebut lantaran kebutuhan finansial saat menghadapi masa pandemic seperti sekarang ini.

Wanita bernama panjang Pinkan Ratnasari Mambo ini, kini membuka usaha Rumah Makan dan Laundry demi mencukupi kebutuhan keenam anaknya.

Untuk laundry, Pinkan mematok harga sesuai harga pasaran di sekitar tempat tinggalnya. Untuk cucian seberat 5 kilogram akan dipatok sebesar Rp 45.000, itu hanya cuci, kering, dan lipat. Sementara jika ingin disetrika maka harganya bertambah Rp 10.000, hingga menjadi Rp 55.000.

Sementara untuk usaha Rumah Makan atau Katering. Menurut wanita berdarah Jawa, Sunda dan Minahasa itu, bahwa makanan yang dijualnya merupakan produk hasil olahan sendiri alias home made,. Karena saat ini masih belum diperkenankan membuka restoran, maka Pinkan memutuskan untuk mengantar makanan ke rumah si pemesan.

Pinkan mengaku terpaksa membuka bisnis makanan dan laundry ini untuk bertahan hidup selama masa pandemi Covid-19.



Menurut pelantun lagu Kekasih Yang Tak Dianggap ini, bahwa rencana membuka bisnis makanan dan laundry ini sebenarnya sudah lama, sebelum wabah virus corona masuk

Indonesia. Cuma waktu itu belum merasa

butuh, sehingga Pinkan tak terlalu serius untuk membuka bisnisnya.

MC Untuk laundry, Pinkan mematok harga sesuai harga pasaran di sekitar tempat tinggalnya. Untuk cucian seberat 5 kilogram akan dipatok sebesar Rp 45.000, itu hanya cuci, kering, dan lipat. Sementara jika ingin disetrika maka harganya bertambah Rp 10.000, hingga menjadi Rp 55.000.

ANWAR SANJAYA

Selama pandemi corona, presenter Anwar Sanjaya mengaku banyak pekerjaannya yang tertunda. Bahkan ada honor syuting yang belum cair, hingga penghasilannya pun semakin merosot. Menurutnya, jika tidak kerja maka pemasukan pun tidak ada.

Sejumlah pekerjaan Anwar seperti syuting, off-air, hingga endorse ditunda. Kini, pria 26 tahun itu pun banyak menghabiskan waktunya di rumah.

Meski hanya di rumah, Anwar mengisi kegiatannya dengan hobinya, memasak. Dia pun gemar membagikan aktivitasnya di YouTube dan Instagram pribadi.

Melihat banyak rekan artis yang banting setir berjualan makanan untuk bertahan di tengah pandemi, Anwar pun



ikut menjajal usaha di bidang kuliner itu demi untuk menambah penghasilan.

Sebagai jebolan Master Chef Indonesia, Anwar mengandalkan kemampuannya untuk memasak dan berjualan kue cucur.

Anwar bersyukur karena kue cucur buaatannya mendapat respons positif dari publik. Dia berharap, keuntungan berjualannya ini bisa memenuhi kebutuhan ke depan.

AYU TING TING

Pedangdut Ayu Ting Ting pun turut terkena imbas pandemi corona. Pelantun Alamat Palsu itu harus menunda sejumlah acara off air dan konser yang seharusnya digelar pada Maret 2020.

Hanya berdiam diri di rumah, rupanya tak membuat ibunda Bilqis ini kehabisan ide. Sebaliknya, Ayu makin kreatif. Dia pun mencoba peruntungannya untuk menambah penghasilan dengan menjual bakpao hasil kreasinya sendiri yang diberi nama Bakpao Viral dan menjualnya secara online.

Ayu pun menuturkan, bahwa Bakpao Viralnya tersebut untuk saat ini hanya tersedia hanya yang isi cokelat. Tapi dia berjanji, untuk selanjutnya akan banyak variasi untuk isi bakpao viralnya tersebut.





IBNU JAMIL

Dampak Pandemi virus corona atau Covid-19 telah membuat banyak orang berkurang pendapatannya lantaran roda

perekonomian tak berjalan lancar. Hal tersebut juga dirasakan oleh pesinetron Ibnu Jamil.

Ibnu menyatakan, bahwa pekerjaannya di dunia entertainment telah berhenti dan jadwal syuting banyak yang ditunda. Tak ingin terus terpaku dengan situasi saat ini, Ibnu Jamil pun memutuskan untuk membuka usaha makanan.

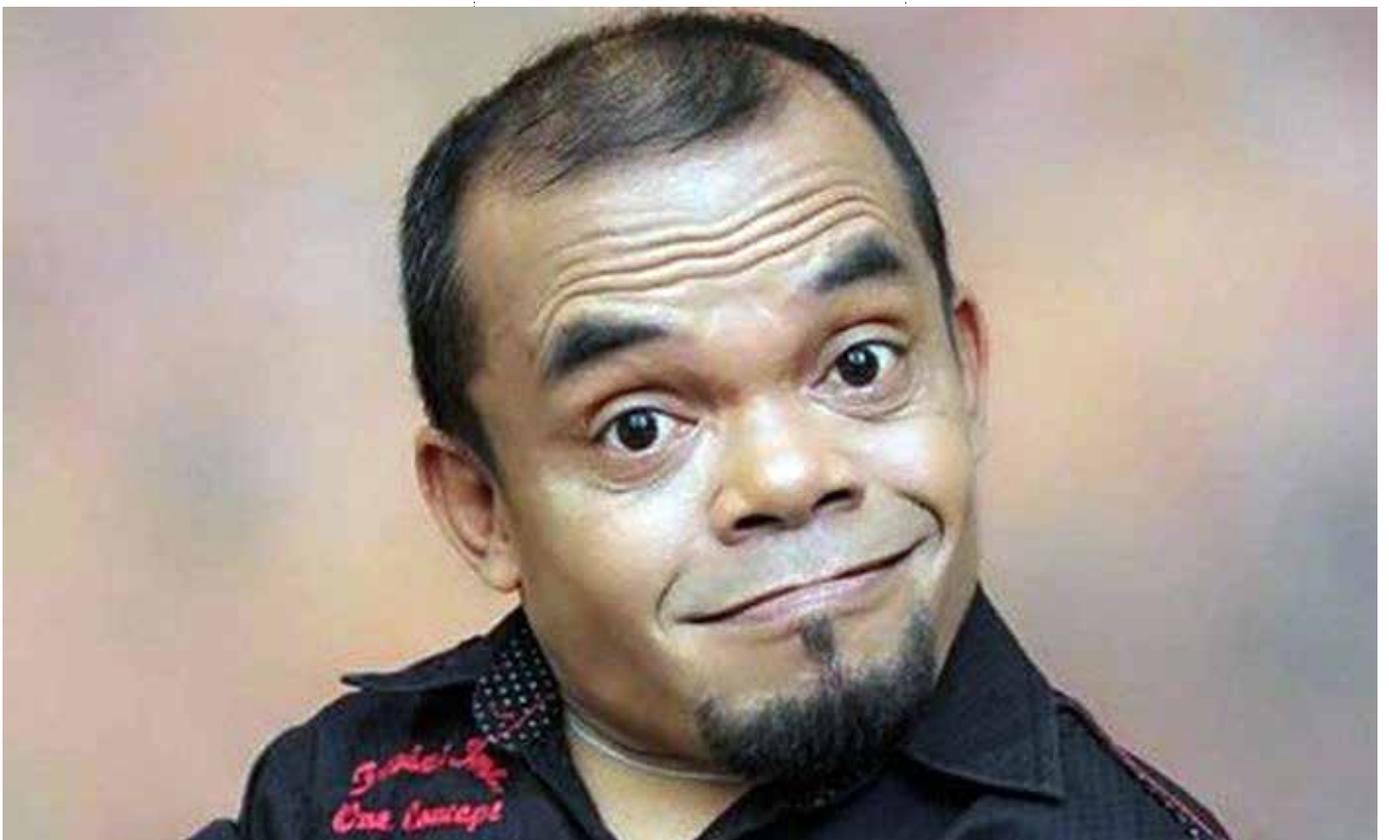
Pesinetron yang punya hobi makan mie ini pun akhirnya memutuskan membuka usaha kuliner Mie Ayam yang diberi nama 'Mie Ayam Mantap John'.

UCOK BABA

Aktor Ucok Baba juga tak mau kalah. Di tengah mewabahnya virus corona, Ucok memanfaatkan waktu dengan banyak di rumah dengan berbisnis makanan.

Pria bernama asli Usnan Batubara ini menawarkan makanan yang sangat menarik yaitu 'Durian Medan'. Seperti halnya Karina Suwandi yang menawarkan produk makanannya di media social, Ucok pun melakukan hal yang sama. Ucok menawarkan produk makanannya melalui akun Instagram pribadinya @ucokk.baba.

Ucok memberikan beberapa paket promo untuk para pelanggannya. Bahkan dirinya menawarkan masker dan hand sanitizer gratis untuk pelanggan yang membeli produknya dengan nominal tertentu.





EPY KUSNANDAR

Pandemi Virus Corona atau Covid-19 dirasakan oleh semua orang, tak terkecuali aktor Epy Kusnanda. Pemeran Kang Mus dalam sinetron komedi 'Preman Pensiun' ini turut terkena imbas Virus Corona.

Selama masa PSBB, Epy Kusnandar pun tak bisa berkegiatan syuting lantaran dihentikan sejak virus corona merebak. Untuk membuat dapurnya tetap ngebul, Epy pun banting stir berjualan bersama sang istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sejak Corona merebak, Epy mengaku jika dirinya hanya berdiam di rumah. Hal ini sesuai anjuran pemerintah yang meminta masyarakat untuk berdiam di rumah.

"Saya banyak diem aja di rumah. Aduh saya harus ngapain ini yah. Dari situlah saya sebagai suami ngedrop. Saya bagaikan suami yang tak dianggaph. Nah disitulah saya bermunajat berdoa," kata Epy.

Bersama sang istri, Karina Ranau, Epy memilih untuk berjualan. Apalagi sang istri memang hobi memasak.

"Kalau saya sih balik lagi emang seneng hobi masak lagi jualan. Karena dari kecil SD, di kampung saya suka jualan. Apalagi pas ada PSBB, ya mau ngapain lagi. Terus kita punya tempat, engga ngapa-ngapain, terus saya juga semangat ya didukung juga sama Kang Epy," kata Karina Ranau.

Meski hasil dari jualan tidak besar, na-

MC

Selama masa PSBB, Epy Kusnandar pun tak bisa berkegiatan syuting lantaran dihentikan sejak virus corona merebak. Untuk membuat dapurnya tetap ngebul, Epy pun banting stir berjualan bersama sang istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

mun Epy dan sang istri bersyukur karena bisa mencukupi kebutuhan lebaran.

"Nambah-nambah jajan sama beli ketupat kemarin lebaran," kata Karina Istri Epy sendiri diketahui memiliki sebuah warung makan. Epy pun kerap membantu sang istri turun ke dapur.

"Paling bantu nyuci piring sama nemenin anak. Selama PSBB in kan saya mau ngapain lagi. Kebetulan ada warung, jadi selama PSBB kemarin jualan," kata Karina.

Epy berharap Virus Corona segera hilang. Sehingga dirinya bisa kembali syuting.

KARINA SUWANDI

Aktris Karina Suwandi juga memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di tengah Pandemi virus corona, aktris yang sering tampil bersama Warkop DKI ini memanfaatkan waktunya untuk bernisnis.

Karina memilih berbisnis di bidang kuliner alias makanan. Dia menjual 'Homemade Smoked Kielbasa' dan menawarkannya melalui media sosial.

"Hari hari seperti ini cari makanan yang aman, kualitas, praktis, enak! Nah ini lah dia," tulis @karina.suwandi81 dalam unggahan videonya di akun media sosialnya. ♦mt/berbagaisumber



PAPUA JELANG 75 TAHUN HUT PROKLAMASI

Buku ini penting dalam konteks memahami konflik sumber daya dan ideologi, atau keduanya dalam perjalanan Indonesia berbangsa. Dari sisi penulisnya mungkin kita perlu skeptis lantaran ia adalah seorang warga negara Australia. Namun, kita toh sulit menemukan buku tentang Papua dari seorang ahli di Indonesia. Jadi, sila baca dulu.

Sedangkan konteks penting penulis buku ini, John Martinkus, adalah promosi

Buku ini menyimpulkan banyak persamaan antara konflik Timor Timur dan Papua, dinilai kurang cukup membahas perbedaan-perbedaannya.

pengalamannya bertaruh nyawa sebagai wartawan di wilayah konflik kekerasan Indonesia: Aceh, Timor Timur (yang kini menjadi negara Timor Leste), dan tentu saja Papua. Promosi lainnya Martinkus berkomitmen membuka tabir rahasia tentang Papua. Ia menyebutnya West Papua (lantaran dalam perspektif Australia di Timur ada Papua New Guinea, PNG).

Pernyataan-pernyataannya tentang Indonesia mungkin akan banyak menyinggung perasaan kita. Ini misalnya: *"After seeing the violence and knowing people the Indonesian security forces have killed, tortured and jailed in East Timor, Aceh and Papua, I cannot, as a human being and a journalist, walk away from this story and let the lies, obfuscations and outright atrocities against the people of those three Indonesian conflicts go unreported."*

Tentang isinya, *The Road* adalah untai kisah perjalanan Papua sejak pembentukan Perjanjian New York 1962, masuk ke kerusuhan tahun 2000-an hingga

pembangunan Jalan Raya Trans-Papua - yang sekarang menjadi pusat konflik. Menarik juga untuk menilai judul buku ini (*The Road*, apakah jalan Trans-Papua maksudnya?) dengan lokasi yang menjadi kawasan konflik di ruas jalan itu.

Toh wartawan Australia lainnya, Micahel R Williams, mencatat bahwa narasi-narasi dalam buku ini banyak menggunakan sudut pandang orang luar. Namun, ia bisa memakluminya, antara lain lantaran kemungkinan kekhawatiran terhadap keselamatan narasumber. Malah Martinkus sendiri tampak khawatir juga.

Buku ini menyimpulkan banyak persamaan antara konflik Timor Timur dan Papua, dinilai kurang cukup membahas perbedaan-perbedaannya. Misalnya, dalam kasus Papua Barat, Indonesia dengan gigih mengklaim perjanjian PBB 1969 yang mengesahkan kedaulatan di Papua Barat. Namun di Timor Timur, terasa begitu cepat referendum berlangsung.

Begitu juga, dalam buku ini, tergambar pemerintah-pemerintah Barat kunci - Amerika Serikat, Inggris dan Prancis dalam Dewan Keamanan PBB, dan Australia, tetangga terdekat Indonesia - semuanya memiliki investasi bisnis, perdagangan, dan hubungan militer yang besar dengan Jakarta. Mereka terlalu senang untuk mendukung narasi Jakarta bahwa mereka sedang memerangi "pemberontakan separatis" dan mempertahankan wilayah kedaulatannya.

Sedangkan di Timor Timur, sejak awal memang terlihat begitu banyak perbedaan situasi dan kondisinya dengan Papua. Katakanlah misalnya soal efek domino perang dingin (kala itu perang Vietnam dan semangat anti-komunis masih sangat kencang).

Mungkin setiap pembaca memiliki penilaiannya sendiri-sendiri. Apapun, buku ini penting bagi yang memahami bahwa konflik sumber daya dan ideologi masih tetap berpotensi dalam perjalanan Indonesia berbangsa menjelang 75 tahun peringatan Proklamasi. ♦



JUDUL BUKU:

The Road: Uprising in West Papua

PENULIS:

John Martinkus

PENERBIT:

Black Inc.

TEBAL:

128 halaman

UKURAN:

210 x 135 mm

EDISI:

Cetakan Pertama (18 Mei 2020)

ISBN:

978-1760642426

ENSIKLOPEDI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Penyelenggaraan ibadah haji itu kompleks dan sistemik. Meski digelar setiap tahun, namun problem dan tantangan yang dihadapi selalu berbeda. Maka, jika ada kesan bahwa penyelenggaraan haji itu mudah dan simple karena dilaksanakan tiap tahun, penilaian selintas itu dipastikan karena belum memahami sepenuhnya penyelenggaraan ibadah haji.

Bisa dikatakan, perhelatan akbar dan kolosal yang digelar pada satu tempat dan waktu yang sama ini relatif unik. Pesertanya berlatar belakang bangsa/negara yang berbeda dari seluruh dunia. Jamaah haji Indonesia sendiri setiap tahun berbeda-beda, tidak sama.

Untuk lebih memahami dan menambah wawasan terkait penyelenggaraan haji dan umrah, kini telah hadir sebuah karya berjudul 'Ensiklopedi Penyelenggaraan Haji dan Umrah'.

Buku ini ditulis Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag dan Dr. H. Ali Rokhmad, M.Pd. Kedua penulis ini sangat memahami penyelenggaraan haji dan umrah karena memang berpengalaman di bidangnya.

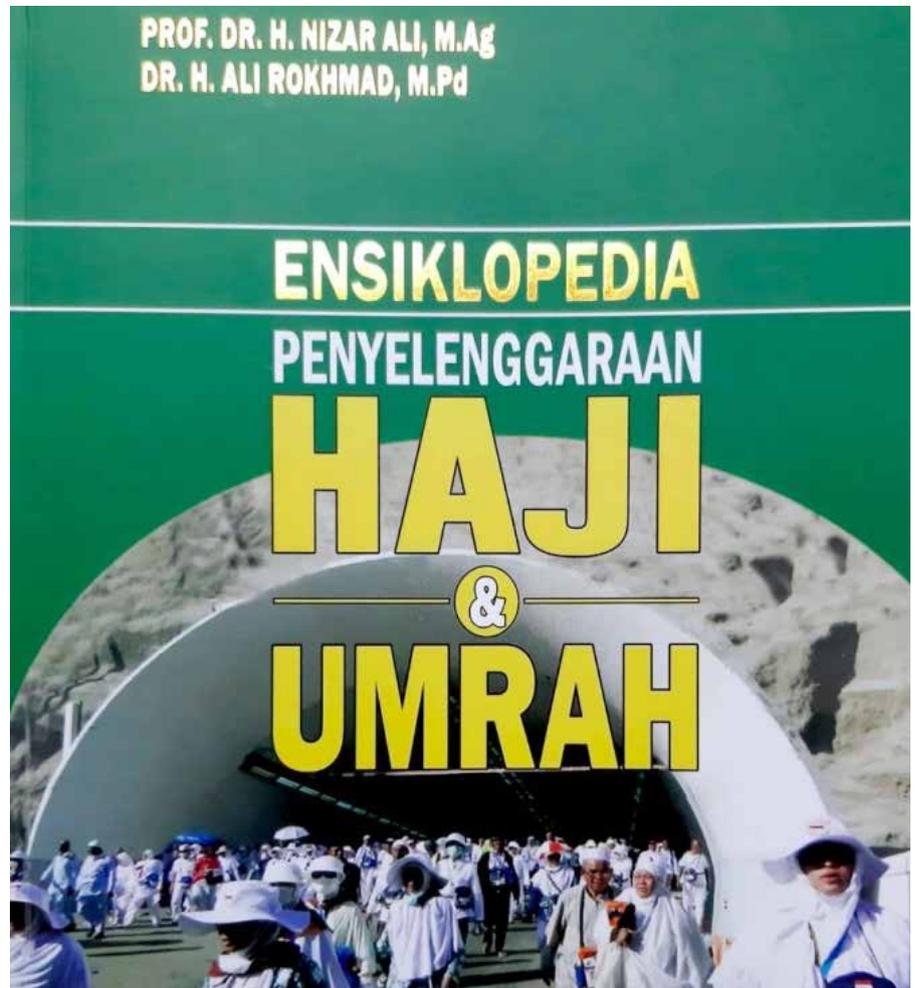
Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag saat ini, bahkan masih menjabat sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sementara Dr. H. Ali Rokhmad, M.Pd, sebelum bertugas sebagai Kepala Biro Perencanaan, pernah diberi amanah sebagai pejabat di Ditjen PHU.

Buku ini ditulis sebagai upaya memahami sistem dan manajemen penyelenggara haji, sekaligus dalam rangka mengurangi permasalahan dalam pelayanan haji.

Para pemangku kepentingan memang harus memiliki persepsi yang sama terhadap berbagai makna dan istilah dalam konteks pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji.

Kehadiran buku ini diapresiasi Menteri Agama Fachrul Razi. Dalam sambutan buku ini, Menag mengatakan, bahwa buku 'Ensiklopedi Penyelenggaraan Haji dan Umrah' hadir untuk memberikan secercah harapan, menjadi salah satu bahan rujukan dan solusi memahami permasalahan penyelenggaraan haji dan umrah.

Pemahaman yang sama dalam istilah dapat mempermudah identifikasi dan pemecahan masalah (problem identification and problem solving) dalam pengelolaan haji dan umrah sejak Tanah Air



hingga di Arab Saudi.

Buku 'Ensiklopedi Penyelenggaraan Haji dan Umrah' ini ditulis dalam jumlah halaman yang tebal (xii + 840 halaman). Buku ini diterbitkan Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama pada November 2019 sebagai cetakan pertama.

Karya ensiklopedi khusus haji dan umrah ini masih sangat langka. Kehadirannya diharapkan menjadi penambah khazanah wawasan keislaman, khususnya dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Dalam buku ini, terdapat tidak kurang dari 642 kata atau istilah yang tersusun secara alfabetis dari A sampai Z. Terdapat beberapa terminologi yang beragam dari mulai ibadah mahdah, istilah-istilah teknis penyelenggaraan haji dan umrah, istilah kesehatan, sampai istilah teknis perbankan.

Sebagai contoh, dalam Ensiklopedi ini dimuat istilah-istilah Ihram, Ifrad, Daker,

Blocking Time, BPKH, Heat Stroke, Cabinn Crews, dan lainnya. Istilah-istilah yang ditulis pun sangat up to date, sesuai perkembangan penyelenggaraan haji dan umrah terakhir.

Hal yang tak kalah menarik dari Ensiklopedi ini adalah menjelaskan dengan detail beberapa term sejarah perhajian dunia dari dulu sampai sekarang. Sebagai contoh Ensiklopedi ini mengungkap term Bakkah, lokasi Masjidil Haram, Jabal Abi Qubais, Madinatul Hujjaj, dan sebagainya.

Susunan buku 'Ensiklopedi Penyelenggaraan Haji dan Umrah' ini terbilang lengkap, di antaranya berisi tentang ensiklopedi utama secara alfabetis, bibliografi, indeks serta daftar pustaka. 'Alaa kulli haal, buku karya monumental ini patut dibaca.**

Ihsan Faisal (Kasi Penyiapan Akomodasi Subdit Akomodasi Haji Dityanhaj LN Ditjen PHU)



5 Negara Islam Paling Terdampak VIRUS CORONA

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi, penyakit menular yang menyebar dari satu orang ke orang lainnya di banyak negara pada waktu yang bersamaan.

Merujuk pada data WHO yang dirilis pada Jumat (3/7/20), Virus Corona sudah menyebar ke 216 negara. Dilaporkan virus tersebut telah menjangkiti 10.842.028 orang. Sedangkan jumlah kasus yang meninggal di seluruh dunia telah mencapai angka 521.277 orang

Sementara jika merujuk pada perhitungan Worldometers.info yang dirilis pada Sabtu (4/7/20), Virus Corona telah menyebar ke 215 negara dan telah menjangkiti kurang lebih 11.198.212 orang. Sementara jumlah kasus meninggal di seluruh dunia mencapai angka 529.212 orang dan jumlah yang sembuh di seluruh dunia sebanyak 6.345.233 orang.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

MC *Meski begitu, Pandemi Virus Corona telah memberikan dampak buruk bagi sejumlah negara di dunia. Permasalahan COVID-19 tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat di suatu negara, tapi juga berdampak pada ekonomi. Pengangguran dan kelaparan pun mengintai di sejumlah Negara.*

melaporkan pada Februari 2020, bahwa 80 persen dari kasus COVID-19 hanya melaporkan gejala ringan seperti flu dan hanya 2 persen kasus yang mengakibatkan kematian. Sehingga COVID-19 dianggap memiliki tingkat kematian yang jauh lebih rendah daripada epidemi virus serupa seperti SARS atau MERS.

Meski begitu, Pandemi Virus Corona telah memberikan dampak buruk bagi sejumlah negara di dunia. Permasalahan COVID-19 tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat di suatu negara, tapi juga berdampak pada ekonomi. Pengangguran dan kelaparan pun mengintai di sejumlah Negara.

PBB pun menyuarakan keprihatinannya pada soal tersebut. Menurut World



Food Programme (WFP), diprediksi akan ada sekitar 135 hingga 250 juta kasus kelaparan di seluruh dunia akibat pandemi Corona.

Adapun negara yang paling terdampak adalah negara yang juga diliputi konflik dan perang sipil, seperti Suriah dan Yaman. Menurut Kepala WFP, David Beasley, dunia perlu segera bertindak untuk menanggulangi permasalahan ini.

"Saya percaya kalau dengan keahlian dan kemitraan ini, kami bisa membawa tim dan program yang sesuai untuk memastikan agar pandemi COVID-19 tidak menjadi bencana kelangkaan pangan," ujar David.

Berikut 5 Negara Islam Yang Paling Terdampak Covid-19:

Yaman

Yaman telah mengkonfirmasi adanya kasus COVID-19 pertama di negara tersebut pada awal bulan April lalu. Kondisi itu pun diperburuk dengan minimnya fasilitas

Kesehatan, dimana sistem kesehatan yang kurang berjalan baik dan tenaga medis yang tidak memadai.

Dilansir dari bbc.com, ada beberapa alasan Yaman menjadi Negara terdampak paling buruk pandemi Virus Corona



Yaman telah mengkonfirmasi adanya kasus COVID-19 pertama di negara tersebut pada awal bulan April lalu. Kondisi itu pun diperburuk dengan minimnya fasilitas

Dilaporkan 600 orang telah meninggal di Kota Aden, Yaman, karena pandemic Virus Corona, dimana di antara mereka yang meninggal, terdapat enam pejabat pemerintahan.

Sumber di Pemerintah Yaman yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan, bahwa pada 1 Mei - 13 Mei 2020 total ada sekitar 623 orang meninggal, karena pandemik virus corona, termasuk wabah pneumonic dan virus chikungunya.

Sehingga Pemerintah Yaman telah mendeklarasikan Aden sebagai zona bencana karena penyebaran virus corona dan penyakit lain.

Menurut Situs aa.com.tr, menyatakan bahwa Pemerintah Yaman telah menyerukan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dunia internasional dan organisasi-organisasi Kesehatan dunia agar memberi dukungan pada Yaman dalam memerangi Covid-19 dan epidemik lain yang muncul setelah Kota Aden dihantam banjir bandang.

Kota Aden saat ini berstatus Ibu Kota sementara Yaman. Pada pertengahan April 2020, Aden dirusak oleh musibah banjir yang berdampak pada 150 ribu orang, sehingga pemerintah pada bulan lalu

mendeklarasikan kota di selatan Yaman itu sebagai zona berbahaya.

Selain bencana alam, Yaman dilanda kekerasan dan kekacauan sejak 2014 atau saat kelompok pemberontak menguasai sebagian besar wilayah di Yaman, termasuk Ibu Kota Sanaa.

Krisis di Yaman memburuk ketika pada 2015 koalisi militer pimpinan Arab Saudi meluncurkan kampanye serangan udara yang ditujukan untuk merebut teritorial yang dikuasai pemberontak Houthis.

Serangan udara itu diyakini telah menewaskan puluhan ribu warga Yaman, termasuk warga sipil. Kondisi Yaman telah mengarah pada krisis kemanusiaan

Suriyah

Menteri Kesehatan Nizar Yaziji pada Minggu malam (22/3/20) mengatakan bahwa pihak berwenang telah mencatat kasus pertama virus corona di Suriyah. Kasusnya merupakan kasus impor karena orang yang terinfeksi tersebut datang dari luar negeri.

Sementara untuk kasus meninggal, Kementerian Kesehatan Suriyah melaporkan kasus kematian pertama akibat Virus Corona di Suriyah terjadi pada Minggu (29/3/20). Diketahui seorang wanita meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat.

Selain itu, sembilan orang lainnya din-



terburuk menyusul ada jutaan orang di negara itu berisiko pada musibah kelaparan.

Yaman kini banyak bergantung pada negara lain seperti Arab Saudi dan lembaga kemanusiaan dunia lain.

Menurut data Worldometers.info per Sabtu (4/7/20), Yaman menempati urutan ke 125 dengan jumlah pasien positif Virus Corona sebanyak 1.240 orang dan kasus kematian sebanyak 335 orang.

yatakan positif terinfeksi Covid-19. Ada kekhawatiran bahwa virus ini akan menyebar dengan cepat di tengah konflik yang melanda Suriyah.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan hanya 64 persen rumah sakit umum yang berfungsi secara penuh di Suriyah. Namun mereka kekurangan tenaga terlatih.

Enam juta orang terlantar dan tinggal di kamp-kamp pengungsian yang penuh

sesak dengan infrastruktur air dan sanitasi tidak memadai. Kondisi ini, dikhawatirkan akan menyebabkan mereka sangat rentan terkena berbagai macam penyakit salah satunya virus corona.

Untuk menghindari hal tersebut, Presiden Bashar Al Assad telah memberlakukan berbagai langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pemerintah memberlakukan jam malam, guna membatasi perjalanan antar provinsi, menutup sekolah dan perguruan tinggi, serta melarang pertemuan di ruang publik. Selain itu, pemerintah juga melarang segala bentuk peribadatan di Masjid.

Organisasi Médecins Sans Frontières

yang tidak melindungi mereka dari dingin atau hujan. Ada terlalu sedikit tenda untuk menampung para pendatang baru," kata Ahmed seperti dilansir BBC.

Badan amal medis tersebut telah memberikan bantuan untuk melakukan peminidanaan pasien di dua pusat kesehatan. Salah satunya yakni di kamp Deri Hassan yang menampung 164 ribu pengungsi.

Hingga saat ini, belum tercatat kasus Covid-19 yang dilaporkan di Provinsi Idlib yang merupakan kubu terakhir oposisi. Sejumlah organisasi kemanusiaan sangat prihatin dengan situasi di Idlib karena terbatasnya layanan kesehatan.

Kota Idlib yang disesaki oleh para pem-



(MSF) telah memperingatkan bahwa penyebaran virus corona dapat terjadi dengan cepat, jika tidak ada dukungan dan langkah-langkah penanganan yang tepat. Pemimpin tim proyek MSF, Ahmed, mengatakan tenda-tenda pengungsian sudah tidak dapat menampung para pengungsi Suriah.

"Kami menyaksikan orang-orang yang hidup di tempat terbuka. Kami juga melihat dua atau tiga keluarga berbagi tenda

berontak Suriah hanya menunggu waktu.

"Hanya masalah waktu," Itulah yang diyakini oleh banyak petugas kesehatan di provinsi Idlib, Suriah tentang munculnya coronavirus baru di wilayah barat laut yang dilanda perang, menurut sebuah laporan baru.

Meskipun sulit untuk memprediksi secara tepat kapan kasus coronavirus akan dikonfirmasi di Idlib, wilayah yang dikuasai pemberontak Suriah terakhir di negara itu,

mayoritas petugas medis tidak siap untuk menghadapi wabah yang parah.

"Idlib dikelilingi oleh daerah-daerah yang semuanya terkena Virus Corona," kata penulis laporan Sahar Atrache kepada Al Jazeera.

"Penutupan penyeberangan terlepas, rute tetap dibuka untuk lalu lintas komersial, sehingga risiko wabah virus tetap ada," katanya.

Untuk Suriah, menurut data dari Worldometers.info per Sabtu (4/7/20), menempati urutan ke 161 dengan jumlah pasien positif Virus Corona berjumlah 328 orang dan kasus kematian sebanyak 10 orang.

Arab Saudi

Arab Saudi juga menjadi salah satu negara yang terdampak Pandemi Virus Corona. Kementerian Kesehatan Saudi pada Sabtu (4/7/20) melaporkan 201.801 kasus positif terinfeksi Virus Corona dan 1.802 kasus meninggal.

Pada 2 Maret, Arab Saudi mengkonfirmasi kasus Covid-19 pertamanya, yaitu dari seorang pria yang telah melakukan perjalanan ke Iran dan Bahrain. Kasus kematian pertamanya dilaporkan pada 24 Maret 2020.

Mencerminkan ketegangan regional, Arab Saudi menyalahkan Iran, terutama Syiah karena telah menginfeksi sebagian besar warga di Teluk dan, pada 8 Maret, populasi Syiah mengisolasi diri di Provinsi Qatif Timur.

Sebagian besar kasus di Qatif berasal dari orang-orang yang telah kembali dari ziarah di Iran, meskipun Arab Saudi telah melarang bepergian ke Iran. Kementerian Luar Negeri Saudi mengecam Teheran karena "mengizinkan warga Saudi masuk ke wilayahnya tanpa membubuhkan paspor mereka" dan menuduh Iran "bertanggung jawab langsung dalam meningkatkan infeksi COVID-19."

Arab Saudi sendiri sebenarnya telah mengantisipasi masuknya Virus Corona yaitu dengan ditutupnya dan ditanggungkannya ibadah Umrah pada 26 Februari, beberapa hari sebelum Virus Corona pertama dikonfirmasi di Negara itu.

Pemerintah Arab Saudi mengambil langkah tegas terkait wabah Virus Corona ini. Bahkan sebelum kasus pertama Virus Corona ditemukan di Arab Saudi, tepatnya pada 26 Februari, Arab Saudi mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya melarang umat Islam (dari luar negeri), termasuk warganya sendiri melakukan ibadah umrah, lalu juga menghentikan wisatawan berkunjung ke wilayah Saudi, menutup sementara Masjidil Haram dan Masjid Na-



MC *Mencerminkan ketegangan regional, Arab Saudi menyalahkan Iran, terutama Syiah karena telah menginfeksi sebagian besar warga di Teluk dan, pada 8 Maret, populasi Syiah mengisolasi diri di Provinsi Qatif Timur.*

bawi untuk disterilisasi, menutup pelataran Thawaf dan Lajur Sai untuk jamaah Umrah, lalu juga meliburkan sementara sekolah dan universitas di wilayah Kerajaan Arab Saudi, menutup perbatasan dengan Bahrain, Kuwait, dan UEA.

Arab Saudi juga melarang sementara perjalanan ke dan dari hampir semua negara Eropa dan lebih dari 12 negara di Asia dan Afrika. Kebijakan ini diambil setelah kasus Virus Corona di Arab Saudi meningkat menjadi 45 kasus.

Larangan Umrah ini merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu artinya menutup juga akses ke dua Masjid Suci, yaitu Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, yang merupakan tempat paling suci dalam Islam Sunni.

Pada 4 Maret, semua warga negara dan warga Saudi dilarang melaksanakan Umrah. Namun hal tersebut belum juga bisa membendung masuknya Virus Corona, hingga pada 2 April, Arab Saudi memberlakukan jam malam 24 jam di kota Makkah dan Madinah. Yang kemudian diikuti oleh lima kota di Arab Saudi lainnya, termasuk ibu kota Riyadh. Kemudian pada 31 Maret,



Arab Saudi mendesak umat Islam untuk menunda sementara hal-hal yang terkait dengan ibadah haji.

Pandemi Virus Corona di Arab Saudi yang tak kunjung mereda, bahkan setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 H, yang jatuh pada 24 Mei, menimbulkan pertanyaan baru, apakah ibadah haji tahun 2020 dapat dilaksanakan?

Dilansir AFP, Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Mohammad Benteen mengatakan, masih belum pasti apakah ibadah haji tahun ini dapat berjalan sesuai jadwal, yaitu pada akhir Juli atau tidak. Sebab dalam keadaan saat ini, yang paling penting adalah memastikan kesehatan dan keselamatan warga negara, khususnya umat Islam di seluruh dunia.

"Arab Saudi sepenuhnya siap untuk melayani peziarah dan jamaah umrah. Namun dalam keadaan seperti ini, ketika kita berbicara tentang pandemi global. Kerajaan lebih mementingkan untuk melindungi kesehatan umat Muslim dan warga negara, sehingga kami meminta saudara-saudara umat Muslim di seluruh dunia untuk menunggu sampai situasinya jelas," kata Mohammad Benteen kepada stasiun

MC *Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Medis Iran, mengumumkan pada Rabu 11 Maret, setidaknya 354 orang telah meninggal akibat Covid-19.*

TV Al-Ekhbariya, Selasa (31/3/20).

Selain telah menanggihkan ibadah umrah sebagai langkah antisipasi penularan Virus Corona, Arab Saudi juga telah menghentikan sementara ibadah shalat di Masjid-masjid di seluruh Arab Saudi, guna mencegah penyebaran Virus Corona. Seluruh warga diminta untuk beribadah dari rumah.

Setelah kurang lebih tiga bulan diberlakukan lockdown total, Arab Saudi pada 21 Juni mulai melonggarkan beberapa pembatasan. Namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah menyebarnya Virus Corona. Di antara pelonggaran tersebut adalah dibukanya kembali pusat-pusat perbelanjaan, kafe, restoran, serta tempat-tempat ibadah (masjid) di seluruh Arab Saudi kecuali di Makkah dan Madinah, yang masih memiliki kasus positif yang tinggi.

Dan akhirnya pada 22 Juni, Arab Saudi memutuskan membuka pelaksanaan ibadah haji 1441 H (2020), namun dengan jumlah terbatas, yakni kurang dari 1.000 orang, itupun hanya untuk jamaah warga Saudi dan jamaah asal luar negeri namun telah menetap di Saudi. Syarat lainnya, usia tidak melebihi 65 tahun, serta tidak memiliki penyakit kronis. Hal itu, menurut Menteri Kesehatan Arab Saudi, Dr. Tawfiq Al-Rabiah dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari tertularnya Virus Corona.

Al-Rabiah menjelaskan, jamaah yang akan melaksanakan haji akan diisolasi terlebih dahulu. Begitu juga setelah selesai melakukan ibadah haji mereka akan di karantina terlebih dahulu.

Selain itu, pihak pemerintah Saudi juga telah menyediakan rumah sakit terpadu di tempat-tempat suci, termasuk membuka pusat kesehatan di Arafah. Hal ini dilakukan untuk menangani kondisi darurat yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji. Petugas medis akan terus berjaga dan turut mengawasi para jamaah sepanjang perjalanan dan pelaksanaan haji mereka.

Sebelum Arab Saudi mengumumkan pelaksanaan ibadah haji terbatas ini, banyak negara-negara di Asia Timur telah lebih dulu menanggihkan ibadah haji 2020. Di antaranya Malaysia, Singapore dan Indonesia.

Iran

Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Medis Iran, mengumumkan pada Rabu 11 Maret, setidaknya 354 orang telah meninggal akibat Covid-19.

Sementara sebanyak 9.000 orang terinfeksi Virus Corona, di mana 2.959 orang

dinyatakan sembuh, demikian kantor berita resmi *IRNA* mengutip Kianush Jahanpur, kepala Hubungan Masyarakat dan Pusat Informasi Kementerian Iran.

Iran telah menjadi pusat penyebaran Virus Corona terbesar di Timur Tengah, menjadi pusat wabah penyakit paling mematikan di luar China. Setelah wabah merebak, pemerintah Iran memerintahkan pembatalan konser dan pertandingan sepak bola Nasional.

Banyak sekolah dan Universitas menghentikan aktivitas di provinsi-provinsi di seluruh negeri. Kementerian Kesehatan Iran menuturkan, sebagian besar kematian dan infeksi telah diidentifikasi di Qom atau orang-orang yang telah mengunjungi kota itu.

Pemerintah Iran menempuh beragam upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona. Di antaranya membatalkan Shalat Jumat di kota-kota besar di Iran, menangkap penyebar hoaks terkait Virus Corona, melarang ekspor masker wajah selama tiga bulan dan memerintahkan seluruh pabrik untuk meningkatkan produksinya, dan menanggihkan penerbangan Iran ke Eropa.

Pemerintah Iran juga melarang kegiatan di sekolah dan universitas, mengurangi jam kerja, menanggihkan acara budaya dan olahraga, serta mendesak warganya agar tetap tinggal di dalam rumah.

Bahkan sejumlah provinsi di Iran mengeluarkan instruksi agar hotel dan tempat wisata ditutup. Untuk menghindari penularan Virus Corona, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tidak jadi menyampaikan pidato di acara Peringatan Tahun Baru Persia di Kota Mashhad pada 20 Maret 2020.

Seperti diketahui, Iran menjadi negara dengan jumlah kasus dan kematian terbanyak akibat Virus Corona terbanyak di Timur Tengah. Dilaporkan hingga hari ini, Sabtu (4/7/20) jumlah pasien yang terinfeksi Virus Corona di Iran berjumlah 235.428 orang dengan kasus meninggal sebanyak 11.260 orang.

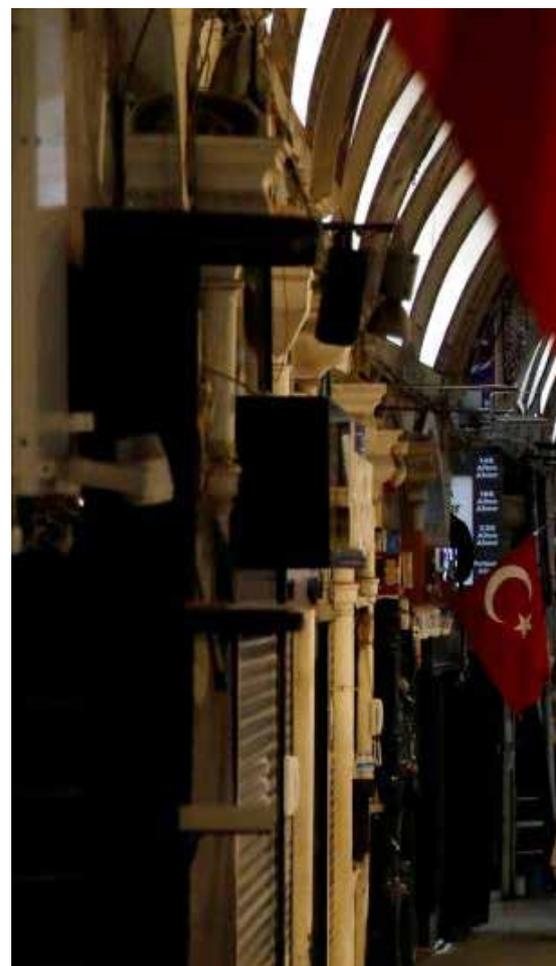
Turki

Pada 12 Maret, Turki mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertamanya setelah hampir tiga minggu bersikeras bahwa mereka tidak memiliki kasus. Pada 19 Maret, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menuduh bahwa kritik terhadap tanggapan pemerintah 'jahat', karena krisis kesehatan bersinggungan dengan keprihatinan politik tentang tantangan yang berkembang terhadap Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang saat ini berkuasa.

MC Pada 12 Maret, Turki mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertamanya setelah hampir tiga minggu bersikeras bahwa mereka tidak memiliki kasus. Pada 19 Maret, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menuduh bahwa kritik terhadap tanggapan pemerintah 'jahat', karena krisis kesehatan bersinggungan dengan keprihatinan politik tentang tantangan yang berkembang terhadap Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang saat ini berkuasa.

"Beberapa orang telah berusaha membangkitkan kekacauan, melemahkan semangat rakyat kami dengan berita palsu dan mengeluh tidak melihat kasus apa pun di negara kami," kata Erdogan kepada wartawan.

"Namun, kami, bersama orang-orang kami, telah menghadapi tantangan ini dengan bijak dan penuh tekad seperti yang selalu kami lakukan dalam menghadapi serangan terhadap negara kami. Kami telah membuat orang-orang jahat itu frustrasi, mereka yang terus menggosok tangan mereka karena mereka berharap virus itu akan membawa negara kami menjadi



tawanan dan akan terus melakukannya. Kekuatan terbesar Turki adalah persatuan, solidaritas dan persaudaraannya," tambah Erdogan.

Sejak Desember 2019, partai-partai baru yang didirikan oleh mantan pejabat tinggi AKP telah mengancam untuk melemahkan kekuatan Erdogan terhadap politik Turki. Erdogan juga meminta orang Turki untuk menunjukkan solidaritas, dengan tinggal di rumah dan mempraktikkan menjaga jarak sosial ketika berada di depan umum.

Pada 6 April, Turki memberlakukan tin-

dakan yang lebih ketat untuk membatasi penyebaran virus. Pemerintah membuat peraturan untuk menutup wajah dengan masker ketika berada di tempat umum, dan juga saat menggunakan transportasi umum wajib.

Pemerintah juga menutup 31 kota untuk lalu lintas yang tidak penting. Tapi itu tidak memaksakan karantina wajib seperti yang disarankan oleh para profesional medis dan politisi oposisi. Pada 19 April, jumlah kasus terkonfirmasi Turki berjumlah 82.329 dan telah melampaui negara tetangganya, Iran. Pada awal Mei, Turki menjadi salah satu dari delapan negara paling

tional Accord (GNA). Ankara bahkan telah menyetujui kerja sama militer dengan kelompok yang berbasis di Tripoli tersebut.

Di sisi lain, ada kelompok LNA (Tentara Nasional Libya) yang dipimpin Jenderal Khalifa Haftar. Rusia, Uni Emirat Arab dan Libya yang memberikan dukungan kepada kelompok tersebut.

"Negara yang memberi dukungan finansial dan politik kepada Haftar bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami rakyat Libya dan kekacauan serta instabilitas di negara itu," lanjut pihak Kementerian Pertahanan Turki.

"Jika sampai perwakilan dan kepentin-



terinfeksi di dunia.

Di saat jumlah kasus Virus Corona terus meningkat, pemerintah Turki malah sibuk mengurus konflik di Libya. Pada Minggu (10/5), Rezim Presiden Recep Tayyip Erdogan mengancam PBB karena tidak bertindak untuk menghentikan pertumpahan darah yang terjadi di Afrika Utara.

"Sangat mengecewakan jika PBB terus diam melihat pembantaian ini," tulis pihak Kementerian Pertahanan Turki dalam pernyataannya. Dalam konflik ini, Turki bersama sebagian besar masyarakat Internasional mendukung pasukan Government of Na-

gan kami diserang, maka kami akan menganggap pasukan Haftar sebagai target sah," tegasnya.

Seperti diketahui, Turki saat ini masih kewalahan menghadapi penyebaran Virus Corona di dalam negeri. Pada Sabtu (4/7/20), pemerintah melaporkan tambahan 1.500 kasus baru. Sehingga total kasus Virus Corona di Turki saat ini telah menembus angka 203.456 kasus dengan kasus meninggal sebanyak 5.186 kasus. Jumlah tersebut menempatkan Turki di urutan ke tiga belas sebagai negara dengan jumlah kasus terbanyak. ♦mt/berbagaisumber

10 WASIAT AGAR TERHINDAR DARI SEGALA WABAH SERTA PENYAKIT

Ketakutan manusia pada hari-hari ini dari wabah yang disebut dengan wabah corona adalah suatu yang wajar. Namun satu-satu tempat terbaik untuk meminta pertolongan dan perlindungan adalah kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Hanya Allah yang mampu mengangkat kita semua dan dari seluruh kaum muslimin di manapun mereka berada dari segala bencana, segala kesulitan. Dan semoga Allah mengangkat dari seluruh kaum muslimin segala penderitaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang shalih. Sesungguhnya Allah yang mampu untuk melakukan semua itu.

Berikut adalah 10 wasiat agar terhindar dari segala wabah serta penyakit yang ditulis oleh Ustadz Iqbal Gunawan, M.A yang diterjemahkan dari kajian Syaikh Prof. Dr. 'Abdurrazzaq bin 'Abdil Muhsin Al-'Abbad Al-Badr, sebagai bentuk ikhtiar miminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

1. Doa yang Dibaca Sebelum Turunnya Suatu Musibah

Wasiat yang pertama yaitu doa yang dibaca sebelum turunnya suatu musibah. Dari sahabat Utsman bin 'Affan Radhiyallahu 'Anhu, beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang membaca:

"Barangsiapa yang senantiasa membaca doa Bismillah, alladzi laa ya dhurru ma'asmihi syaiun fil ardhi walafissama wahuwassamiul 'alim (Dengan nama Allah, tidak akan membahayakan dengan menyebut namaNya segala sesuatu di langit dan di bumi. Dan Dia

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui) dibaca doa ini tiga kali, dia tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai dipagi hari. Dan apabila dia baca di pagi hari tiga kali, maka juga tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai di sore hari. (HR. Abu Dawud dan selainnya)

2. Memperbanyak Membaca "Lailaha illa Anta subhanaka inni kuntu minadhdhalimin"

Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Dan ingatlah Nabi Yunus ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan ia menyangka bahwasannya Kami tidak akan mempersempit keadaannya, kemudian ia berdoa dikegelapan perut ikan, "Lailaha illa Anta subhanaka inni kuntu minadhdhalimin" (Tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dzalim). Maka Kami kabulkan kepadanya dan Kami selamatkan ia dari kesulitan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman." (QS. Al-Anbiya[21]: 87-88)

Berkata Ibnu Katsir Rahimahullah dalam tafsir beliau ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala: "Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman."

Maksudnya, ketika mereka berada dalam kesulitan dan mereka berdoa kepada Kami dengan menunjukkan inabah kepada Kami terutama ketika mereka berdoa dengan doa ini dalam kondisi berada dalam musibah.

Kemudian beliau menyebutkan hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "Yaitu doa Dzun Nuun ketika ia berdoa dan dia berada dalam perut ikan "Lailaha illa Anta subhanaka inni kuntu minadhdhalimin": (Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim), tidak ada seorangpun yang berdoa dengan doa ini kecuali Allah mengabulkannya." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim Rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawa'id: Tidaklah ditolak kesulitan-kesulitan dunia lebih kuat dari tauhid. Oleh karena itu doa orang yang berada dalam kesulitan yaitu doa dengan tauhid (doa Nabi Yunus). Tidaklah seorang berdoa dalam keadaan kesulitan dengan doa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan kesulitannya.

Dan tidaklah kesulitan itu datang kecuali disebabkan karena kesyirikan dan tidaklah orang selamat kecuali dengan tauhid. Karena dengan tauhid lah seorang bisa menjaga dirinya dan Allah



Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua.

3. Berlindung dari Bala

Dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam senantiasa berlindung dari bala', dari musibah yang berat, dari sebab-sebab kesengsaraan, dari takdir yang buruk dan cemooan musuh.

Juga dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beliau bersabda: "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari musibah yang berat, ditimpa kesengsaraan, takdir yang buruk, dan cemooan musuh." (Muttafaqun 'Alaih)

4. Senantiasa Membaca Doa Keluar Rumah

Wasiat yang keempat yaitu senantiasa membaca doa keluar rumah. Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

"Apabila seseorang keluar dari rumahnya dan membaca doa 'bismillah tawakkaltu alla-ha la haula wala quwwata illa billah (dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah) maka dikatakan kepada orang tersebut, 'engkau telah mendapat-

MC *Wasiat yang ke-7 yaitu menghindari dan menjauhi tempat-tempat yang ada wabah. Dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu 'Anhu bahwasannya sahabat 'Umar Radhiyallahu 'Anhu pernah bepergian ke negeri Syam. Ketika sampai ke daerah yang bernama Sargh, sampai kepadanya bahwa terjadi wabah di daerah Syam. Maka sahabat 'Abdurrahman bin 'Auf memberi kabar bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda:*

kan petunjuk, engkau telah mendapatkan kecukupan dan engkau telah dilindungi. Maka setan-setan yang lain pun menjauh darinya dan berkata kepadanya setan yang lain, 'bagaimana engkau bisa mengganggu seseorang yang telah diberi petunjuk, telah diberi kecukupan dan telah dilindungi.'" (HR. Abu Dawud)

5. Meminta Kepada Allah Keselamatan Setiap Pagi dan Sore Hari

Wasiat yang ke-5, senantiasa meminta kepada Allah keselamatan setiap pagi dan sore hari.

Dari sahabat 'Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'Anhuma beliau berkata: Tidaklah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam meninggalkan doa-doa ini dipagi hari dan disore hari. Yaitu doa:

"Ya Allah aku meminta kepadaMu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah aku meminta kepadaMu ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah tutuplah auratku, Ya Allah amankanlah rasa takutku, Ya Allah jagalah aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku dan dari atasku. Dan aku berlindung diri kepadaMu dari aku dibunuh dengan tiba-tiba dari arah bawahku." (HR. Ahmad dan selainnya)

6. Memperbanyak Doa

Wasiat yang ke-6 yaitu memperbanyak doa. Dari sahabat Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'Anhuma, beliau berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

Abat Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'Anhu, yaitu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa yang dibukakan untuknya pintu berdoa, maka berarti telah dibukakan untuknya pintu-pintu rahmat. Dan tidaklah seorang meminta kepada Allah sesuatu yang lebih Allah cintai daripada diminta dariNya keselamatan." (HR. Tirmidzi)

Juga Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya doa bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Maka -wahai hamba-hamba sekalian- hendaklah ka-

Dan hendaklah seorang berusaha untuk menerima segala musibah dengan kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

lian senantiasa memperbanyak doa." (HR. Tirmidzi dan lainnya)

7. Menghindari dan Menjauhi Tempat- Tempat yang Ada Wabah

Wasiat yang ke-7 yaitu menghindari dan menjauhi tempat-tempat yang ada wabah. Dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu 'Anhu bahwasannya sahabat 'Umar Radhiyallahu 'Anhu pernah bepergian ke negeri Syam. Ketika sampai ke daerah yang bernama Sargh, sampai kepadanya bahwa terjadi wabah di daerah Syam. Maka sahabat 'Abdurrahman bin 'Auf memberi kabar bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda:

"Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat, maka janganlah engkau mendatangnya. dan apabila terjadi wabah di suatu tempat dan engkau berada di tempat tersebut, maka janganlah engkau keluar karena lari darinya."

Juga dari sahabat Abu Hurairah Radhiyal-

lahu 'Anhu, bahwasannya Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: "Tidak boleh digabungkan antara yang sakit dengan yang sehat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Yaitu pemilik unta tidak boleh menggabungkan unta-unta yang sehat dengan unta-unta yang sakit agar penyakitnya tidak berpindah kepada yang lain.

8. Senantiasa Melakukan Perbuatan Baik



Wasiat yang ke-8 yaitu senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Dari sahabat Anas Radhiyallahu 'Anhu beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

"Perbuatan-perbuatan baik akan melindungi seseorang dari kematian buruk, juga penyakit dan segala bencana. Dan orang yang baik di dunia mereka adalah orang yang baik di akhirat nanti." (HR. Al-Hakim)

Berkata Ibnu Qayyim Rahimahullah: Diantara obat yang paling dari segala penyakit yaitu berbuat kebaikan, berdzikir, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepadaNya, bertaubat. Dan perkara-perkara ini mempunyai pengaruh untuk menolak segala penyakit dan lebih kuat daripada obat-obat alami. Namun

hanya saja perbuatan-perbuatan tersebut tergantung kesiapan jiwa, penerimanya dan akidahnya terhadap manfaat yang akan ia dapatkan. (Zaadul Ma'ad)

Baca Juga:

Masa Depan Dunia Ada di Tangan Islam - Aqidah Prioritas Utama (Ustadz Arman Amri, Lc.)

9. Memperbanyak Shalat Malam

Wasiat yang ke-9 yaitu memperbanyak



qiamul lail (shalat malam). Dari sahabat Bilal Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda:

"Hendaklah kalian senantiasa melakukan shalat malam karena sesungguhnya shalat malam adalah kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian. Dan sesungguhnya shalat malam adalah kedekatan kepada Allah, penghalang dari perbuatan dosa, penghapus segala kesalahan dan mengusir dari segala penyakit dari dari tubuh." (HR. Tirmidzi dan selainnya)

10. Menutup Wadah Makanan dan Minuman

Wasiat yang ke-10 dan yang terakhir, yaitu senantiasa menutup wadah makanan dan minuman. Dari sahabat Jabir bin 'Abdil-

lah Radhiyallahu 'Anhuma beliau mengatakan: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

"Tutuplah tempat makanan dan minuman, karena sesungguhnya dalam setahun ada satu malam yang wabah akan turun dan tidak akan melewati satu tempat makanan atau minuman yang tidak ditutup kecuali akan turun wabah tersebut pada makanan atau minuman tersebut." (HR. Muslim)

Berkata Ibnuul Qayyim Rahimahullah: "Ini adalah perkara yang tidak sampai ilmu pengetahuan kedokteran kepada hal ini. (Zaadul Ma'ad)".

Dan sebagai penutup dari 10 Wasiat Agar Terhindar Dari Segala Wabah Dan Penyakit, hendaklah setiap muslim senantiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah 'Azza wa Jalla, mengharapkan keutamaan bertawakal hanya kepadaNya. Karena sesungguhnya semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di bawah pengaturan dan kekuasaanNya.

Dan hendaklah seorang berusaha untuk menerima segala musibah dengan kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla memberi janji kepada orang yang bersabar dan mengharap pahala dariNya dengan pahala dan ganjaran yang besar. Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang mendapatkan pahala tidak ada batasnya." (QS. Az-Zumar[39]: 10).

Juga dari sahabat 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang tha'un. Maka beliau mengatakan: "Sesungguhnya itu adalah adzab yang Allah utus kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah menjadikannya rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maka tidaklah seorang hamba tertimpa penyakit tha'un kemudian ia tinggal di negerinya dengan bersabar dan ia mengetahui bahwasanya tidak akan mengimpinya kecuali apa yang Allah tuliskan kepadanya kecuali ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid." (HR. Bukhari Rahimahullah).

Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberi taufik kepada kita semua kepada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, juga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu melakukan amal shalih, mengucapkan perkataan yang baik, karena sesungguhnya Allah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan segala puji bagi Allah, shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, juga kepada seluruh keluarganya. Wallahu a'lam. ♦

MC

"Hendaklah kalian senantiasa melakukan shalat malam karena sesungguhnya shalat malam adalah kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian. Dan sesungguhnya shalat malam adalah kedekatan kepada Allah, penghalang dari perbuatan dosa, penghapus segala kesalahan dan mengusir dari segala penyakit dari dari tubuh." (HR. Tirmidzi dan selainnya)

BERHAJI KARENA MENUNDA HAJI

Setelah sekian lama menabung, mengumpulkan lembar demi lembar rupiah dari hasil berjualan, terkumpul dalam tabungan Pak Ahmad sejumlah uang yang cukup untuk membayar ongkos naik haji (ONH). Impian sejak muda untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci sebentar lagi akan terwujud. Doa-doa yang senantiasa terucap selepas shalat tak lama lagi akan menjadi kenyataan.

Pak Ahmad bukanlah orang kaya. Dia hanyalah penjual es yang harus bekerja ekstr keras agar bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk berhaji. Kuatnya keinginan Pak Ahmad untuk berhaji menjadikan dia mampu berdisiplin menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabungkan.

Sebenarnya, ada sedikit rasa "tidak enak" dalam hati Pak Ahmad. Uang yang dikumpulkannya itu hanya cukup untuk melunasi ONH untuk dirinya sendiri, tidak untuk istrinya. Padahal, uang itu terkumpul karena bantuan istrinya juga.

"Tidak apalah, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki sehingga istrinya bisa kebagian jatah haji pada tahun-tahun berikutnya," begitu pikiran Pak Ahmad.

Satu hari menjelang pendaftaran, salah seorang tetangganya datang ke rumah untuk meminjam sejumlah uang untuk membayar biaya rumah sakit. Tetangga Pak Ahmad ini terbilang orang susah, untuk makan sehari-hari saja, dia kelimpungan.

Kesulitannya semakin bertambah ketika suaminya terkena sakit parah dan mau tidak mau dia harus menyelamatkan nyawanya dengan memasukkannya ke rumah sakit. Itu pun di kelas III yang hampir semua penghuninya kaum duafa. Setelah berusaha ke sana-kemari meminjam uang, hasilnya nihil, lalu ibu ini memberanikan diri datang ke rumah Pak Ahmad untuk meminjam uang.

Pak Ahmad pun dihadapkan pada pilihan sulit: meminjamkan uang dan cita-citanya untuk berhaji akan kandas di tengah jalan atau tidak meminjamkan uang dan membuat penderitaan tetangganya bertambah panjang. Setelah berdiskusi dengan istrinya, Pak Ahmad memilih jalan ketiga.

Dia tidak meminjamkan uang dan tidak pula menahannya, tetapi memberikan seluruh uang hajinya untuk membayar biaya rumah sakit tetangganya. Sebuah pilihan yang sangat berat dan berani serta tidak masuk akal dalam pandangan kaum materialis.

Bayangkan saja, bertahun-tahun menabung, peras keringat banting tulang mengumpulkan uang, ketika uang sudah terkumpul, dia memberikannya begitu saja kepada orang lain. Namun, amal kebaikan sering sekali tak bisa diukur dengan logika kebanyakan orang.

Sebagaimana tak masuk logikanya Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih anaknya atau "keanehan" sikap para sahabat yang rela meninggalkan tanah kelahirannya, sanak saudara, dan harta kekayaannya demi berhijrah ke Madinah walau harus melalui perjalanan yang sangat berat. Itulah buah keimanan yang teramat tinggi nilainya yang sulit dicerna oleh orang-orang yang

matanya sudah silau dengan dunia.

Pak Ahmad dan istrinya sangat yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyalahkan amal kebaikan hamba-hamba-Nya. Bukankah Allah dan Rasul-Nya telah berjanji, "Barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, niscaya Allah akan meringankan bebannya di akhirat."

Kemampuan memilih prioritas amal yang disertai keyakinan yang mantap terhadap janji Allah telah menguatkan hati Pak Ahmad untuk memberikan hartanya yang paling berharga.

Disertai derai air mata sedih campur bahagia, tetangga Pak Ahmad menerima uang itu. Dia seakan tengah bermimpi, ternyata pada zaman sekarang masih ada orang yang berhati mulia seperti Pak Ahmad dan istrinya. Dia tak mampu berkata apa-apa selain ucapan terima kasih dan doa semoga Allah mengganti uang tersebut dengan sesuatu yang lebih baik.

Kisah pun berlanjut. Seorang dokter yang menangani operasi Pak Fulan, tetangga Pak Ahmad, sedikit kaget. Kok bisa pasien seperti Pak Fulan bisa membayar biaya operasi yang termasuk mahal, bahkan sangat muahahal bagi sebagian orang. Padahal, dokter itu sudah bisa menebak latar belakang Pak Fulan. Iseng-iseng dia bertanya dari mana Pak Fulan mendapatkan uang, apakah dia menjual warisan, menjual ramah, meminjam, atau apa?

"Sama sekali bukan Dok, kami ini orang miskin, tidak punya apa-apa. Jangankan membayar biaya rumah sakit yang puluhan juta, untuk makan sehari-hari pun harus gali lobang tutup lobang," jawab Pak Fulan.

"Lho, kalau begitu dari mana?"

"Alhamdulillah, ada seseorang yang membayarkan biaya operasi kami."

Dokter itu makin penasaran, "Wah hebat benar orang itu. Pastilah dia orang kaya yang sangat dermawan."

"Oh... Tidak Dok, dia orang biasa-biasa," Pak Fulan kemudian menceritakan kisah Pak Ahmad yang rela menunda ibadah haji demi meringankan beban pender-

itaan dirinya yang sekadar seorang tetangga.

Selesai Pak Fulan bercerita, Dokter itu langsung meminta izin untuk diperkenalkan dengan Pak Ahmad. Dia ingin tahu lebih jauh tentang siapa Pak Ahmad itu sebenarnya. Allah pun mempertemukan mereka.

Kepada Pak Ahmad dan istrinya, Dokter ini berkata, "Saya ingin belajar ikhlas seperti yang Ibu-Bapak lakukan. Akan tetapi, bukan di sini, saya ingin belajarnya di Tanah Suci. Jadi, saya dan keluarga akan mengajak serta Ibu dan Bapak pergi ke sana tahun ini."

Mata Pak Ahmad tampak berkaca-kaca. Sejenak, dia tidak bisa berkata-apa. Dia seakan tidak percaya dengan kata-kata yang didengarnya. Hingga akhirnya, ucapan hamdalah terucap dari bibirnya.

Begitulah, sebelum membalas kebbaikannya di akhirat, Allah Swt. telah memberikan DP-nya terlebih dahulu di dunia. Harapan Pak Ahmad untuk berhaji dengan istrinya akhirnya terlaksana dalam keadaan yang penuh bahagia. ♦ net





IKLAN 1 HALAMAN FC
Rp. 50.000.000



IKLAN BACK COVER FC
Rp. 75.000.000



IKLAN 1/2 HALAMAN FC
Rp. 25.000.000

Media Yang Tepat Untuk Promosi Usaha Anda

MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC) 1 ALAMAN
UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN 1/2 CENTERSPREAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC) (186 X 124 MMK)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC), UKURAN 186 X 124 MMK (HORIZONTAL), 90 X 250 MMK (VERTIKAL)
- IKLAN ADVERTORIAL (FC) 1 HALAMAN UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN CENTERSPREAD (FC) DILUAR EDISI KHUSUS, 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297MMK
- IKLAN COVER 2 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN COVER 3 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN DISPLAY (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN HALAMAN 13, 15, 17 (FC)
1 HALAMAN UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK

MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE:

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai Dengan Topik Bahasan.
- Pilihan Halaman Iklan Yang Mudah Disimak Pembaca
- Harga Iklan Yang Bertabur Diskon Untuk Para Pelanggan



IKLAN CENTER SPREAD FC Rp. 80.000.000

● Contact Person : ZULFAHMI JAMBA

▶ 021 - 79196781

▶ 081380196507

▶ Email : moeslimchoice@gmail.com



MOESLIM CHOICE

● EDISI 31 / JULI 2020

● MOESLIMCHOICE.TV
● MOESLIMCHOICE.COM

**GUBERNUR
HERMAN DERU
TAHU ISI HATI
MAHASISWA**

**BAMSOET: PERLU
DIKEMBANGKAN
DIGITALISASI PEMILU**

**FLU BABI LAGI,
PADAHAL
CORONA
BELUM PERGI**

**7 BAGIAN TUBUH
MANUSIA
KESUKAAN JIN**

**5 NEGARA ISLAM
PALING TERDAMPAK
VIRUS CORONA**

EDHY PRABOWO:

**MUARANYA
KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

**PANDEMI, SELEB PUN
BANTING SETIR JUAL
MAKANAN**

